



LAPORAN KINERJA

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Tahun 2023



DJKPRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok

Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT. Telp. (0380) 890421



BKKPN
KUPANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel kompeten
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

LEBE BAE

Layanan Prima, Empati, Berani Jujur, Efisien dan Efektif.
Bersih dari KKN, Akuntabel, Enak



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



**Bijak
Mengelola
LAUT**

**#2023
RHP THRIVE**



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Imam Fauzi (Kepala BKKPN Kupang)

Ketua / Manajer Tim :

Muhammad Ramli Firman (Kepala Subbagian Umum)

Anggota :

1. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo (Perencana Ahli Pertama)
2. Riyan Afif Al Ihsan (APJK Ahli Pertama)

Kontributor :

Tim Tata Kelola Kinerja

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



**Bijak
Mengelola
LAUT**

**#2023
KHP THRIVE**



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023. Laporan Kinerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2023 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BKKPN Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang selama Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) selaku Unit Kerja atasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
Mengelola
LAUT

#2023
KHP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Kupang, 18 Januari 2024



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi
Kepala BKKPN Kupang



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
Mengelola
LAUT

#2023
KHP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Pada pelaporan Kinerja Tahun 2023 data capaian dan target BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL2023.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Tahun 2023 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang yang diukur pada Tahun 2023 ini yaitu **(1)** Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 dokumen (target 3 dokumen), **(2)** Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang 10,21% (target 5%), **(3)** Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 1 dokumen (target 1 dokumen), **(4)** Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah kerja BKKPN Kupang 3 dokumen



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
mengelola
LAUT

#2023
KHP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

(target 1 dokumen), **(5)** Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah kerja BKKPN Kupang 3 kelompok (target 2 kelompok), **(6)** Nilai PNBK BKKPN Kupang Rp. 2.369.683.750 (target Rp. 1.725.000.000), **(7)** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang 99,42 (target 93,75), **(8)** Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang 94,48 (target 82), **(9)** Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang 93,03 (target 75), **(10)** Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang 91,53 (target Indeks 84), **(11)** Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang 88,20 (target 75), **(12)** Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang 4 dokumen (target 4 dokumen), **(13)** Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 133,3% (target 92%), **(14)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan 100% (target 75%), **(15)** Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang 100% (target 100%), **(16)** Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang 100% (target 77,5%).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja pada mulanya adalah sebesar Rp. 27.161.936.000,- dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebesar Rp. 25.788.288.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.731.307.929,- atau tercapai 95,90% dari pagu anggaran. Namun demikian tidak seluruh alokasi anggaran dapat digunakan, hal tersebut dikarenakan adanya blokir sebesar Rp. 700.000.000 sehingga pagu optimal yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 25.088.288.000,-.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
mengelola
LAUT

#2023
HPP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

periode Triwulan IV atau Tahun 2023 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **113,95 (Biru-Istimewa)**.

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BKKPN Kupang kedepan adalah dengan (1) Melaksanakan fasilitasi perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), (2) Melaksanakan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai evaluasi efektivitas Kawasan konservasi, (3) Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* melalui implementasi kemitraan yang telah disepakati, finaliasi dokumen jejaring konservasi, dan menginisiasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya, (4) Melaksanakan pendampingan dan monitoring atas pemanfaatan bantuan Kompak dan menyiapkan calon penerima bantuan kompak pada periode berikutnya, (5) Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi, (6) Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
mengelola
LAUT

#2023
HPP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Tugas dan Fungsi	7
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	14
2.1.1. Visi	17
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan	19
2.1.4. Sasaran Strategis	20
2.1.5. Sasaran Kegiatan	20
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	32
3.1.1. IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang ..	32



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

3.2.	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	41
3.2.1.	IKU 2 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang	41
3.3.	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	61
3.3.1.	IKU 3 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	61
3.3.2.	IKU 4 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	66
3.4.	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	75
3.4.1.	IKU 5 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	76
3.5.	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang	84
3.5.1.	IKU 6 Nilai PNBK BKKPN Kupang	84
3.6.	Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	94
3.6.1.	IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang	94
3.6.2.	IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang	101
3.6.3.	IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang	105
3.6.4.	IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang .	110
3.6.5.	IKM 11 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang	117
3.6.6.	IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang	124



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



Bijak
mengelola
LAUT

#2023
HPPH THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

3.6.7.	IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	128
3.6.8.	IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	133
3.6.9.	IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	138
3.6.10.	IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang	143
3.7.	Akuntabilitas Keuangan	149
3.8.	Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Satuan Kerja Sejenis	153
3.9.	Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan	155
BAB IV	PENUTUP	161
4.1	Kesimpulan	161
4.2	Rekomendasi	164
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	164
LAMPIRAN	167



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024 BKKPN Kupang	21
TABEL 2	Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2023	26
TABEL 3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	30
TABEL 4	Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	33
TABEL 5	Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	35
TABEL 6	Realisasi Anggaran Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	40
TABEL 7	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	43
TABEL 8	Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	45
TABEL 9	Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023	46
TABEL 10	Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d 2023	50
TABEL 11	Realisasi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023	60
TABEL 12	Capaian Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023	62
TABEL 13	Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	67



BKKPN
KUPANG



LE BE BAE



Bijak
mengelola
LAUT

#2023
RHP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

TABEL 14	Pengesahan Kemitraan Tahun 2023	68
TABEL 15	Realisasi Anggaran Kemitraan Konservasi Tahun 2023 ...	75
TABEL 16	Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	77
TABEL 17	Tabel Bantuan KOMPAK Tahun 2020 - Tahun 2023	79
TABEL 18	Daftar Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK tahun 2023	81
TABEL 19	Realisasi Anggaran Bantuan KOMPAK Tahun 2023	83
TABEL 20	Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2023	85
TABEL 21	Perolehan PNBPN Tahun 2023	86
TABEL 22	Realisasi Anggaran Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Tahun 2023	93
TABEL 23	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai ...	95
TABEL 24	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023 .	96
TABEL 25	Capaian Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	97
TABEL 26	Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	100
TABEL 27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	102
TABEL 28	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023 ...	106
TABEL 29	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023	113
TABEL 30	Realisasi Anggaran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023	116
TABEL 31	Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP	117



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

TABEL 32	Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	119
TABEL 33	Realisasi Anggaran Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	123
TABEL 34	Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	125
TABEL 35	Realisasi Anggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2023	128
TABEL 36	Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023	130
TABEL 37	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan IV Tahun 2023	134
TABEL 38	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	139
TABEL 39	Realisasi Anggaran Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	143
TABEL 40	Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	145
TABEL 41	Realisasi Anggaran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023	148
TABEL 42	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang III Tahun 2023	150
TABEL 43	Persentase Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023	152
TABEL 44	Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023	154



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



**Bijak
mengelola
LAUT**

**#2023
KHP THRIVE**



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

TABEL 45 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya 165



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang	10
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BKKPN Kupang	11
GAMBAR 3	Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang	12
GAMBAR 4	Visi, Misi, Arahan Presiden	15
GAMBAR 5	Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2023	29
GAMBAR 6	Bimtek Penyelenggaraan PKKPRL oleh UPT Lingkup DJPRL	38
GAMBAR 7	Pendampingan & Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di TNP Laut Sawu, KK Gili Matra dan KK Laut Banda .	38
GAMBAR 8	Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan	39
GAMBAR 9	Monitoring Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	39
GAMBAR 10	Sinkronisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan RL	39
GAMBAR 11	Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi	42
GAMBAR 12	Kawasan Konservasi Berstatus Emas	47
GAMBAR 13	Kawasan Konservasi Berstatus Perak	48
GAMBAR 14	Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d 2023	49
GAMBAR 15	Pengadaan Mooring Buoy penanda zona inti dan tambat labuh di Gili Matra	51
GAMBAR 16	Penyediaan Media Publikasi Kawasan Konservasi Gili Matra	52
GAMBAR 17	Penyediaan Kendaraan Fungsional Survei dan Pelayanan	52
GAMBAR 18	Penyediaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	52



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

GAMBAR 19	Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi	53
GAMBAR 20	Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi	53
GAMBAR 21	Pengadaan peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan	53
GAMBAR 22	Pengadaan Sarana Survei Oceanografi Kawasan Konservasi Perairan	54
GAMBAR 23	Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	54
GAMBAR 24	Survei Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi	54
GAMBAR 25	Survei Ekosistem Padang Lamun di Kawasan Konservasi	55
GAMBAR 26	Survei Ekosistem Mangrove di Kawasan Konservasi ...	55
GAMBAR 27	Survei Biota Laut Dilindungi di Kawasan Konservasi ...	55
GAMBAR 28	Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi	55
GAMBAR 29	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi	56
GAMBAR 30	Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi	56
GAMBAR 31	Respon Cepat penanganan Ancaman Sumberdaya Kawasan	56
GAMBAR 32	Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	57
GAMBAR 33	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi	57
GAMBAR 34	Bimbingan Teknis Penyediaan Data Hasil Survei Biota Dilindungi	58
GAMBAR 35	Bimtek dan Sertifikasi Pelayanan Prima	58



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

GAMBAR 36	Penilaian EVIKA Wilayah Kerja BKKPN Kupang	59
GAMBAR 37	BKKPN Kupang Menjadi Pusat Studi Tiru	59
GAMBAR 38	Pertemuan Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dengan Kawasan Konservasi Kepulauan Alor	65
GAMBAR 39	Pembahasan Jejaring Konservasi Provinsi NTT	65
GAMBAR 40	Finalisasi Dokumen Jejaring Konservasi di Prov. NTT .	65
GAMBAR 41	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi s.d 2023	70
GAMBAR 42	Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dan Fakultas Pertanian UNRAM	73
GAMBAR 43	Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perjanjian Kemitraan Undip dan UGM	73
GAMBAR 44	Pembahasan Rencana Kerjasama antara BKKPN Kupang dengan Universitas Banda Naira	74
GAMBAR 45	Penandatanganan Naskah Perjanjian Kemitraan tahun 2023	74
GAMBAR 46	Penyerahan Bantuan Kompak Periode 2020-2023	80
GAMBAR 47	Serah Terima Bantuan Kompak Kelompok Meno Lestari, NTB	82
GAMBAR 48	Serah Terima Bantuan Kompak Yayasan Koppesda, NTT	82
GAMBAR 49	Serah Terima Bantuan Kompak Yayasan Cahaya Samudera Indonesia, Maluku	83
GAMBAR 50	Perolehan PNBPN Tahun 2023	86
GAMBAR 51	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi	87
GAMBAR 52	Perolehan PNBPN BKKPN Kupang Periode Tahun 2020-2023	88



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

GAMBAR 53	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi periode 2020-2023	88
GAMBAR 54	Dashboard Aplikasi Seapark	90
GAMBAR 55	Gerai Pelayanan di Kawasan Konservasi Gili Matra	91
GAMBAR 56	Inovasi Data Layanan PNPB Online	91
GAMBAR 57	Kajian Daya Dukung Kawasan Konservasi di Gili Matra	91
GAMBAR 58	FGD dan Sosialisasi Aturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	92
GAMBAR 59	Sosialisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi	92
GAMBAR 60	Pendampingan dan Koordinasi Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	92
GAMBAR 61	Capaian Nilai IKPA Triwulan IV Tahun 2023 pada Aplikasi OM-SPAN	97
GAMBAR 62	Inovasi Plakat	100
GAMBAR 63	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi SMART	103
GAMBAR 64	Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Lain	109
GAMBAR 65	Capaian IP ASN BKKPN Kupang Tahun 2023 pada Aplikasi IP ASN KKP	114
GAMBAR 66	Pejabat Struktural mengikuti PKA dan PKP	116
GAMBAR 67	Diklat 20 JP Secara daring melalui e-Milea KKP	116
GAMBAR 68	Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2023	121
GAMBAR 69	Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023	121
GAMBAR 70	Pembahasan dokumen Manual IKU 2023	122
GAMBAR 71	Bimtek Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja..	122
GAMBAR 72	Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal	122



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



**Bijak
mengelola
LAUT**

**#2023
KHP THRIVE**



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

GAMBAR 73	Bimtek dan Evaluasi AKIP	122
GAMBAR 74	Penerapan Inovasi MonSTERA	123
GAMBAR 75	Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Resiko	127
GAMBAR 76	Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi collaboration office	132
GAMBAR 77	Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK	135
GAMBAR 78	Pelaksanaan Audit Kinerja pada BKKPN Kupang	137
GAMBAR 79	Dokumen Tindak Lanjut yang disampaikan	138
GAMBAR 80	Penyusunan Laporan keuangan dan Laporan BMN	142
GAMBAR 81	Pelaksanaan Audit Oleh BPK	142
GAMBAR 82	Koordinasi Tindak Lanjut Temuan BPK	142
GAMBAR 83	Monitoring Pemanfaatan dan Penilaian Bantuan Kompak	147
GAMBAR 84	Pleno Penetapan Nilai efektivitas bantuan pemerintah	148
GAMBAR 85	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2023	150
GAMBAR 86	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	151
GAMBAR 87	Penghargaan 2023	156
GAMBAR 88	Studi Tiru di BKKPN Kupang	158
GAMBAR 89	Inovasi BKKPN Kupang	159



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



**Bijak
mengelola
LAUT**

**#2023
HPPH THRIVE**



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- LAMPIRAN 2 Dokumen Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang Laut
- LAMPIRAN 3 Berita Acara Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi
- LAMPIRAN 4 Penyampaian Draft jejaring Konservasi
- LAMPIRAN 5 Penyampaian Draft Kemitraan Konservasi
- LAMPIRAN 6 BAST KOMPAK
- LAMPIRAN 7 Capaian PNBPN
- LAMPIRAN 8 Nilai IKPA
- LAMPIRAN 9 Nilai Kinerja Anggaran
- LAMPIRAN 10 Nilai WBK
- LAMPIRAN 11 Nilai IP ASN
- LAMPIRAN 12 Nilai PM SAKIP
- LAMPIRAN 13 Penyampaian Laporan SPIP
- LAMPIRAN 14 Persentase Manajemen Pengetahuan
- LAMPIRAN 15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- LAMPIRAN 16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
- LAMPIRAN 17 Tingkat Efektivitas Bantuan Pemerintah
- LAMPIRAN 18 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BJAK
Mengeloid
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; serta (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada periode Tahun 2023.



1.3. Isu Strategis

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (± 108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumber daya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 pulau dengan 16.671 pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata - Laut DKI - Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi - Selat Makassar - Lautan Flores - Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non-hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut diantaranya merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, upaya dalam meningkatkan pengelolaan kawasan yang efektif dan optimal, serta amanat yang berasal dari kebijakan pusat atau nasional. Berbagai tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi juga menekankan manfaat



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi sangat penting karena selain memberikan manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan kawasan, pengelolaan kawasan konservasi perairan juga harus bermanfaat bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif erat kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah pengelolaan kawasan yang akuntabel, mandiri dan berkelanjutan. Sehingga tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya dapat terkelola dan terjaga dengan baik.

Selain itu, upaya penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Gili Ayer Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 58/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Padoido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dan Nomor 64/KEPMEN-



KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku, akan dilakukan sebagai dasar pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat sekitar di kawasan konservasi perairan nasional lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang.

Aktifitas penangkapan ikan di dalam kawasan oleh masyarakat dengan tidak ramah lingkungan masih dilakukan di dalam dan/atau disekitar kawasan konservasi. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat berdampak buruk dan menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam kawasan. Upaya pemantauan terhadap aktifitas yang merusak yang dilakukan oleh pengelola masih terbatas dikarenakan luasnya area yang dipantau serta keterbatasan sumberdaya pengelola. Melihat hal tersebut peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dianggap penting dan dibutuhkan dengan menerapkan model pengelolaan kolaboratif yang memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik.

Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU



Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. BKKPN Kupang akan berkontribusi terhadap pendataan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional yang ada di wilayah kerja melalui:

- Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi,
 - Perizinan pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- 4) Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.



1.4. Tugas dan Fungsi

BKKPN Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BKKPN Kupang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; (2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan, dan/atau situs budaya tradisional; (3) Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan; (4) Pengelolaan sistem, data, dan informasi; serta. (5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dengan tugas pokok dan fungsi BKKPN tersebut, maka diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dapat dilaksanakan dengan terencana serta melibatkan semua *stakeholder*, sehingga terwujud pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang Mengelola 8 KKPN, sebagaimana berikut:

1) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu



TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha;

- 2) Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan



Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki luas 49.923,55 Ha;

- 3) Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan memiliki luas 2.268,59 Ha;

- 4) Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku



Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya memiliki luas 2.371,85 Ha;

- 5) Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua



Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memiliki luas 177.411,35 Ha;

- 6) Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya memiliki luas 325.084,92 Ha yang terdiri dari :

- Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya seluas 267.209,16 Ha; dan
- Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 57.875,75 Ha

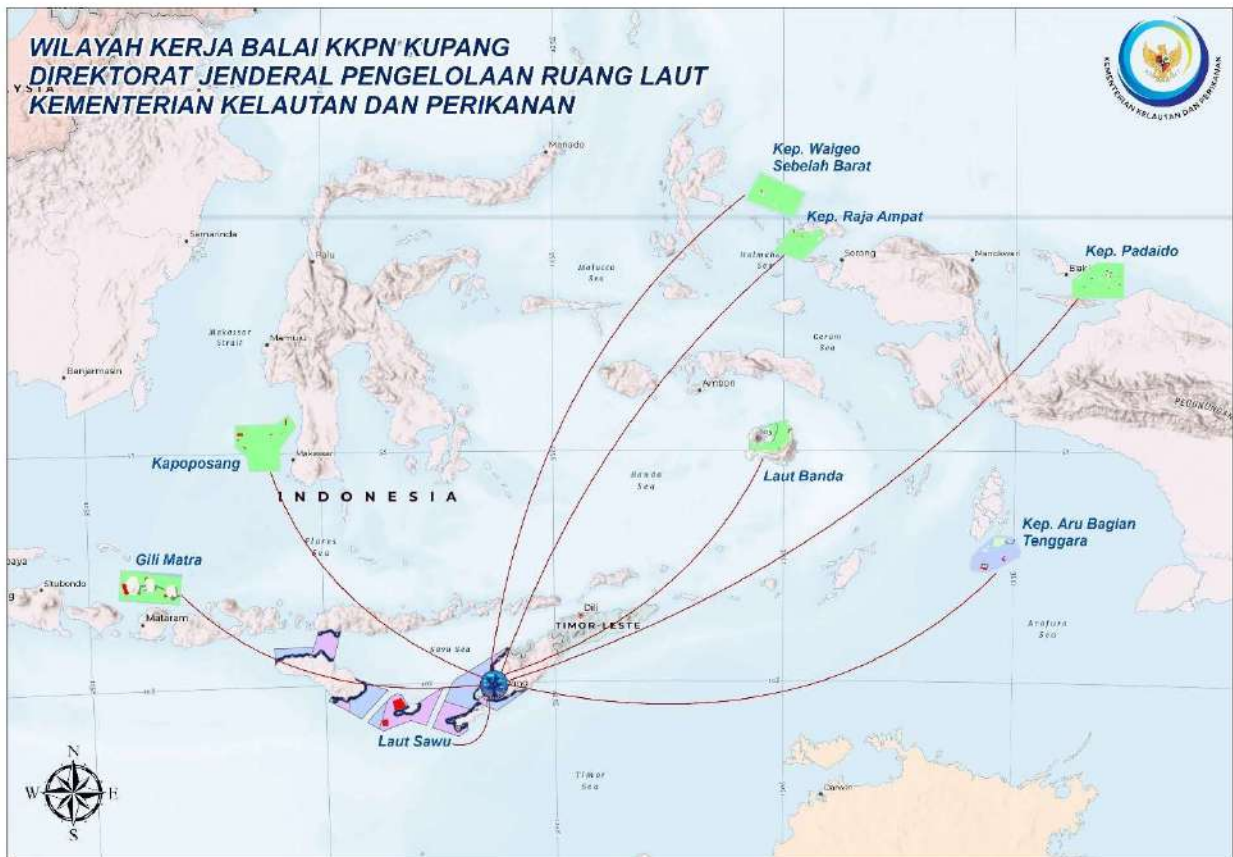


7) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara



SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha.

Kawasan konservasi perairan nasional yang merupakan wilayah kerja BKKPN Kupang sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



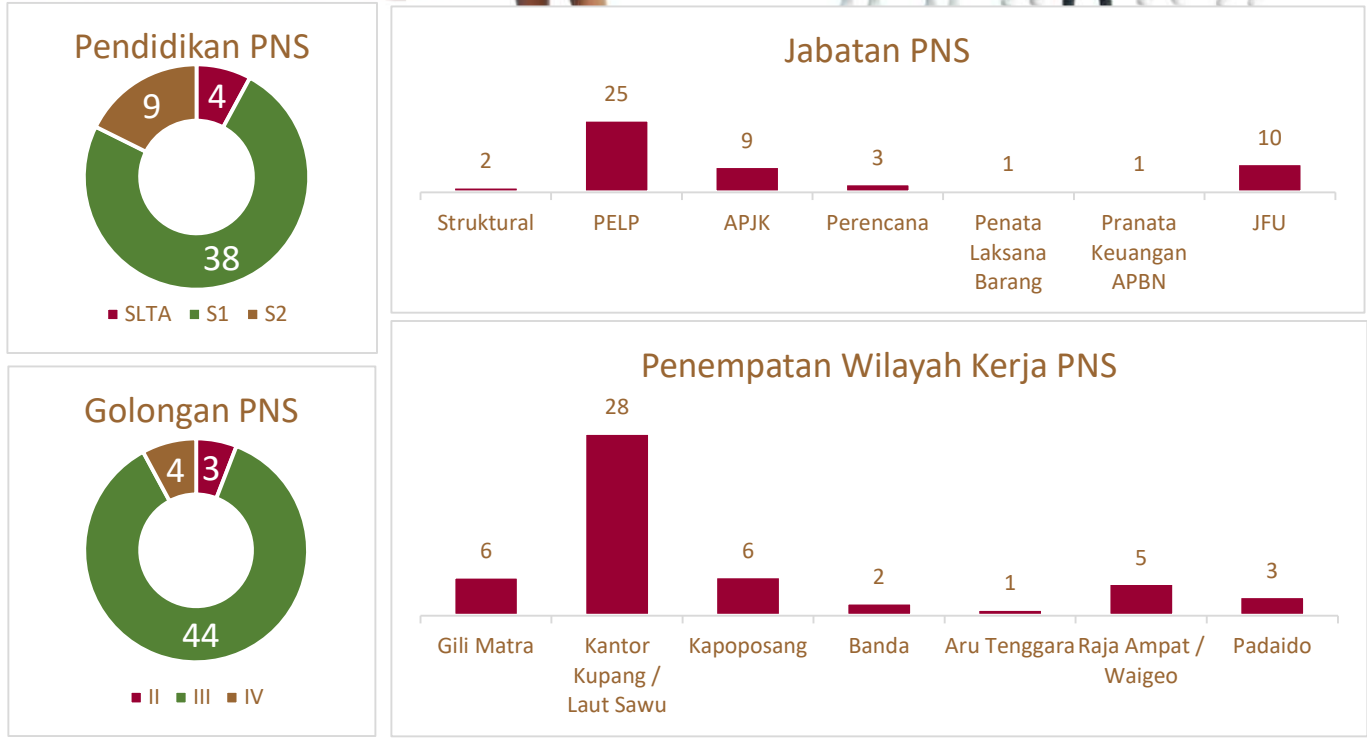
Gambar 2. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

Sampai dengan Tahun 2023, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang memiliki 51 orang PNS, dimana Jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja BKKPN Kupang (TNP Laut Sawu, Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Taman di Perairan Laut Banda, Taman di Perairan Kepulauan Padaido, Taman di Perairan Waigeo



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Sebelah Barat dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat, SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Kantor di Kupang). Serta memiliki 1 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 58 Orang tenaga non ASN. Secara garis besar keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang



1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 BKKPN Kupang adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan;

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan) serta indikator dan target indikator kinerja utama BKKPN Kupang tahun 2023.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengefektifkan
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam Menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci kedalam renstra unit kerja terendah.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4. Visi, Misi, Arahan Presiden

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang



Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, petambak garam, para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.



VISI BKKPN KUPANG

“Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi DJPRL”

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi Ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.



Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BKKPN Kupang, maka ditetapkan Misi BKKPN Kupang yaitu:

MISI BKKPN KUPANG

1. Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BKKPN Kupang

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi diatas, BKKPN Kupang merumuskan tujuan kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;.
2. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;
3. Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan di BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BKKPN Kupang.



2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis KKP sebagai berikut :

- 1 SS 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- 2 SS 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- 3 SS 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- 4 SS 4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- 5 SS 5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- 6 SS 6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab
- 7 SS 7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- 8 SS 8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
- 9 SS 9 Tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.5. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan review atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran Kegiatan dan Penambahan Indikator Kinerja Baru pada BKKPN Kupang Tahun 2023 yang belum dicatumkan atau disesuaikan dengan dokumen reuiu Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 yang dilaksanakan tanggal 25 November 2022, sehingga dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024
BKKPN Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 0 Rekomendasi Kebijakan sampai dengan 2021 menjadi 3 Rekomendasi Kebijakan pada tahun 2024.
2	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan sebesar 4.039.436 ha pada tahun 2020.
		3	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari konversi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) tahun 2020 meningkat 20% pada tahun 2024.
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4	Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kesepakatan pada tahun 2020 menjadi 10 kesepakatan pada tahun 2024.
4	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari 2 kelompok pada tahun 2020 menjadi 14 kelompok pada tahun 2024.
5	Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang	6	Nilai PNBPN BKKPN Kupang sebesar Rp. 32.500.000,- tahun 2022, Rp. 294.475.000,- tahun 2023, dan Rp. 316.145.000,- tahun 2024
6		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKKPN Kupang		Kupang, dari 88 pada tahun 2020 menjadi 91 pada tahun 2024.
8		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang, 85 (2020), 86 (2021), 81 (2022) perubahan metode penghitungan, 82 (2023), dan 83 (2024)	
9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yaitu 76 sampai dengan 2024.	
10		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang, dari 72 pada tahun 2020 menjadi 83 pada tahun 2024.	
11		Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang, dari 90 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024.	
12		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang, dari 0 Dokumen sampai dengan tahun 2021 menjadi 12 Dokumen pada tahun 2024.	
13		Persentase Unit Kerja BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.	
14		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, dari 65% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2024.	
15		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang yaitu 100% sampai dengan tahun 2024.	
16		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah BKKPN Kupang, dari 72,5 % pada tahun 2021 menjadi 80 % pada tahun 2024.	



Terdapat beberapa penyesuaian, pengembangan, dan/atau penambahan Sasaran Kegiatan BKKPN Kupang tahun 2023, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2023), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), dan Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Pengembangan 2022), dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).



5. Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Penambahan), untuk mengkomodifikasi Indikator Kinerja Utama Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rupiah) pada tahun 2022.

Terdapat perbedaan jumlah Sasaran Kegiatan pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (4 Sasaran Kegiatan) dan reviu Renstra yang dilaksanakan pada 25 November 2022 (6 Sasaran Kegiatan), sedangkan Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang tahun 2023 (6 Sasaran Kegiatan). Akan tetapi terdapat penyesuaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjadi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat penyesuaian, penambahan, dan/atau penghapusan terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial BKKPN Kupang, dimana terdapat indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2023 (2 indikator), penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2023 (2 indikator) dan penghapusan indikator di tahun 2023 (1 indikator).

Indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen) merupakan penyesuaian dari indikator kinerja utama Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Rekomendasi Kebijakan) yang juga merupakan merupakan



penyesuaian IKU sebelumnya pada Renstra yaitu Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen).

2. Indikator Kinerja Utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen) merupakan penyesuaian indikator kinerja utama Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan), yang juga merupakan penyesuaian IKU sebelumnya pada Renstra yaitu Kesepakatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dan Konvensi dalam Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut diimplementasikan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan).

Sedangkan indikator baru yang merupakan penambahan indikator kinerja dan dipergunakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen) yang merupakan pengembangan indikator kinerja utama Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan) dan juga merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023.
2. Indikator Kinerja Manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023.

Kemudian indikator kinerja yang dilakukan penghapusan dan tidak digunakan lagi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Manajerial Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang (Nilai), dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi Setditjen PRL pencapaian indikator kinerja ini sudah maksimal dan telah



terimplementasikan dengan baik diseluruh unit kerja lingkup Ditjen PRL.

Pada tahun 2023 ini terdapat perubahan indikator dan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebanyak satu kali, dimana perjanjian kinerja awal ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2023 dan perubahannya ditandatangani pada tanggal 30 November 2023. Adapun perubahan Indikator dan Target Kinerja adalah sebagai berikut :

- Menghilangkan kalimat “dan/atau Dievaluasi” pada IKU nomor 4, sehingga tidak bermakna ganda;
- Merubah target PNBPN, semula Rp. 294.475.000,- menjadi Rp. 1.725.000.000,- berdasarkan hasil audit kinerja tahun 2023 dan usulan BKKPN Kupang tanggal 21 Agustus 2023 sesuai surat nomor B.2831/BKKPN/RC.110/VIII/2023;
- Merubah target nilai IKPA, semula 89 menjadi 93,75 berdasarkan nota dinas Biro Perencanaan KKP Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

Indikator dan target kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
2	Meningkatnya Efektivitas Kawasan	2	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional	5



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang		Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	
3	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
		4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
4	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
5	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	6	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	1.725.000
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,75
		8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	82
		9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	84
		11	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	75
		12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		13	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya	75



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	
		15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	77,5

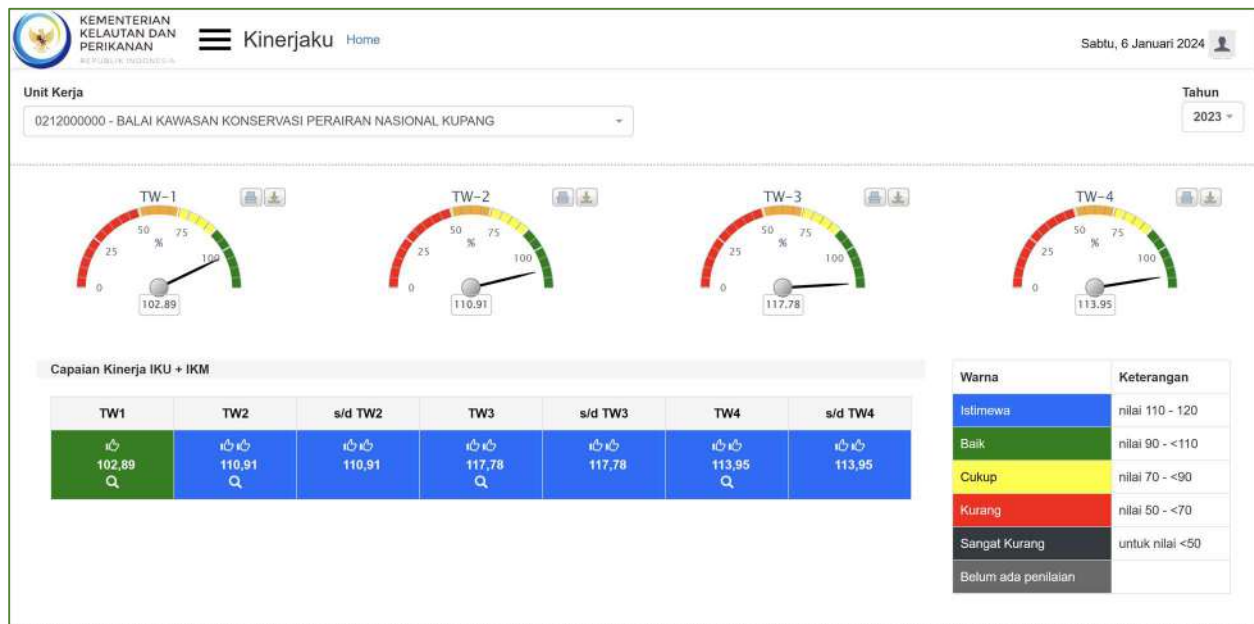
Dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2023, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal adalah sebesar Rp. 27.161.936.000,-. Namun demikian pada bulan Agustus 2023 terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari PNPB sebesar Rp. 1.640.550.000,- yang belum dituangkan dalam perjanjian kinerja. pagu anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.802.486.000,-, akan tetapi pada triwulan IV tahun 2023 terdapat penyesuaian pagu anggaran akibat kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. **Total pagu anggaran tahun 2023** sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar **Rp. 25.788.288.000,-**, namun demikian terdapat **blokir** sebesar **Rp. 700.000.000,-** akibat tidak relevan dengan pencapaian target RO, sehingga **pagu optimal** yang dapat digunakan adalah sebesar **Rp. 25.088.288.000,-**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dengan total **16** (enam belas) **indikator**. Pada Triwulan IV Tahun 2023 sesuai dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi BKKPN Kupang adalah sebesar **113,95 (Istimewa)**. Capaian Kinerja Organisasi pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id disajikan pada gambar 5. Rincian realisasi Indikator Kinerja disajikan pada tabel 3.



Gambar 5. Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2023

Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Triwulan IV
Tahun 2023

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan IV		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	3	3	3	100
IKU 2	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	5	5	10,21	120
IKU 3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	1	1	1	100
IKU 4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	1	1	3	120
IKU 5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	Triwulan	2	2	3	120
IKU 6	Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rp.000)	Tahunan	1.725.000	1.725.000	2.369.683,75	120
IKM 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	93,75	93,75	99,42	106,05
IKM 8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	82	82	94,48	115,22

**BKKPN**
KUPANG**LEBE BAE****BJAK**
Mengekoid
LAUT#2023
HMP THRIVE

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan IV		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKM 9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	75	75	93,03	120
IKM 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	84	84	91,53	108,96
IKM 11	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	75	75	88,20	117,60
IKM 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	4	4	100
IKM 13	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulan	92	92	133,3	120
IKM 14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	75	75	100	120
IKM 15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	100	100	100
IKM 16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	77,5	77,5	100	120



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

3.1 Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen).

3.1.1 IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada periode Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023

SK 1 Terseleenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	3	3	100 (100)	-	3	100 (100)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran target indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, target indikator kinerja tahun 2023 ini adalah sebanyak 3 dokumen dengan realisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% dari target sebagaimana disampaikan oleh ketua tim kerja pelayanan dan pemanfaatan ruang laut selaku penanggungjawab kegiatan melalui memorandum kepada Kepala BKKPN Kupang nomor 13/BKKPN/TU.140/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal penyampaian Laporan Tahunan Pemanfaatan Ruang Laut Lingkup BKKPN Kupang tahun 2023.

Adapun pelaksanaan operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui 3 kegiatan utama yaitu sosialisasi penyelenggaraan



penataan ruang laut, verifikasi pemanfaatan ruang laut, dan monitoring pemanfaatan ruang laut dengan hasil sebagai berikut :

- **Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut** dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional wilayah kerja BKKPN Kupang, yaitu Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu (NTT), Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB) dan Kawasan Konservasi Laut Banda (Maluku). Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang aturan penyelenggaraan penataan ruang laut kepada masyarakat dan stakeholder terkait yang memanfaatkan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang. Adapun pihak-pihak yang mendapatkan sosialisasi adalah Perusahaan Swasta, BUMN/D, Pemerintah Pusat/Daerah, Masyarakat lokal, Aparat pemerintah desa/kampung, dengan total 760 orang;
- **Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut** atau penilaian teknis permohonan perizinan KKPRL bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan KKPRL yang dilakukan di Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKKPN Kupang. Selama tahun 2023, BKKPN Kupang melaksanakan Penilaian Teknis KKPRL melalui penugasan dari plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut sebanyak 3 (tiga) permohonan Persetujuan KKPRL di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB) dan disertai dengan 2 (dua) verifikasi lapangan atas permohonan Persetujuan KKPRL tersebut.
- **Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut** merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Konservasi Nasional wilayah kerja BKKPN Kupang untuk mewujudkan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui identifikasi eksisting



kegiatan pemanfaatan ruang laut; monitoring eksisting pemanfaatan ruang laut di dalam kawasan konservasi; serta sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan ruang laut dan perizinan Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKKPN Kupang dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dari hasil monitoring terdapat pemanfaatan ruang laut eksisting sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kawasan Konservasi	Jenis Pemanfaatan			Jumlah
	Non Berusaha	Berusaha	Berusaha Oleh Masy. Lokal	
Laut Sawu	23	11	206	240
Gili Matra	3	-	-	3
Kep. Kapoposang	7	-	-	7
Laut Banda	61	5	2	68
Kep. Padaido	7	-	-	7
Kep. Raja Ampat dan Kep. Waigeo Sebelah Barat	11	-	26	37
TOTAL	112	16	234	362

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 merupakan penyesuaian dari indikator kinerja utama Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2022. Periode pengukuran capaian merupakan target tahunan, sehingga



tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode yang sama dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang, karena terdapat penyesuaian indikator kinerja dan perubahan satuan, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu peningkatan kompetensi individu pengelola perizinan pemanfaatan ruang laut, sosialisasi KKPRL kepada stakeholder terkait, verifikasi atau penilaian teknis teknis pengajuan izin KKPRL dan monitoring izin pemanfaatan ruang laut.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut, yaitu :

- masih banyak para pemanfaat ruang laut yang belum mengetahui perizinan pemanfaatan ruang laut;
- pemerintah daerah masih belum mengetahui terkait perizinan pemanfaatan ruang laut terutama terkait fasilitasi perizinan KKPRL bagi masyarakat lokal melalui mekanisme pengajuan izin oleh Bupati/Walikota.

c. Solusi



Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah

- Telah dilakukan sosialisasi terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang;
- Telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi secara intensif dengan pemerintah daerah terkait mekanisme fasilitasi perizinan KKPRL bagi masyarakat lokal.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dimana dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan. Selain itu pelaksanaan kegiatan verifikasi dan monitoring juga melibatkan staf PSDKP sebagai Aparat Penegak Hukum.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 ini, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah

- Peningkatan kompetensi SDM pengelola perizinan pemanfaatan ruang laut melalui Bimtek Penyelenggaraan PKKPRL oleh UPT Lingkup DJPRL di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di TNP Laut Sawu, Kawasan Konservasi Gili Matra, dan Kawasan Konservasi Laut Banda;
- Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi Gili Matra.

- Monitoring perizinan dan identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BKKPN Kupang.
- Sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut dan perizinan di Kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang.

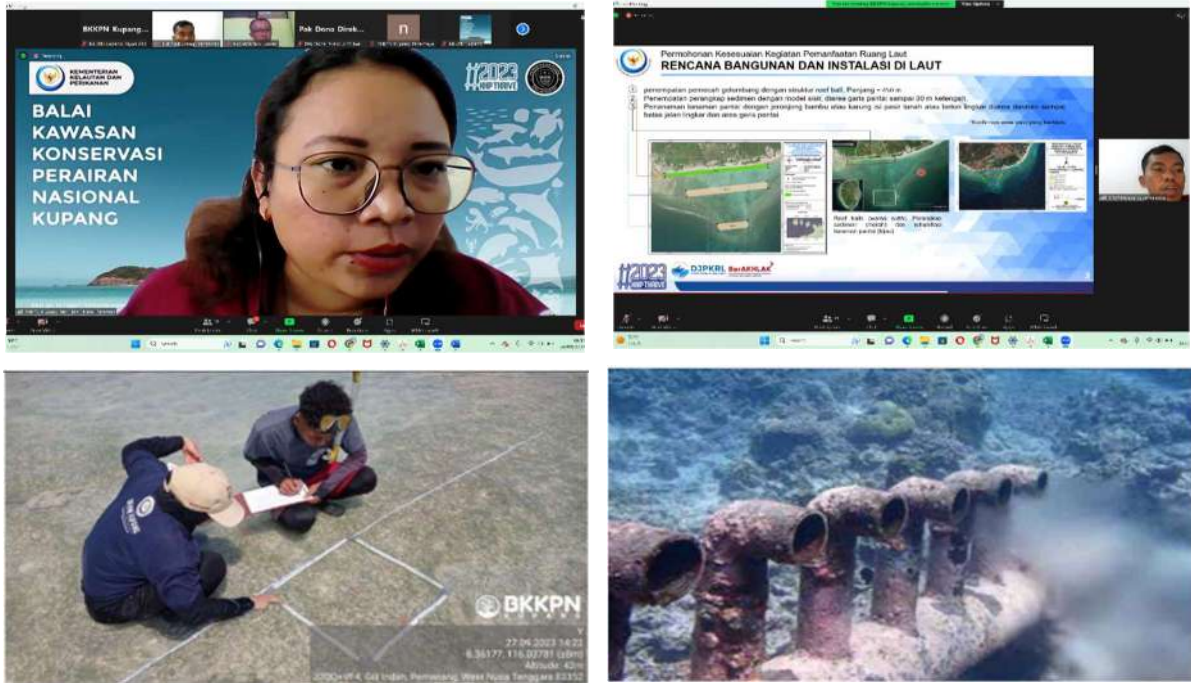


Gambar 6. Bimtek Penyelenggaraan PKKPR oleh UPT Lingkup DJPRL



Gambar 7. Pendampingan & Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di TNP Laut Sawu, KK Gili Matra dan KK Laut Banda

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 8. Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan



Gambar 9. Monitoring Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut



Gambar.10 Sinkronisasi dan Koordinasi Perizinan pemanfaatan RL



7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran terkait pencapaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (RM)	350.000.000	349.595.682	99,88	404.318
TOTAL		350.000.000	349.595.682	99,88	404.318

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.595.682,- atau 99,88% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 404.318,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, verifikasi atau penilaian teknis pengajuan izin KKPRL, dan monitoring pemanfaatan ruang laut serta pendampingan fasilitasi KKPRL bagi masyarakat lokal.



3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.2.1 IKU 2 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020.

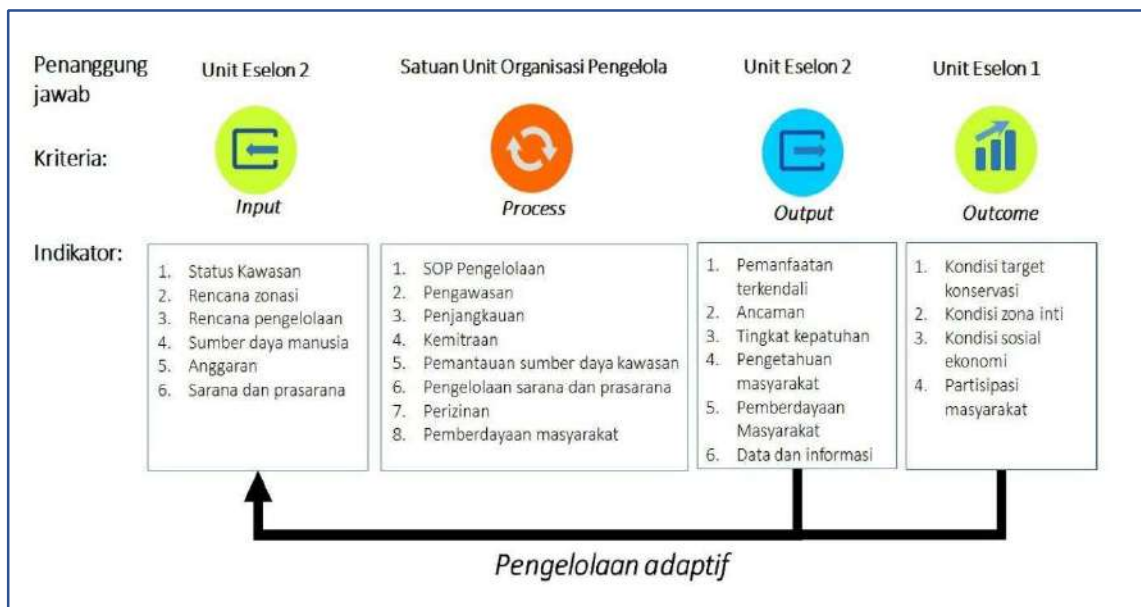
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020 Aspek penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab satuan unit organisasi pengelola (SUOP), Adapun kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi adalah :

- a. Kriteria Input : Status Kawasan, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana;
- b. Kriteria Proses : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Pengawasan, Penjangkauan (Outreach), Kemitraan, Pemantauan Sumber

Daya Kawasan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional);

- c. Kriteria Output : Pemanfaatan Terkendali, Ancaman, Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional), Pemberdayaan Masyarakat, Data dan Informasi;
- d. Kriteria Outcome : Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona inti, Kondisi Sosial Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional).

Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut disampaikan dalam gambar 10.



Gambar 11. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi



Nilai evaluasi menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50 %	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
> 50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adatif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Tata cara evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan pengelolaannya, tahapan tata cara evaluasi sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui SK Dirjen PRL
- b. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian
- c. Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen
- d. Penilaian dan Verifikasi
- e. Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
- f. Pelaporan

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya terdiri dari 8 kawasan konservasi, yaitu :

1. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

3. Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku;
5. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua;
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
7. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
8. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku.

Cara menghitung indikator kinerja utama ini adalah dengan menghitung rata-rata hasil penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja BKKPN Kupang dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Penetapan target indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional wilayah kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah rata-rata sebesar 5%. *Baseline* nilai akhir adalah rata-rata hasil penilaian EVIKA pada tahun 2022 yaitu 72,87%, capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:



Tabel 8. Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023

SK 2										
Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 2										
Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
14,59	14,59	-	5	10,21	204,20 (120)	- 4,38 (30,02)	5	204,20 (120)	20	224,6%

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran target indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian tahun 2023 adalah sebesar 10,21 dari target 5 atau tercapai 204,20% (120% Kinerjaku) dari target, sebagaimana disampaikan oleh ketua tim kerja perlindungan dan pelestarian selaku penanggungjawab kegiatan melalui memorandum kepada Kepala BKKPN Kupang tanggal 29 November 2023 perihal Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Lingkup BKKPN Kupang tahun 2023. Adapun hasil penilaian disajikan pada tabel berikut :

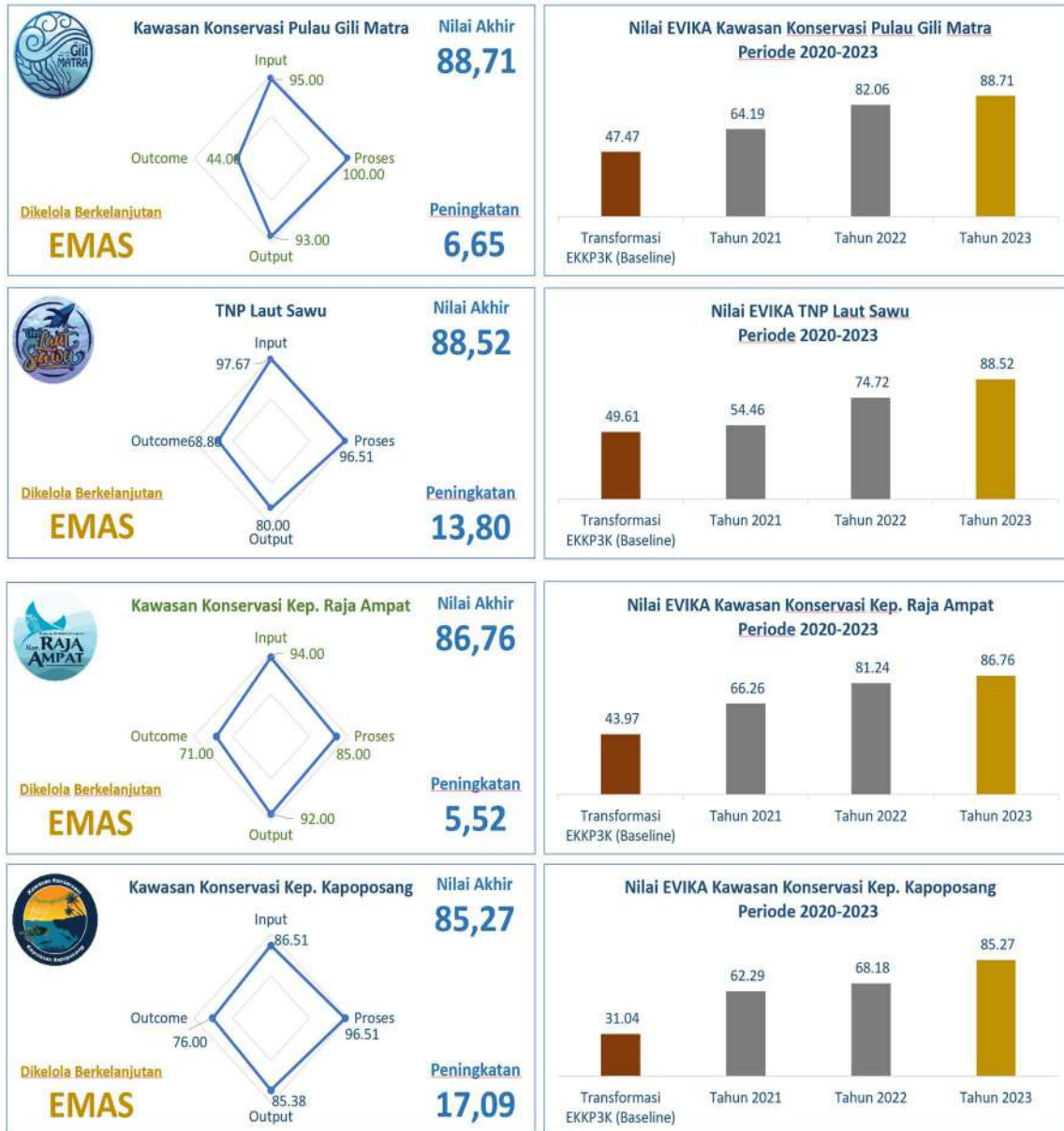


Tabel 9. Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023

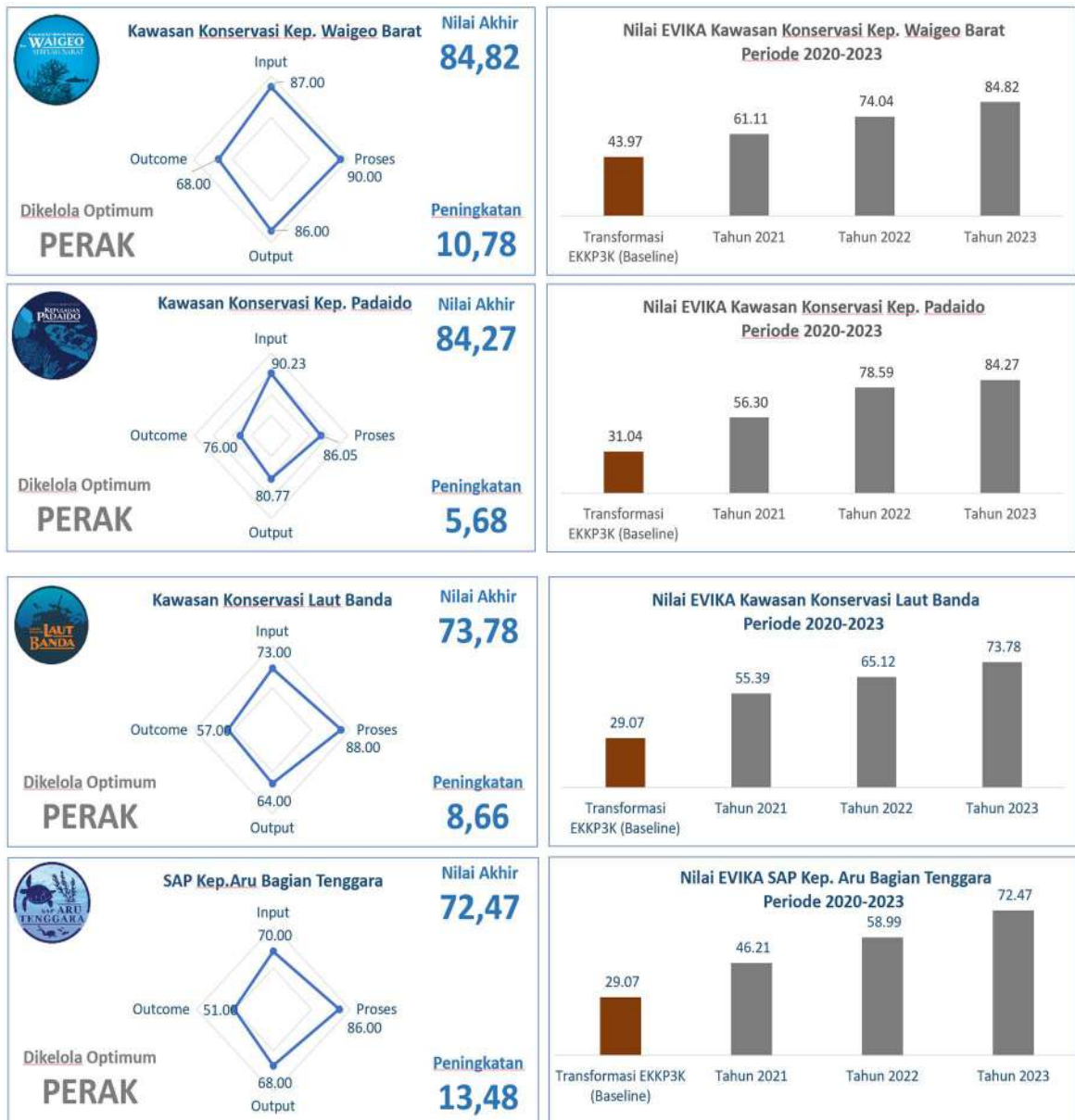
Kawasan Konservasi	Nilai 2022	Nilai 2023	Peningkatan
Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra	82.06	88.71	6.65
Taman Nasional Perairan Laut Sawu	74.72	88.52	13.8
Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	81.24	86.76	5.52
Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	68.18	85.27	17.09
Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat	74.04	84.82	10.78
Kawasan Konservasi Kep. Padaido	78.59	84.27	5.68
Kawasan Konservasi Laut Banda	65.12	73.78	8.66
Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara	58.99	72.47	13.48
JUMLAH	582.94	664.6	81.66
Rata-rata	72.87	83.08	10.21

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata tingkat efektivitas Kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang tahun 2023 adalah sebesar 83,08 dimana nilai rata-rata tahun sebelumnya adalah sebesar 72,87 sehingga terdapat peningkatan sebesar 10,21.

Hasil penilaian evaluasi efektivitas Kawasan konservasi tahun 2023 di wilayah kerja BKKPN Kupang terdapat 4 kawasan konservasi telah berstatus emas atau dikelola berkelanjutan yaitu Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang. Sedangkan 4 kawasan konservasi lainnya berstatus perak atau dikelola optimum yaitu Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido, Kawasan Konservasi Laut Banda dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara. Adapun hasil penilaian tiap kawasan konservasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Gambar 12. Kawasan Konservasi berstatus emas

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Gambar 13. Kawasan Konservasi berstatus Perak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Periode pengukuran capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2022 maupun tahun 2023 merupakan target

tahunan, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian pada periode yang sama maka capaian tahun 2023 lebih rendah 4,38 atau 30,02% dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 meningkat 10,21% dan tahun 2022 adalah 14,59%, akan tetapi nilai evaluasi efektivitas tahun 2023 lebih baik dari pada tahun 2022, perbandingan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 14. Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d 2023

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah 20% pada tahun 2024, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 20,12%, tahun 2022 sebesar 14,59%, dan tahun 2023 sebesar 10,21%, sehingga total peningkatan kumulatif sampai dengan tahun 2023 ini adalah sebesar 44,92% atau tercapai 224,6% dari target renstra sebesar 20%, perbandingan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 10. Peningkatan EVIKA BKKPN Kupang s.d 2023

Periode	Target Peningkatan (%)	Realisasi (%)
Tahun 2021	5	20.12
Tahun 2022	5	14.59
Tahun 2023	5	10.21
Tahun 2024	5	-
Jumlah	20	44.92

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Sumber daya manusia yang dimiliki BKKPN Kupang saat ini sebagian besar telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan meskipun dengan jumlah yang terbatas dan besarnya dukungan para mitra kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang guna mewujudkan pengelolaan kolaboratif dan adaptif yang berkelanjutan.

b. Analisis Kegagalan

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang tidak hanya tanggung jawab BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola, namun terdapat peran dan tanggungjawab para pemangku kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian efektivitas pengelolaan. Sesuai dengan pedoman penilaian EVIKA, BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola hanya bertanggungjawab terhadap kriteria proses, sedangkan kriteria input, output dan outcome merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya. Hasil penilaian terhadap kriteria input, output dan outcome akan sangat mempengaruhi hasil penilaian tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan tidak dapat dikontrol oleh BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola.

c. Solusi

Perlu dilakukan peningkatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang efektivitasnya meningkat.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan para mitra konservasi, dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan dan pelaksanaan kegiatan Sebagian besar dilakukan oleh pegawai yang telah ditempatkan di wilayah kerja.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 antara lain :

- 1) Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut



Gambar 15. Pengadaan Mooring buoy penanda zona inti dan tambat labuh di Gili Matra



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BJAK
Mengeksploitasi
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 16. Penyediaan Media Publikasi Kawasan Konservasi Gili Matra



Gambar 17. Penyediaan Kendaraan fungsional survei dan pelayanan



Gambar 18. Penyediaan Sarana Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

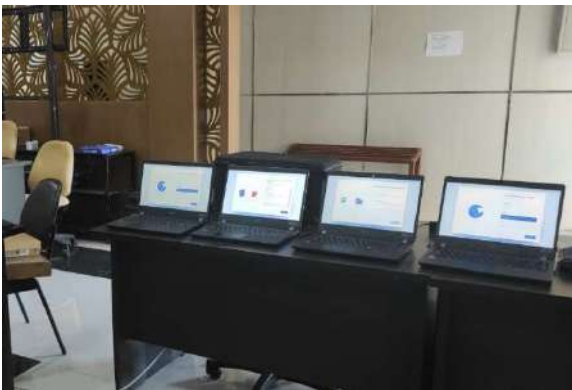
- 2) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 19. Pengadaan Alat Pendukung Pemantauan Kawasan Konservasi



Gambar 20. Pengadaan Perlengkapan Layanan Konservasi



Gambar 21. Pengadaan Peralatan Survei Kawasan Konservasi Perairan



Gambar 22. Pengadaan Sarana Survei Oceanografi Kawasan Konservasi Perairan

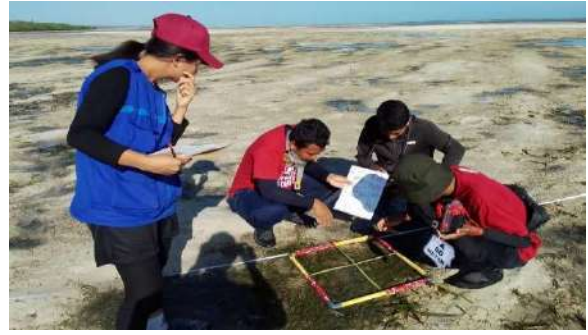


Gambar 23. Pengadaan Sarana Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

b. Data dan Informasi Kawasan Konservasi.



Gambar 24. Survei Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi



Gambar 25. Survei Ekosistem Padang Lamun di Kawasan Konservasi



Gambar 26. Survei Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Konservasi



Gambar 27. Survei Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi



Gambar 28. Pendataan Morfometrik dan TKG Ikan Kawasan Konservasi



Gambar 29. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi



Gambar 30. Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi



Gambar 31. Respon Cepat Penanganan Ancaman Sumberdaya Kawasan

c. Pemberdayaan Masyarakat



Gambar 32. Penjangkauan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi



Gambar 33. Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Konservasi

- 3) Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah



Gambar 34. Bimbingan Teknis Penyediaan Data Hasil Survei Biota Laut Dilindungi

- 4) Pengelola Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kompetensinya yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- Bimtek dan Sertifikasi Pelayanan Prima



Gambar 35. Bimtek dan Sertifikasi Pelayanan Prima



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 36. Penilaian EVIKA Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Pada tahun 2023 BKKPN Kupang telah menjadi pusat studi tiru dalam pengelolaan Kawasan konservasi, unit organisasi pengelola Kawasan konservasi daerah yang melakukan studi tiru diantaranya adalah DKP Prov. Papua, Cabang DKP Kab. Malang Prov. Jawa Timur, dan DKP Prov. Kalimantan Selatan.



Gambar 37. BKKPN Kupang Menjadi Pusat Studi Tiru



7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keekaragaman Hayati Laut (PNBP)	1.269.159.000	1.268.605.619	99,96	553.381
2.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional (RM)	9.300.000.000	9.186.422.795	98,78	113.577.205
3.	Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan (RM)	700.000.000	BLOKIR	-	700.000.000
4.	Keekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan (RM)	100.000.000	98.006.539	98,01	1.993.461
5.	Pengelola Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (RM)	350.000.000	349.814.707	99,95	185.293
JUMLAH		11.719.159.000	10.902.849.660	93,03	816.309.340

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 11.719.159.000,-, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 10.450.000.000,- dan PNBP sebesar Rp. 1.269.159.000,-, namun demikian terdapat blokir sebesar Rp. 700.000.000,-, Adapun realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp. 10.902.849.660,- atau 93,03% dari



dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 816.309.340,-.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah peningkatan nilai evaluasi efektivitas Kawasan konservasi pada periode selanjutnya.

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dan Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.3.1 IKU 3 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.



Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Jejaring Konservasi yang diinisiasi dan/atau disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. capaian indikator kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 3		Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 3		Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	1	1	100 (100)	-	1	100 (100)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 1 Dokumen dari target 1 Dokumen atau tercapai 100% (kinerjaku 100%) dari target sebagaimana



disampaikan oleh ketua tim kerja Kerjasama dan data informasi selaku penanggungjawab kegiatan melalui memorandum kepada Kepala BKKPN Kupang nomor tanggal 3 Januari 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023. Capaian sebagaimana dimaksud adalah Penyampaian Draft Dokumen Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Surat Kepala BKKPN Kupang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.4085/BKKPN/PRL.440/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

indikator kinerja utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga pada tahun 2023 ini tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian dengan periode yang sama pada tahun 2022.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum terdapat pada Renstra BKKPN Kupang 2020-2024 maupun reviunnya, sehingga capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional secara geografis berdekatan dengan kawasan konservasi lain yang memiliki karakteristik sama, sehingga peluang untuk dibentuk jejaring kawasan konservasi cukup besar. Jejaring kawasan juga



menguntungkan bagi pengelola kawasan konservasi termasuk BKKPN Kupang guna meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Ketidaktersediaan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembahasan secara keseluruhan dalam pembentukan jejaring dengan pengelola kawasan lainnya. Selain itu pembentukan jejaring kawasan juga melibatkan banyak pihak.

c. Solusi

Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengelola kawasan lain secara intensif dan dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pencapaian target indikator kinerja pembentukan jejaring Kawasan konservasi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akan terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dengan adanya jejaring kawasan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan informasi.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 ini, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 38. Pertemuan Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dengan Kawasan Konservasi Kepulauan Alor



Gambar 39. Pembahasan Jejaring Konservasi Provinsi NTT



Gambar 40. Finalisasi Dokumen Jejaring Konservasi di Prov. NTT



7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah inisiasi jejaring konservasi di provinsi Maluku.

3.3.2 IKU 4 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, capaian indikator kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 13. Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 3										
Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 4										
Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
3	3	3	1	3	300 (120)	-	1	300 (120)	10	100

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan yang telah diselesaikan pada triwulan II, namun demikian sampai dengan periode triwulan IV tahun 2023 ini telah tercapai 3 dokumen dari target 1 dokumen atau tercapai 300% (kinerjaku 120%) dari target, sebagaimana disampaikan oleh ketua tim kerja Kerjasama dan data informasi selaku penanggungjawab kegiatan melalui memorandum kepada Kepala BKKPN Kupang nomor 3 Januari 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023. Capaian dimaksud adalah penyampaian draft kesepakatan sebagai berikut :

- Kemitraan dengan Universitas Banda Naira sesuai dengan surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.1245/BKKPN/KS.320/IV/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Universitas Banda Naira;




Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

- Kemitraan dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) sesuai dengan surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.2453/BKKPN/HK.320/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Universitas Banda Naira dan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI);
- Kemitraan dengan Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI) sesuai dengan surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.2581/BKKPN/HK.320/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI).

Pada tahun 2023 ini, telah ditandatangani sebanyak 5 kesepakatan yaitu perjanjian kemitraan bersama Universitas Papua, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Banda Naira, Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), dan Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI), Adapun perihal kemitraan dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14. Pengesahan Kemitraan Tahun 2023

No	Mitra	Perihal Kesepakatan	Nomor dan Tanggal Dokumen	Masa Laku
1	 Universitas Papua	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Pendidikan, Kajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	B.794/BKKPN/ KS.320/II/2023 23 Februari 2023	3 Tahun



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE







BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

No	Mitra	Perihal Kesepakatan	Nomor dan Tanggal Dokumen	Masa Laku
2	 Universitas Jenderal Soedirman	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	B.793/BKKPN/ KS.320/II/2023 23 Februari 2023	3 Tahun
3	 Universitas Banda Naira	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Penjangkauan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan dan Penelitian Sumberdaya Alam di Kawasan Konservasi Laut Banda	B.2779/BKKP/ HK.320/VIII/ 2023 15 Agustus 2023	5 Tahun
4	 Yayasan Alam Indonesia Lestari	Pengumpulan dan Pengembangan Data dan Informasi Perikanan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Ekosistem di Kawasan Konservasi Laut Banda	B.2780/BKKPN /HK.320/VIII/ 2023 15 Agustus 2023	3 Tahun
5	 Yayasan Ekosistem Gili Indah	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	B.2749/BKKPN /HK.320/VIII/ 2023 11 Agustus 2023	3 Tahun

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Periode pengukuran capaian indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2022 maupun tahun 2023 merupakan target tahunan, apabila dibandingkan capaian tahun 2022 adalah sebanyak 3 dokumen dan capaian tahun 2023 adalah sebanyak 3 dokumen sehingga tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah 10 Kesepakatan. Capaian kumulatif sampai dengan tahun 2023 adalah 10 kesepakatan. Apabila dibandingkan capaian hingga tahun 2023 dengan target renstra, maka telah tercapai sebanyak 100%. Capaian kinerja kemitraan konservasi yang diinisiasi disajikan pada gambar berikut :



Gambar 41. Kemitraan Konservasi yang diinisiasi s.d 2023



4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Luasnya jangkauan Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional menarik minat beberapa universitas dan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama / kemitraan dengan BKKPN Kupang, yang mana memberikan peluang bagi peserta didik dalam menjalankan program merdeka belajar kampus merdeka, dan keinginan berperan serta dalam pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif baik dari perguruan tinggi, NGO, maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga indikator kinerja ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk bagi BKKPN Kupang dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan untuk pencapaian indikator kinerja mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembahasan secara keseluruhan dalam pembentukan kerjasama dengan calon-calon mitra yang berminat untuk bekerjasama. Sementara peluang dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi sangat besar.

c. Solusi

Melakukan komunikasi dengan calon mitra secara intensif dan peningkatan teknologi informasi yang dapat digunakan guna pencapaian target indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akan terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pengelolaan Kawasan konservasi dengan adanya perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia,



teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan informasi, serta publikasi ilmiah.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 antara lain yang telah dilaksanakan adalah:

1. Inisiasi Kemitraan Konservasi (telah dilakukan identifikasi potensi dan ruang lingkup kerjasama kemitraan dengan calon mitra) yaitu :
 - Yayasan Gili Matra Bersama (pembahasan draft perjanjian pada tanggal 4 Januari 2023)
 - Universitas Banda Naira (pembahasan draft perjanjian pada tanggal 31 Maret 2023 dan penyampaian draft perjanjian pada tanggal 3 April 2023)
 - Yayasan Ekosistem Gili Indah (pembahasan draft perjanjian pada tanggal 30 Mei 2023, Penyampaian draft 31 Juli 2023)
 - Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (penjajakan awal kemitraan pada tanggal 12 Juni 2023)
 - Yayasan Alam Indonesia Lestari (pembahasan draft perjanjian pada tanggal 27 Juni 2023, Penyampaian Draft 14 Juli 2023)
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kemitraan
 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua (tanggal 23 Februari 2023)
 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Soedirman (tanggal 23 Februari 2023)
 - Yayasan Ekosistem Gili Indah (11 Agustus 2023)
 - Universitas Banda Naira (15 Agustus 2023)
 - Yayasan Alam Indonesia Lestari (15 Agustus 2023)
3. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kemitraan

- Mars Symbioscience (pembahasan rencana kerja tahunan pada tanggal 12 Januari 2023)
- Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro (pembahasan RKT pada tanggal 19 Januari 2023, monitoring dan evaluasi 26-27 September 2023)
- Fakultas Pertanian, Universitas Mataram (pembahasan RKT pada tanggal 24 Januari 2023 dan Monev RKT pada tanggal 28-29 Maret 2023)
- Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada (pembahasan RKT pada tanggal 26 Januari 2023, monitoring dan evaluasi 29 September 2023, 31 Oktober 2023)
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman (Monitoring dan Evaluasi 31 Oktober 2023)



Gambar 42. Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dan Fakultas Pertanian UNRAM



Gambar 43. Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perjanjian Kemitraan Undip dan UGM



BKKPN KUPANG



LEBA BAE

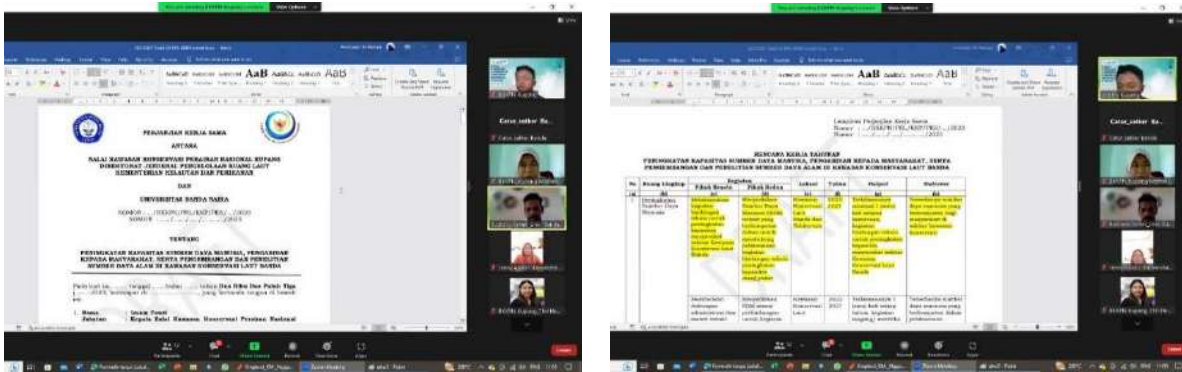


BJAK Mengeloid LAUT

#2023 HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 44. Pembahasan Rencana Kerjasama antara BKKPN Kupang dengan Universitas Banda Naira



Gambar 45. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kemitraan Tahun 2023

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 15. Realisasi Anggaran Kemitraan Konservasi Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (RM)	100.000.000	96.721.196	96,72	3.278.804
TOTAL		100.000.000	96.721.196	96,72	3.278.804

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.721.196,- atau 96,72% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 3.278.804,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kemitraan konservasi yang telah disepakati dan menambah inisiasi kemitraan konservasi dengan calon mitra yang berpotensi dalam pengelolaan Kawasan konservasi.

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Bantuan



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.4.1 IKU 5 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah;

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2023, capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 16. Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

SK 4		Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 5		Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
3	3	3	2	3	150 (120)	-	2	150 (120)	14	71,43

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran target indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target triwulanan, sampai dengan periode triwulan IV tahun 2023 ini telah diserahkan terimakan kepada 3 kelompok dari target 2 Kelompok atau tercapai 150% (kinerjaku120%) dari target, penerima bantuan kompak tahun 2023 yaitu :

- Kelompok Meno Lestari, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara, NTB, senilai Rp. 59.998.053,- sesuai dengan BAST nomor B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- Yayasan Koppesda, Desa Mondu, Kanatang, Sumba Timur, NTT, senilai Rp. 54.757.400,- sesuai dengan BAST nomor B.2226/BKKPN/PRL.440/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- Yayasan Cahaya Samudera Indonesia, Desa Kampung Baru, Banda, Maluku Tengah, Maluku senilai Rp.69.995.601,- sesuai



dengan BAST nomor B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja utama Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebanyak 3 kelompok dan triwulan IV tahun 2023 adalah 3 kelompok, sehingga apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian dengan periode yang sama, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah 14 Kelompok. Capaian kinerja sampai dengan tahun triwulan IV tahun 2023 terakumulasi sebanyak 10 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok capaian pada tahun 2020, 2 kelompok capaian pada tahun 2021, 3 kelompok capaian pada tahun 2022, dan 3 kelompok capaian pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang, maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini adalah 71,43%. Adapun capaian Bantuan KOMPAK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel dan gambar berikut :



Tabel 17. Bantuan KOMPAK Tahun 2020 - Tahun 2023

No	Nama Penerima (Lokasi)	Tahun	Nilai	No.BAST / Tanggal
1	Kelompok Nelayan Konservasi Mira Djagga (Kab. Sabu Raijua, NTT)	2020	99.519.222	BAST.1056/BKKPN/VII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
2	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah Maluku)	2020	99.804.350	BAST.1491/BKKPN/XI/2020 Tanggal 30 November 2020
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gili Matra (Kab. Lombok Utara, NTB)	2021	134.442.000	BAST.786/BKKPN/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021
4	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Cinta Bahari (Kab. Pangkep, Sulsel)	2021	109.632.000	BAST.1188/BKKPN/IX/2021 Tanggal 18 September 2021
5	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Pulau Meosmanggauandi (Kab. Biak Numfor, Papua)	2022	59.771.613	B.1924/BKKPN/PRL.440/VI / 2022 Tanggal 24 Juni 2022
6	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Duwefganan (Kab. Raja Ampat, Papua Barat)	2022	39.965.550	B.3340/BKKPN/PRL.440/VI II/ 2022 Tanggal 28 Agustus 2022
7	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bangko Bersatu (Kab. Manggarai Barat, NTT)	2022	99.866.700	B.3578/BKKPN/PRL.440/IX / 2022 Tanggal 20 September 2022
8	Kelompok Meno Lestari (Kab. Lombok Utara, NTB)	2023	59.998.053	B.2165/BKKPN/PRL.440/VI / 2023 Tanggal 21 Juni 2023
9	Yayasan Koppesda (Kab. Sumba Timur, NTT)	2023	54.757.400	B.2226/BKKPN/PRL.440/VI / 2023 Tanggal 26 Juni 2023
10	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia	2023	69.995.601	B.2781/BKKPN/PRL.440/VI II/2023 Tanggal 15 Agustus 2023



Gambar 46. Penyerahan Bantuan Kompak Periode 2020-2023

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu Identifikasi kelompok calon penerima bantuan konservasi, pemenuhan dokumen administrasi dan proposal yang diusulkan kepada BKKPN Kupang, Verifikasi dokumen proposal dan lapangan, penetapan penerima bantuan, pengadaan bantuan dan serah terima bantuan.

b. Analisis Kegagalan

Kurangnya kelengkapan administrasi kelompok dan kelemahan kelompok dalam penyusunan proposal pengajuan bantuan kompak, barang bantuan yang diusulkan merupakan produk luar negeri, lamanya durasi pengiriman dan ijin usaha calon penyedia yang kurang sesuai.

c. Solusi



Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah dengan melakukan pendampingan kepada kelompok dalam hal pemenuhan kelengkapan administrasi, meminta rekomendasi tim P3DN KKP untuk melakukan pengadaan produk luar negeri, memantau pengiriman barang bantuan, dan memperbarui ijin usaha calon penyedia. Pada tahun 2023 ini solusi tersebut telah dilaksanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait biaya yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi lapang, karena dilakukan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, dan realisasi capaian pada tahun 2023 ini telah melebihi target yang ditentukan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung pada tahun 2023 yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah seleksi proposal, evaluasi administrasi dan verifikasi lapang terhadap calon penerima bantuan Kompak, penetapan penerima bantuan, pengadaan barang bantuan, dan serah terima bantuan KOMPAK kepada 3 kelompok dari 3 kelompok yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, termasuk telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan barang bantuan. Daftar kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Daftar Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK tahun 2023

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan
1	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia	Desa Kampung Baru, Banda, Maluku Tengah, Maluku	Longboat dan Mesin Tempel
2	Pokmas Meno Lestari	Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara, NTB	Peralatan Selam
3	Yayasan Koppesda	Desa Mondu, Kanatang, Sumba Timur, NTT	Bak Sampah dan Motor Roda 3



Gambar 47. Serah Terima bantuan Kompak Kelompok Meno Lestari, NTB



Gambar 48. Serah Terima bantuan Kompak Yayasan Koppesda, NTT



Gambar 49. Serah Terima bantuan Kompak Yayasan Cahaya Samudera Indonesia, Maluku

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Bantuan KOMPAK Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pemberian Bantuan Kompak (RM)	185.000.000	184.751.054	99,87	248.946
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak (RM)	134.900.000	121.251.768	89,88	13.648.232
	TOTAL	319.900.000	306.002.822	95,66	13.648.232

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 319.900.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 306.002.822,- atau 95,66% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 13.648.232,-



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan identifikasi dan seleksi kelompok calon penerima bantuan KOMPAK tahun 2024.

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai PNBP BKKPN Kupang.

3.5.1 IKU 6 Nilai PNBP BKKPN Kupang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan. PNBP BKKPN Kupang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menjumlahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang. Capaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 20. Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 5		Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang								
IKU 6		Nilai PNBPN BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
1.354.608.750	1.354.608.750	-	1.725.000.000	2.369.683.750	137,37 (120)	1.015.075.000 (74,93)	1.725.000.000	137,37 (120)	643.120.000	579,10

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran target indikator kinerja Nilai PNBPN BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian perolehan PNBPN tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 2.369.683.750,- dari target Rp. 1.725.000.000,- atau tercapai 137,37% (kinerjaku 120%) dari target, sebagaimana memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN nomor 107/DJPRL.1/TU.220/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian PNBPN Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2023.

Berdasarkan data dari Aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan perolehan PNBPN BKKPN Kupang sampai dengan triwulan IV tahun 2023 disajikan pada tabel berikut berikut :

Tabel 21. Perolehan PNBPN Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Januari	158.535.000
2	Februari	151.258.750
3	Maret	178.473.750
4	April	135.632.500
5	Mei	200.607.500
6	Juni	145.570.000
7	Juli	205.485.000
8	Agustus	276.805.000
9	September	181.767.500
10	Oktober	253.207.500
11	November	244.583.750
12	Desember	237.757.500
Jumlah		2.369.683.750



Gambar 50. Perolehan PNBPN Tahun 2023

PNBPN yang diperoleh BKKPN Kupang pada tahun 2023 ini berasal dari penerbitan izin aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi yaitu tanda masuk kegiatan pendidikan, tanda masuk kegiatan penelitian, dan karcis

masuk kegiatan pariwisata alam perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang. Data penerbitan izin disajikan pada gambar berikut :



Gambar 51. Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

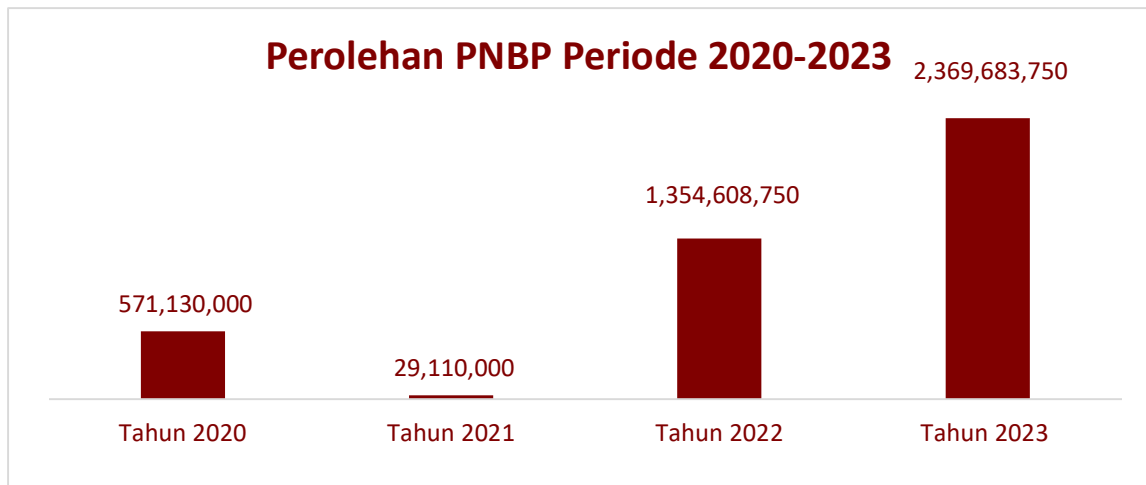
Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai PNBK BKKPN Kupang pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan target tahunan, capaian tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.354.608.750,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.369.683.750,-, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama maka capaian tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.015.075.000,- atau 74,93%. Peningkatan capaian PNBK tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan penerbitan ijin karcis masuk dan tanda masuk Kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

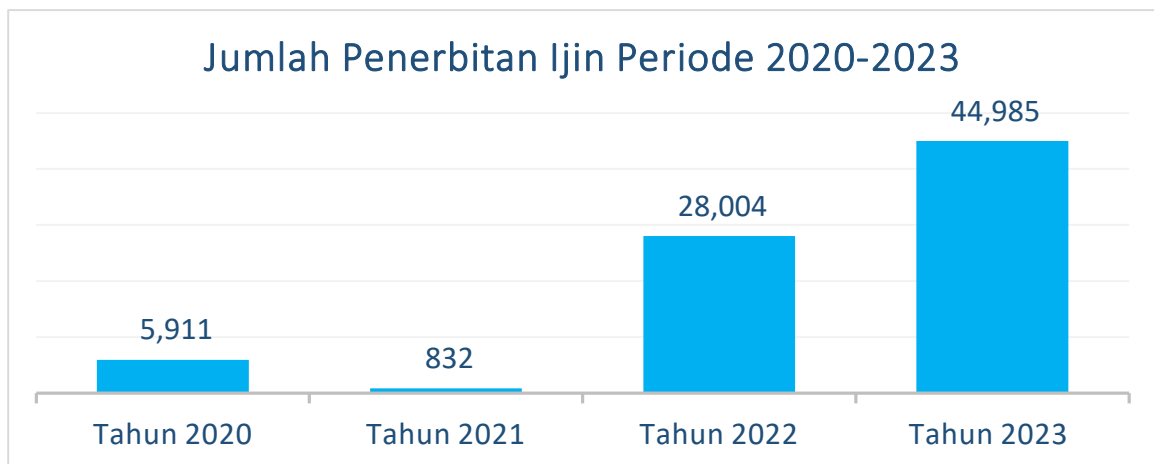
Target indikator kinerja Nilai PNBK BKKPN Kupang tidak terdapat pada Renstra BKKPN Kupang 2020-2024. Namun berdasarkan dokumen reuiu



renstra BKKPN Kupang periode revidi tahun 2022 target nilai PNBP BKKPN Kupang sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 643.120.000,- sedangkan Capaian sampai dengan tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 3.724.292.500,- (kumulatif 2022 dan 2023) atau telah tercapai 579,10% dari target renstra. Adapun perolehan PNBP BKKPN Kupang dan penerbitan izin pemanfaatan Kawasan konservasi dari tahun 2020-2023 disajikan pada gambar berikut :



Gambar 52. Perolehan PNBP BKKPN Kupang Periode Tahun 2020-2023



Gambar 53. Jumlah Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Periode 2020-2023



4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BKKPN Kupang untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, upaya yang telah dilakukan adalah menerapkan pelayanan berbasis elektronik, membuka gerai pelayanan dan menyediakan SDM tenaga pelayanan di kawasan konservasi untuk membantu atau memfasilitasi pengunjung dalam melakukan permohonan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Kesadaran pengunjung dalam melakukan pembayaran PNBPN atas pemanfaatan kawasan konservasi masih kurang, dan beberapa pengunjung kawasan masih belum mengetahui terkait adanya izin pemanfaatan didalam kawasan konservasi.

c. Solusi

Telah dilaksanakan pemantauan rutin monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi sebagai fungsi kontrol upaya penegakan aturan izin pemanfaatan kawasan dan juga dilaksanakan sosialisasi terkait izin pemanfaatan kawasan kepada pengunjung serta stakeholder terkait.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya terkait biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menerbitkan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi, karena dilakukan secara online melalui aplikasi Seapark.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Penerbitan perizinan melalui aplikasi seapark yang dibangun oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dapat diakses melalui tautan <http://seapark.kkp.go.id/> , dimana aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi e-pelayanan yang dibangun oleh BKKPN Kupang pada tahun 2019.
- Implementasi inovasi gerai pelayanan
- Implementasi inovasi Data Layanan PNBP Online untuk mengukur perolehan PNBP pada setiap periode pelaporan dan penerbitan perijinan yang dikenai tarif PNBP.
- Kajian daya dukung di Kawasan konservasi Gili Matra.
- Sosialisasi Aturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
- Pendampingan dan koordinasi pelayanan pemanfaatan Kawasan konservasi.



Gambar 54. Dashboard Aplikasi Seapark



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

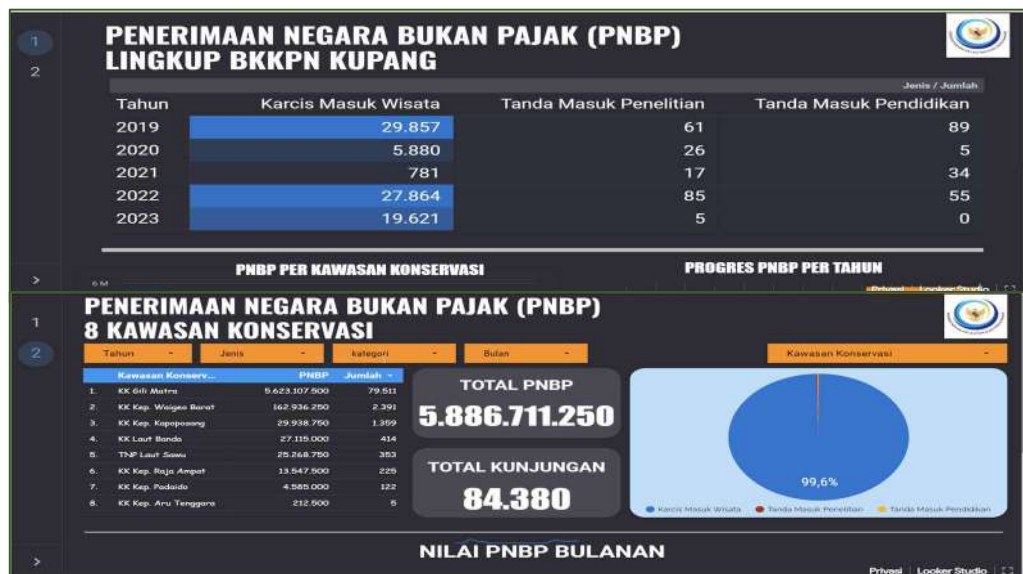
#2023
HMP THRIVE

KKP
24
UNTUK
INDONESIA MAJU

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 55. Gerai Pelayanan di Kawasan Konservasi Gili Matra



Gambar 56. Inovasi Data Layanan PNBP Online



Gambar 57. Kajian Daya Dukung Kawasan Konservasi di Gili Matra



Gambar 58. FGD dan Sosialisasi Aturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 59. Sosialisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi



Gambar 60. Pendampingan dan Koordinasi Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi



7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22. Realisasi Anggaran Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi (RM)	202.940.000	202.620.091	99,84	319.909
2.	Kajian Daya Dukung di Kawasan Konservasi Gili Matra (PNBP)	99.989.000	99.983.250	99,99	95.750
3.	Sosialisasi Aturan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (PNBP)	65.618.000	64.855.000	98,84	763.000
4.	Sosialisasi Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	149.784.000	142.228.223	94,96	7.555.777
5.	Pendampingan dan Koordinasi Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (PNBP)	153.060.000	141.401.079	92,38	11.658.921
TOTAL		671.391.000	650.997.643	96,96	20.393.357

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 671.391.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 202.940.000,- dan bersumber dari PNBP sebesar Rp. 468.451.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 650.997.643,- atau 96,96% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 20.393.357,-



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi.

3.6 Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks), Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%).

3.6.1 IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi



pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot nilai sebagaimana table berikut :

Tabel 23. indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai

No	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bobot Nilai (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (Halaman III DIPA)	10
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi Penyampaian SPM	5
8	Capaian Output	25
Jumlah		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Capaian Indikator Kinerja Manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 24. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023

SK 6										
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM 7										
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang										
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
95,95	95,95	-	93,75	99,42	106,05 (106,05)	3,47 (3,62)	93,75	106,05 (106,05)	90	110,46

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian target indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang merupakan target semesteran, pada semester II tahun 2023 ini capaian IKPA BKKPN Kupang adalah sebesar 99,42 dari target 93,75 atau tercapai 106,05% (kinerjaku 106,05) dari target, sebagaimana data dari aplikasi Om SPAN modul Monev PA dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 100/SJ.2/RC.210/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal capaian indikator kinerja utama (IKU) indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) triwulan IV tahun 2023. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2023 BKKPN Kupang disajikan pada tabel dan gambar berikut:



Tabel 25. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BKKPN Triwulan IV Tahun 2023

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10	10
		Deviasi Hal.III DIPA	10	10
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20	19,72
		Belanja Kontraktual	10	9,70
		Penyelesaian Tagihan	10	10
		Pengelolaan UP dan TUP	10	10
		Dispensasi SPM	5	5
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25	25
Nilai Akhir			100	99,42

The screenshot shows the MONEVPA application interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the MONEVPA logo, a search bar, and a user profile for 'BALAI KAWASAN K... T.A. 2023'. Below the navigation bar, the main heading is 'Indikator Pelaksanaan Anggaran'. There are icons for 'EXCEL', 'PDF', and 'FILTER'. A filter is applied: 'SAMPAI DENGAN | DESEMBER'. Below the filter, there is a search bar 'CARI DI HALAMAN...'. The main content is a table with the following columns: NO, KODE KPPN, KODE BA, KODE SATKER, URAIAN SATKER, KETERANGAN, KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN (REVISI DIPA, DEVIASI HALAMAN III DIPA), KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (PENYERAPAN ANGGARAN, BELANJA KONTRAKTUAL, PENYELESAIAN TAGIHAN, PENGELOLAAN UP DAN TUP, DISPENSASI SPM), KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN (CAPAIAN OUTPUT), NILAI TOTAL, KONVERSI BOBOT, and NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT). The table data is as follows:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN					KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT					
1	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	98.61	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.42	100%	99.42		
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25					
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.72	9.70	10.00	10.00	5.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00					99.12							100.00

Gambar 61. Capaian Nilai IKPA Triwulan IV Tahun 2023 pada Aplikasi OM-SPAN



2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 95,95 dan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 99,42 sehingga apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran yang sama, maka terdapat kenaikan sebesar 3,47 atau 3,62%. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kinerja anggaran pada BKKPN Kupang.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 90. Capaian kinerja triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 99,42, sehingga apabila dibandingkan maka telah tercapai sebesar 110,46%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang menjadi penilaian secara tepat waktu sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Penggunaan inovasi plakat lingkup BKKPN Kupang juga sangat berkontribusi besar dalam pencapaian target kinerja ini.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja dapat terjadi bila deviasi halaman III DIPA tidak dilakukan update, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan penyampaian data kontrak, dan konfirmasi capaian output tidak tepat waktu.



c. Solusi

Telah dilakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja, khususnya pada kriteria deviasi halaman III DIPA terkait dengan rencana penyerapan dana dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten dibidangnya dalam pencapaian target kinerja, dan terdapat efisiensi biaya karena telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi OM SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah :

- telah dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA.
- telah dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran melalui pengelolaan UP dan TUP dan telah dilakukan penginputan data capaian rincian output secara berkala.
- Pemanfaatan inovasi PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi) BKKPN Kupang



Gambar 62. Inovasi Plakat

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 26. Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Umum (RM)	112.998.000	111.017.477	98,25	1.980.523
2.	Layanan Perkantoran (RM)	11.722.738.000	11.550.080.789	98,53	172.657.211
TOTAL		11.835.736.000	11.661.098.266	98,52	174.637.734

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 11.835.736.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.661.098.266,- atau 98,52% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 174.637.734,-



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah penyusunan rencana aksi pelaksanaan kegiatan melalui penajaman rencana penarikan dana (Deviasi Halaman III DIPA) dan pemantauan berkala terhadap capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui aplikasi OM SPAN modul Monev PA.

3.6.2 IKM 8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;



- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi SMART. Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 27. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 8		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
93,29	93,29	-	82	94,48	115,21 (115,21)	1,19 (1,28)	82	115,21 (115,21)	83	113,83

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, pada tahun 2023 ini capaian Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 94,48 dari target 82 atau tercapai 115,21% (kinerjaku 115,21%) dari target, sebagaimana data dari aplikasi SMART DJA dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal capaian indikator kinerja utama (IKU) nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) triwulan IV tahun 2023.



Adapun capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 BKKPN Kupang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 63. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi SMART

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2022 adalah sebesar 93,29 dan tahun 2023 adalah sebesar 94,48 yang merupakan target tahunan, apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran saat ini, maka terdapat peningkatan sebesar 1,19 atau 1,28%. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kinerja anggaran pada BKKPN Kupang.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 adalah sebesar 90. sedangkan berdasarkan reviu Renstra terhadap indikator kinerja utama target nilai



indikator kinerja ini adalah 83 pada tahun 2024, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan formula perhitungan indikator kinerja nilai kinerja anggaran yang diterapkan pada aplikasi SMART pada tahun 2022.

Capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang, maka tercapai 113,83%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

b. Analisis Kegagalan

Ketidak tepatan waktu dalam penginputan data capaian output pada aplikasi SAKTI, ketidakkonsistenan dalam penyerapan anggaransesuai rencana dapat mempengaruhi nilai indikator kinerja.

c. Solusi

Melakukan monitoring secara rutin terhadap pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dengan menugaskan pegawai yang berkompeten dan telah mengikuti diklat/bimtek pelaporan kinerja berbasis online, terdapat pula efisiensi biaya, karena tidak terdapat alokasi anggaran khusus dan telah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi SMART-DJA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI.



6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian NKA sesuai dengan ketentuan. Pada periode tahun 2023 tidak lagi diperlukan operator, penginputan data dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi SMART DJA.

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah penyusunan target capaian dan dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui aplikasi SMART DJA, sehingga capaian nilai kinerja anggaran tahun berikutnya dapat dicapai secara maksimal.

3.6.3 IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang.

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Standar penilaian antara lain: Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40, Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit, Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen “persentase TLHP” minimal 5,0, dan Memiliki nilai komponen hasil



“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 28. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang Triwulan IV Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
93,03	93,03	-	75	93,03	124,04 (120)	-	75	124,04 (120)	76	124,04

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, pada tahun 2023 ini BKKPN Kupang tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka berdasarkan dokumen manual IKU tahun 2023 jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian tahun sebelumnya, dimana capaian BKKPN Kupang pada tahun 2022



adalah sebesar 93,03 dari target sebesar 75 atau tercapai 124,04% (kinerjaku 120%) dari target, sesuai dengan memorandum Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan nomor 02/DJPKRL.1.4/TU.210/I/2023 tanggal 4 Januari 2024 perihal capaian indikator kinerja program unit kerja berpredikat menuju WBK.

BKKPN Kupang telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK pada tahun 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui KepmenPANRB Nomor 1034 tahun 2022.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada tahun 2022 adalah sebesar 93,03 dan capaian pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian dan menggunakan capaian pada tahun sebelumnya, sehingga apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran saat ini, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian kinerja triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 93,03, sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra, maka tercapa 124,04% dari target.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan unit kerja yang bebas dari korupsi.



b. Analisis Kegagalan

Terdapat kendala bahwa adanya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sudah terpusat, sehingga tidak terdapat inovasi oleh unit kerja.

c. Solusi

Melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sudah ada dan terpusat, namun bila diperlukan dapat mengusulkan perbaikan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran karena semua kegiatan pendukung dilakukan oleh seluruh pegawai dan tidak terdapat alokasi anggaran khusus dalam pencapaian nilai WBK.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah

- pembentukan kelompok kerja pembangunan zona integritas yang melibatkan seluruh pegawai.
- pelaksanaan pelaporan harta kekayaan para pegawai melalui LHKPN maupun LHKASN
- penyelenggaraan implementasi SAKIP
- pemenuhan dokumen dan reform, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil dalam pembangunan zona integritas yang dilakukan pemantauan secara berkala.

Dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, BKKPN Kupang telah menjadi contoh atau pusat

studi tiru untuk unit kerja lain yaitu Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan XIV Kupang pada tanggal 9 Mei 2023.



Gambar 64. Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Lain

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada tahun 2023 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pemantauan berkala terhadap Pemenuhan dokumen dan reform, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil dalam pembangunan zona integritas, mengimplementasikan dan/atau mengembangkan berbagai inovasi yang telah ditetapkan guna mewujudkan unit kerja pemerintahan yang bersih dan melayani.



3.6.4 IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan formula sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja; dan Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) nilai kualifikasi 25;
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) nilai kualifikasi 20;
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) nilai kualifikasi 15;
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda) nilai kualifikasi 10;
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat nilai kualifikasi 5; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA nilai kualifikasi 1.
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat



Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja,
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).
6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
 - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data Riwayat kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi e-Pegawai.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain: 91-100 Sangat Profesional / Sangat Tinggi, 81-90 Cenderung Profesional / Tinggi, 71-80 Rentan Tidak Profesional / Sedang, 61-70 Cenderung Tidak Profesional / Rendah, dan 60 kebawah Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 29. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 10		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
84,45	84,45	-	84	91,53	108,96 (108,96)	7,08 (8,38)	84	108,96 (108,96)	84	108,96

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial

Pengukuran target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang merupakan target semesteran, capaian pada tahun 2023 ini adalah sebesar 91,53 dari target sebesar 84 atau tercapai 108,96% (kinerjaku 108,96%) dari target, sebagaimana Surat Sesditjen PKRL Nomor B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal capaian indikator kinerja utama indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) semester II tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal PKRL. Capaian indek profesionalitas ASN sebagaimana disajikan pada gambar berikut :



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	83	21.71	88.84 %	37.54	93.85 %	24.7	82.33 %	5	100 %	88.95	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	65	22.03	88.12 %	33.69	84.22 %	26	88.67 %	5	100 %	86.72	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	61	22.1	88.4 %	36.15	90.38 %	25.41	84.7 %	5	100 %	88.66	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	61	21.77	87.08 %	37.31	93.28 %	25.9	86.33 %	5	100 %	89.99	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	60	21.88	87.52 %	39.03	97.58 %	25	83.33 %	5	100 %	90.91	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	20.72	82.88 %	40	100 %	25.1	83.67 %	5	100 %	90.82	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	20.84	83.36 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.84	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	45	21.07	84.28 %	39.8	99.5 %	25	83.33 %	5	100 %	90.87	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20.83	83.32 %	39.59	98.98 %	25	83.33 %	5	100 %	90.43	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	20.67	82.68 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	5	100 %	89.17	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	20.75	83 %	40	100 %	25.78	85.93 %	5	100 %	91.53	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21.13	84.52 %	39.62	99.05 %	24.36	81.2 %	5	100 %	90.1	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	49	20.84	83.36 %	40	100 %	24.49	81.63 %	5	100 %	90.33	TINGGI

Gambar 65. Capaian IP ASN Tahun 2023 pada Aplikasi IP ASN KKP

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang tahun 2022 adalah sebesar 84,45 dan tahun 2023 adalah sebesar 91,53, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka terdapat peningkatan sebesar 7,08 atau 8,38%. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan nilai pada dimensi kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 76. Sedangkan target 2024 berdasarkan reviu Renstra adalah sebesar 84. Capaian indikator kinerja tahun 2023 adalah sebesar 91,53, sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra maka telah tercapai sebesar 108,96%.



4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kesadaran dan keaktifan pegawai dalam pemenuhan kompetensi baik diklat fungsional, diklat 20 Jam Pelatihan (JP) dan seminar.
- Komitmen seluruh pegawai dalam penyelesaian sasaran kinerja pegawai
- Peningkatan capaian kinerja pegawai.
- Peningkatan kedisiplinan kehadiran.

b. Analisis Kegagalan

Kendala dalam pemenuhan Nilai IP ASN adalah keterbatasan kesempatan pegawai dalam pemenuhan diklat 20JP, namun telah difasilitasi oleh unit kerja sehingga kendala tersebut dapat diselesaikan. dan belum terbitnya keputusan mengenai pencantuman gelar bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar.

c. Solusi

Telah diusulkan pencantuman gelar bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan Indeks profesionalitas serta keikutsertaan para pegawai dalam pemenuhan diklat 20 JP dan seminar yang dilakukan secara daring.

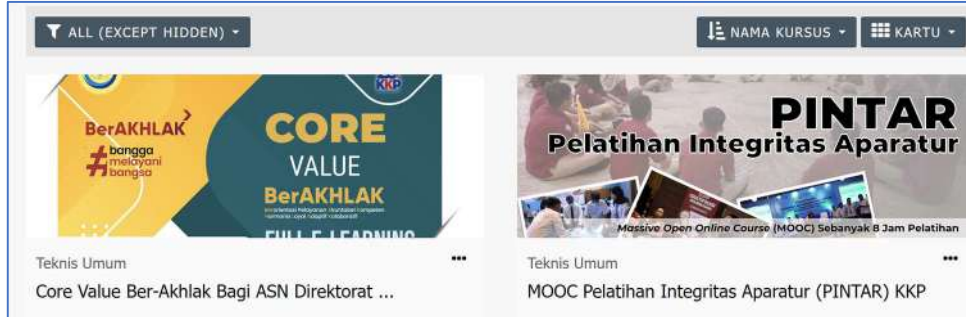
6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah

- Pejabat struktural mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas.
- para pegawai telah mengikuti seminar dan diklat 20 JP.
- peningkatan kinerja individu pegawai dengan pembagian peran hasil.
- pemantauan atas kedisiplinan pegawai.



Gambar 66. Pejabat Struktural mengikuti PKA dan PKP



Gambar 67. Diklat 20 JP secara daring melalui e-Milea KKP

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Manajemen SDM (RM)	268.000.000	267.719.687	99,90	280,313
	TOTAL	268.000.000	267.719.687	99,90	280,313



Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 268.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.719.687,- atau 99,90% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 280.313,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pemantauan berkala terhadap Pelaksanaan updating data kepegawaian dalam upaya peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN lingkup BKKPN Kupang oleh masing-masing pegawai.

3.6.5 IKM 11 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang

Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL, dimana kategori dan predikat penilaian PM SAKIP adalah sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 31. Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah



Predikat	Nilai	Interpretasi
		terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 32. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 11		Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
-	-	-	75	88,20	117,60 (117,60)	-	75	117,60 (117,60)	-	-

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian tahun 2023 adalah sebesar 88,20 dari target sebesar 75 atau tercapai 117,60% (kinerjaku 117,60%) dari target, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Penilaian mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 Lingkup DJPKRL.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan indikator kinerja manajerial ini merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2023 ini.



3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang belum terdapat pada dokumen Renstra maupun dokumen rewiu Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023, sehingga capaian pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah penyiapan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, serta melaksanakan evaluasi kinerja internal yang disertai dengan dokumen pendukungnya.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja yaitu apabila : tidak menyiapkan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, serta tidak melaksanakan evaluasi kinerja internal beserta dokumen bukti pendukungnya.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan dan menatausahakan dokumen-dokumen bukti pendukung penilaian SAKIP.

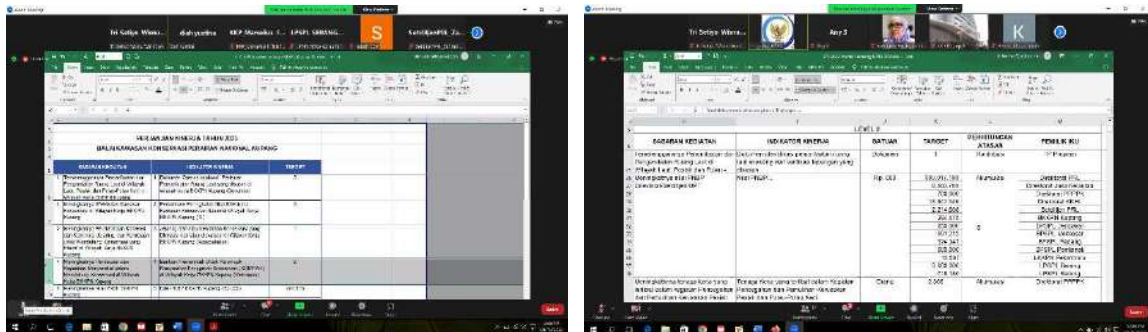
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan dibidang pengelolaan kinerja.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah :

- penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti : Perjanjian kinerja, rencana aksi, rincian target, rencana kerja.
- penyusunan dokumen pengukuran kinerja yaitu manual IKU
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara rutin dan penyusunan evaluasi rencana aksi.
- Pelaksanaan bimbingan maupun pelatihan dibidang pengelolaan kinerja
- pelaksanaan pengelolaan kinerja melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku)
- Penerapan inovasi MonSTERA (Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi)



Gambar 68. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2023



Gambar 69. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE

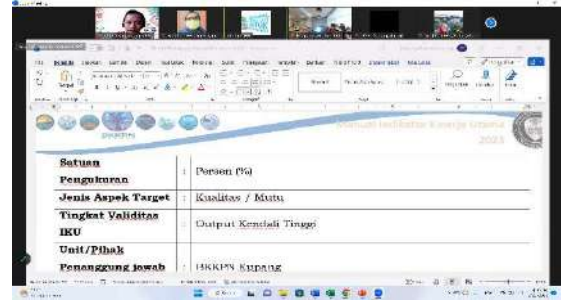


BIJAK
MANGKALAU
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 70. Pembahasan dokumen Manual IKU 2023



Gambar 71. Bimtek Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja



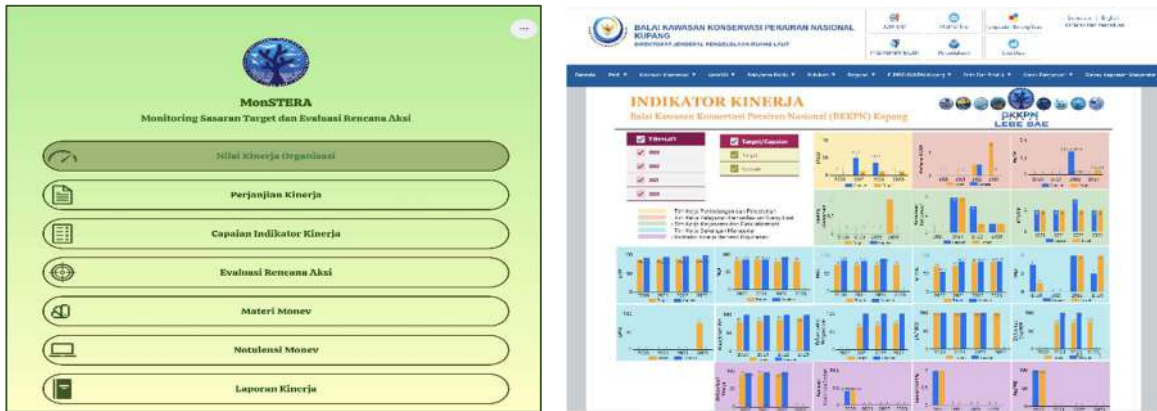
Gambar 72. Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal



Gambar 73. Bimtek dan Evaluasi AKIP



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 74. Penerapan Inovasi MonSTERA

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33. Realisasi Anggaran Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	179.000.000	177.917.830	99,40	1.082.170
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	163.090.000	141.782.669	86,94	21.307.331
TOTAL		342.090.000	319.700.499	93,46	22.389.501

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 342.090.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 319.700.499,- atau 93,46% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 22.389.501,-



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada selanjutnya adalah Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala.

3.6.6 IKM 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang

Penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I. Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 34. Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 12		Laporan SPIP yang disusun Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
4	4	3	4	4	100 (100)	-	4	100 (100)	12	66,67

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran capaian indikator kinerja manajerial Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang merupakan target triwulan, Capaian indikator kinerja ini pada triwulan IV tahun 2023 ini adalah sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen atau tercapai 100% (kinerjaku 100%) dari target.

Adapun Laporan SPIP yang disusun oleh BKKPN Kupang, telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah sebanyak 3 dokumen yaitu sesuai dengan :

- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.180/BKKPN/HP.420/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Laporan SPIP Triwulan IV BKKPN Kupang.
- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.1351/BKKPN/TU.140/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Laporan SPIP Triwulan I BKKPN Kupang.



- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.2409/BKKPN/TU.140/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Laporan SPIP Triwulan II BKKPN Kupang.
- Surat Kepala BKKPN Kupang nomor B.3506/BKKPN/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Laporan SPIP Triwulan III TA 2023 BKKPN Kupang

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada triwulan IV tahun 2023 adalah sebanyak 4 dokumen dan capaian pada triwulan IV tahun 2022 adalah 4 dokumen, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan dikarenakan memperoleh capaian yang sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang belum terdapat pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024. Namun pada dokumen reviu renstra periode 2022 target di tahun 2024 adalah sebanyak 12 dokumen, Capaian indikator kinerja tahun 2022 adalah sebanyak 4 dokumen dan 2023 adalah 4 dokumen, sehingga apabila dijumlahkan secara total sampai dengan triwulan IV tahun 2023 ini adalah 8 dokumen dan apabila dibandingkan dengan target Renstra maka tercapai sebesar 66,67%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Dokumen SPIP dapat memitigasi resiko-resiko pelaksanaan kegiatan, agar telaksana dengan baik dan lancar, pemantauan secara rutin yang dilakukan Sekretariat Ditjen PRL setiap bulan sangat mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini

b. Analisis Kegagalan

Target capaian indikator kinerja tidak dapat tercapai apabila tidak disusun tepat waktu dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

c. Solusi

Pemantauan terhadap penyusunan laporan SPIP setiap triwulan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam melaksanakan kegiatan melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah penyusunan dokumen SPIP.

- Penyusunan laporan SPIP triwulanan,
- Penyusunan dan pemantauan manajemen resiko.



Gambar 75. Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Resiko



7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 35. Realisasi Anggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / Pengendalian Intern Atas Pelaporan keuangan (RM)	41.310.000	40.804.269	98,78	505.731
TOTAL		41.310.000	40.804.269	98,78	505.731

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebesar Rp. 41.310.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.804.269,- atau 98,78% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 505.731,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melakukan penyusunan laporan SPIP BKKPN Kupang triwulan IV tahun 2023.

3.6.7 IKM 13 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan level II Lingkup Ditjen PKRL, dengan pembobotan dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop /diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **point 0,5**
- b. Konten berupa infografis dengan **point 1**
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **point 3**.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan IV Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 36. Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 13		Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	100	92	133,3	144,89 (120)	-	92	144,89 (120)	90	148,11

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar merupakan target triwulan. Capaian indikator kinerja triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 133,3 dari target sebesar 92 atau tercapai 144,89% (kinerjaku120%) dari target, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.59/DJPKRL.1/TU.210/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada



triwulan IV tahun 2022 adalah 100 dan capaian triwulan IV tahun 2023 adalah 133,3, namun demikian tidak dapat dibandingkan karena disebabkan oleh cara pengukuran indikator kinerja yang berbeda atau mengalami perubahan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada renstra adalah sebesar 90. Capaian kinerja triwulan IV tahun 2023 adalah 133,3, sehingga apabila dibandingkan antara target Renstra dengan capaian triwulan IV tahun 2023 adalah tercapai sebesar 148,11%

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah komitmen pejabat struktural lingkup BKKPN Kupang dalam memenuhi keaktifan dalam manajemen pengetahuan yang terstandar melalui laman www.kinerjakkp.bitrix24.com hingga triwulan II tahun 2023, namun demikian pada triwulan III tahun 2023 terdapat perubahan aplikasi yang digunakan menjadi aplikasi collaboration office yang dapat diakses melalui tautan www.portal.kkp.go.id.

b. Analisis Kegagalan

Ketidaktifan dalam implementasi manajemen pengetahuan terstandar dapat menghambat capaian indikator kinerja.

c. Solusi

Perlu dilakukan pemantauan terhadap keaktifan dalam memberikan dan berbagi informasi pengetahuan terstandar pada aplikasi *collaboration office*.

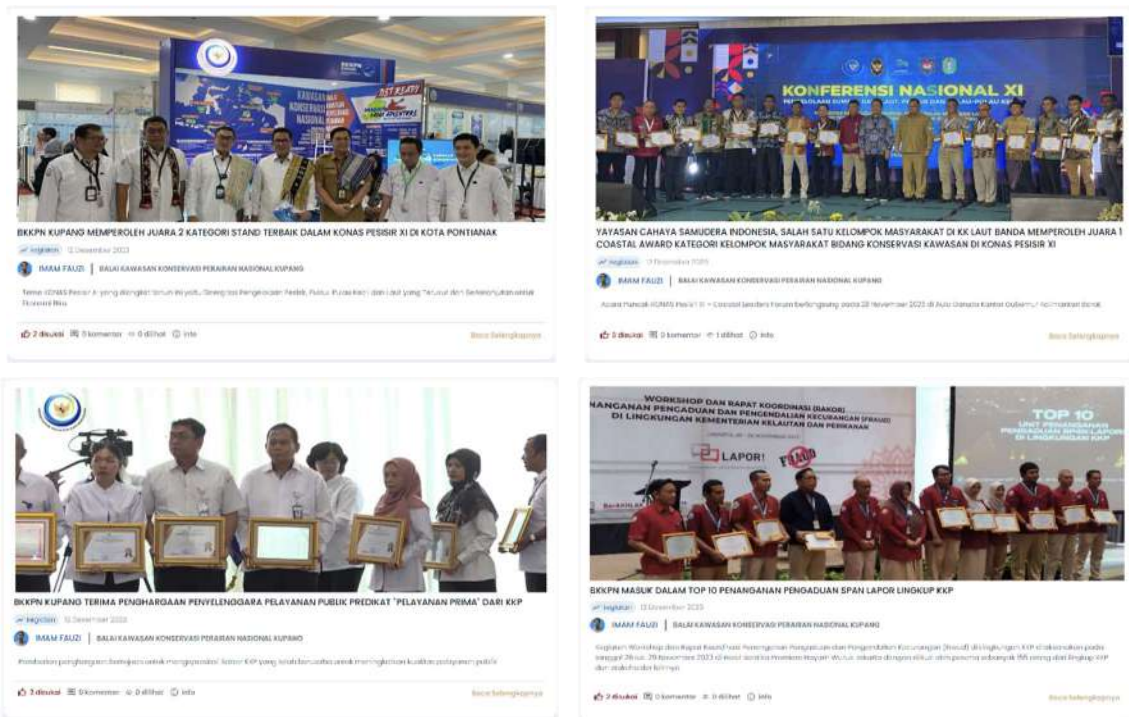


5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Efisiensi terkait biaya, bahwa dalam pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung terwujudnya indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah melakukan unggahan pemberian informasi pengetahuan terstandar pada aplikasi *collaboration office*.



Gambar 76. Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi *collaboration office*



7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada tahun 2023 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan penyampaian informasi manajemen pengetahuan terstandar secara rutin melalui aplikasi yang ditunjuk.

3.6.8 IKM 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2022 sampai dengan triwulan III tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BKKPN Kupang.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BKKPN Kupang dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang dikali 100. Dengan catatan (1) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**, (2) Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target, (3) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.



Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 37. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan IV Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 14		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	100	75	100	133,33 (120)	-	75	133,33 (120)	80	125

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

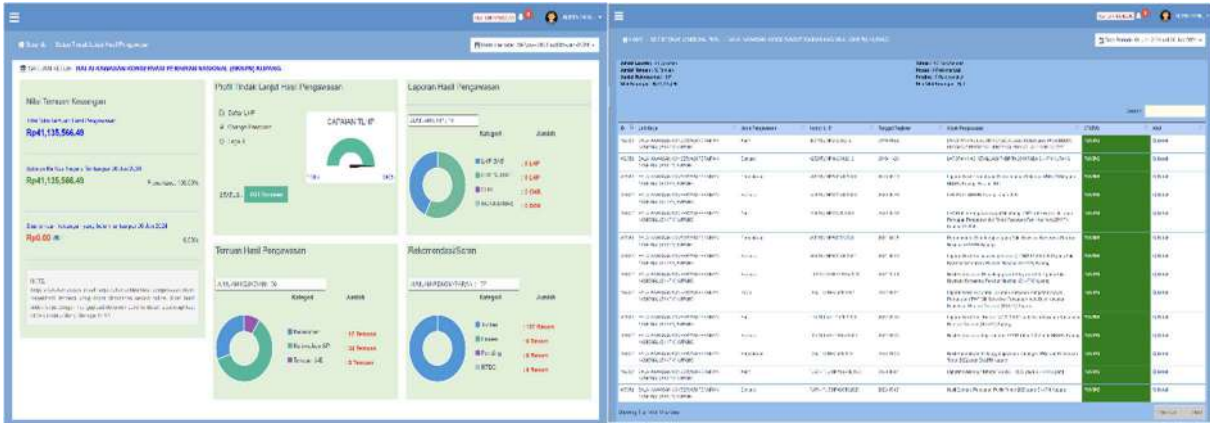
1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan merupakan target triwulanan.

Capaian indikator kinerja pada triwulan IV tahun 2023 sesuai dengan aplikasi SIDAK KKP adalah 100 persen dari target 75 persen atau tercapai 133,33% (kinerjaku 120%) dari target, dan sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.317/DJPR.L1/HP.470/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL lingkup



Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)” Periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah 100 atau 120% dari target.



Gambar 77. Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 100 dan capaian triwulan IV tahun 2023 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama adalah tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 80. Capaian indikator kinerja triwulan IV tahun 2023 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan antara target Renstra dengan capaian triwulan IV tahun 2023 maka tercapai 125%.



4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja yaitu apabila rekomendasi atau saran yang diberikan atas hasil pengawasan tidak atau masih ada yang belum ditindaklanjuti, dan tidak menyampaikan dokumen tindaklanjutnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi capaian nilai indikator kinerja.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan terhadap unit kerja atas hasil pengawasan secara tepat waktu.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2023 ini.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah telah dilakukan tindaklanjut rekomendasi dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

- Nomor T.29/ITJ.3/HP.550/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, ditindaklanjuti melalui surat nomor T.741/BKKPN/HP.510/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pemantauan pertanggungjawaban keuangan, PBJ, dan Persediaan tahun 2022 pada BKKPN Kupang;
- Nomor T.397/ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, ditindaklanjuti melalui surat nomor T.3284/BKKPN/HP.510/IX/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada BKKPN Kupang.
- Nomor T.451/ITJ.3/HP.430/IX/2023 tanggal 7 September 2023, ditindaklanjuti melalui surat nomor T.3656/BKKPN/HP.430/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BKKPN Kupang.



Gambar 78. Pelaksanaan Audit Kinerja pada BKKPN Kupang



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



Gambar 79. Dokumen Tindak Lanjut yang disampaikan

7. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2023 ini.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Itjen apabila terdapat rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang pada periode selanjutnya.

3.6.9 IKM 15 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang

Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Tahun 2022. Cara



perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan temuan LHP BPK BKKPN Kupang yang diselesaikan dibagi jumlah temuan dalam LHP BPK BKKPN Kupang dikali 100%. Dengan catatan Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 38. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 15		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang								
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	-	100	100	100 (100)	-	100	100 (100)	100	100

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan. Capaian tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100% atau tercapai 100% (kinerjaku 100%) dari target, sebagaimana memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor : B.592/DJPKRL.1/HP.520/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal penyampaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LK KKP Tahun 2022 Lingkup UPT Ditjen PKRL.



Capaian ini dikarenakan dalam pelaksanaan audit BPK atas Laporan Keuangan BKKPN Kupang Tahun 2022 tidak terdapat temuan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, Capaian tahun 2022 adalah 100% dan capaian tahun 2023 adalah 100%, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Renstra Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar 100 pada tahun 2024. Capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang, maka telah tercaai 100% dari target renstra.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah bahwa BKKPN Kupang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan audit BPK tidak terdapat temuan, penyusunan laporan keuangan BKKPN Kupang juga telah memenuhi standar pelaporan dan dilaksanakan oleh pegawai yang telah berkompeten.

b. Analisis Kegagalan



Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu apabila pengelolaan dan pelaksanaan APBN tidak sesuai dengan ketentuan, dan laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja dimasa mendatang adalah memberikan penyegaran dan kaderisasi bagi pegawai yang ditugaskan dalam pengelolaan APBN dan Penyusunan Laporan Keuangan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

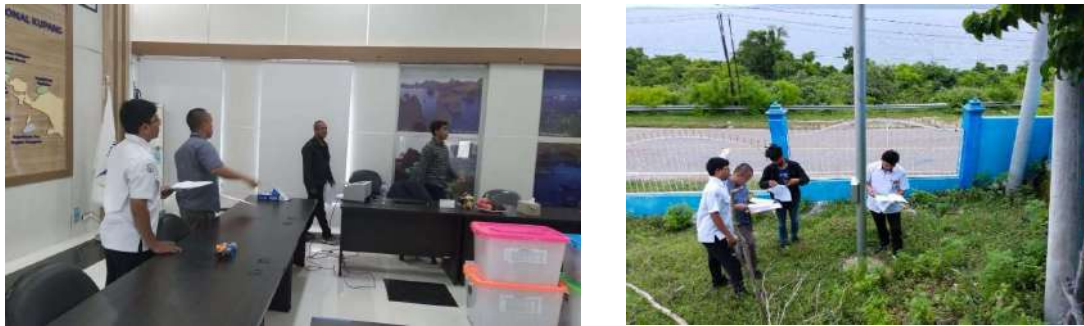
Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai yang sudah kompeten dibidangnya dimana laporan keuangan dan laporan BMN disusun oleh pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir dan Penata Laksana Barang Terampil, pengelolaan dan pelaksanaan APBN juga telah dilakukan oleh pejabat perbendaharaan yang telah memiliki kompetensinya masing-masing.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah penyusunan laporan keuangan dan Laporan BMN BKKPN Kupang TA 2022 pada tanggal 24-27 Januari 2023 dan pelaksanaan Audit oleh BPK pada tanggal 12-13 Februari 2023, dan koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK pada November 2023.



Gambar 80. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN



Gambar 81. Pelaksanaan Audit Oleh BPK



Gambar 82. Koordinasi Tindak Lanjut Temuan BPK

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :



Tabel 39. Realisasi Anggaran Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan BMN (RM)	85.502.000	84.051.078	98,30	1.450.922
2.	Layanan Manajemen Keuangan (RM)	50.100.000	49.089.232	97,96	1.010.768
TOTAL		135.602.000	133.140.310	98,18	2.461.690

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 135.602.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.140.310,- atau 98,18% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 2.461.690,-

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi dari BPK apabila terdapat rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang.

3.6.10 IKM 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas bersama BKKPN Kupang.

Cara pengukuran capaian efektivitas adalah dengan menjumlahkan 80% pencapaian tujuan ditambah 10 % integrasi ditambah 10% adaptasi.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan focus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 40. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

SK 6										
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM 16										
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang										
Realisasi 2022		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
Tw IV	2022	Realisasi Tw Sebelumnya	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan thd Tw IV 2022 (%)	Target PK 2023	% Realisasi thd PK (%Kinerjaku)	Target 2024	% Capaian thd Renstra
100	100	-	77,5	100	129,03 (120)	-	77,5	120	80	125

Sumber data : BKKPN Kupang 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Pengukuran target indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100 dari target 77,5 atau tercapai 129,03% (kinerjaku120%) dari target, sebagaimana Memorandum Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor : 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2022. Penilaian Tingkat efektivitas bantuan pemerintah lingkup BKKPN Kupang dilakukan terhadap bantuan Kompak yang diserahkan pada tahun 2022, dimana terdapat 3 kelompok penerima yaitu : Kompak Pulau Meos Mangguandi di Kabupaten Biak Numfor, KUB Duwefgan di Kabupaten Raja Ampat, dan Pokmaswas Bangko Bersatu di Kabupaten Manggarai Barat. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh pegawai BKKPN Kupang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, capaian tahun 2022 adalah sebesar 100 dan capaian tahun 2023 adalah sebesar 100, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra BKKPN Kupang adalah sebesar 80. Capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target Renstra BKKPN Kupang, maka telah tercapai sebesar 125%.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan Kompak yang dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, baik dalam penggunaan dan pemanfaatan barang bantuan, monitoring kondisi barang bantuan, serta dampak peningkatan ekonomi maupun peningkatan nilai-nilai konservasi setelah menerima bantuan.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat adanya barang bantuan yang hilang karena pemanfaatan, namun demikian telah ada surat pernyataan ketua kelompok dan surat keterangan kehilangan.

c. Solusi

Apabila dimungkinkan, kerusakan atau kehilangan barang bantuan dalam pemanfaatan yang dapat dibuktikan kebenarannya tidak menjadi unsur pengurangan terhadap nilai capaian Tingkat efektivitas bantuan pemerintah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dan biaya dengan adanya pegawai BKKPN Kupang yang ditugaskan di wilayah kerja sehingga dapat lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan barang bantuan yang telah diberikan.

6. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung dalam pencapai indikator kinerja ini adalah monitoring pemanfaatan bantuan dan penilaian mandiri Tingkat efektivitas bantuan kompak.



Gambar 83. Monitoring pemanfaatan dan penilaian bantuan kompak



Gambar 84. Pleno penetapan nilai efektivitas bantuan pemerintah

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Penilaian Efektivitas Bantuan Kompak (RM)	5.100.000	5.022.738	98,49	77.262
TOTAL		5.100.000	5.022.738	98,49	77.262

Alokasi anggaran tahun 2023 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp. 5.100.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.022.738,- atau 98,49% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp. 77.262,-



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan monitoring pemanfaatan bantuan kompak yang diberikan pada tahun 2023 dan melakukan penilaian mandiri tingkat efektivitas bantuan pemerintah.

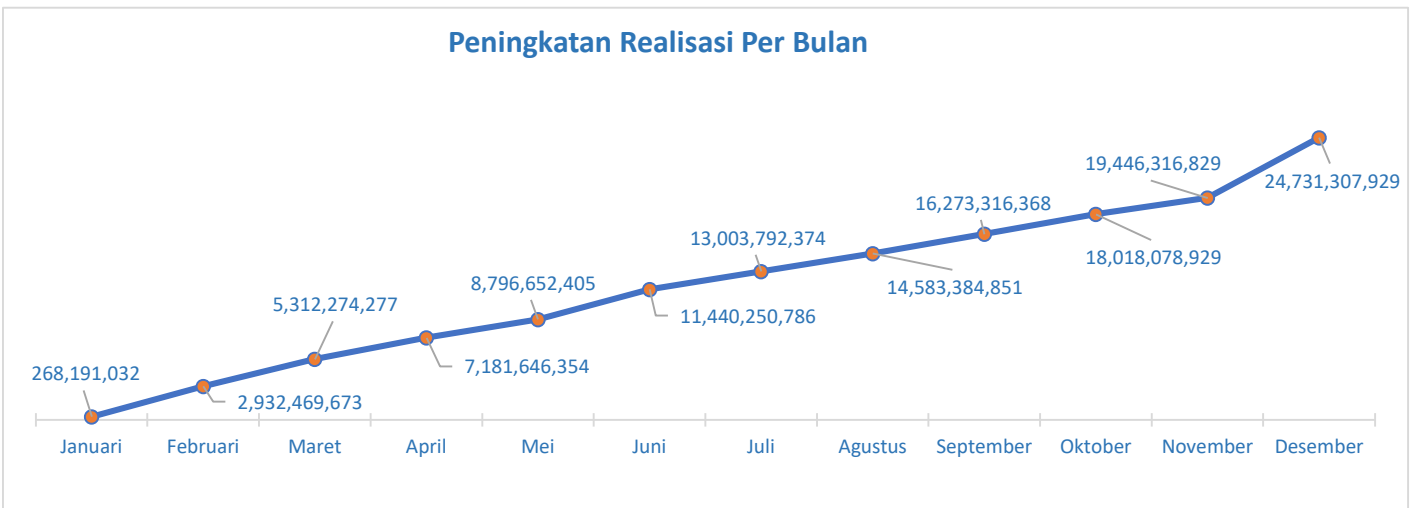
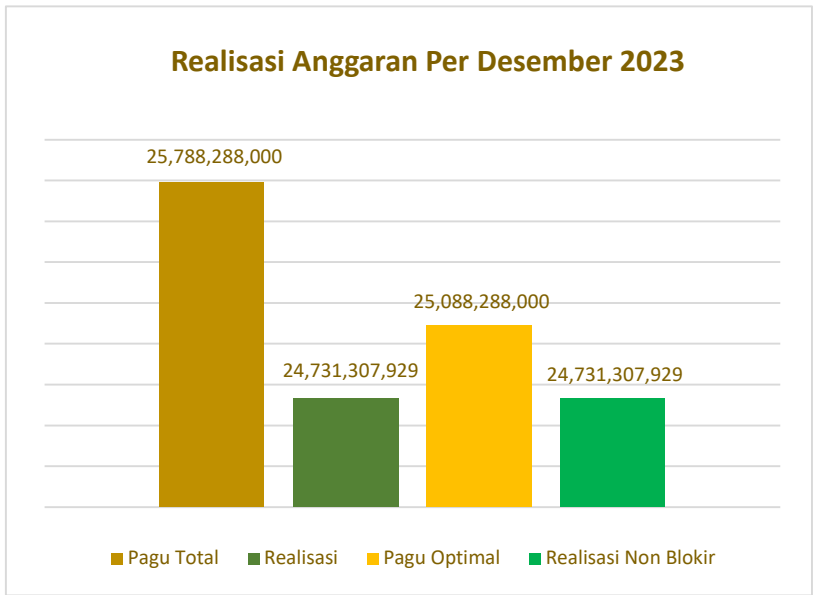
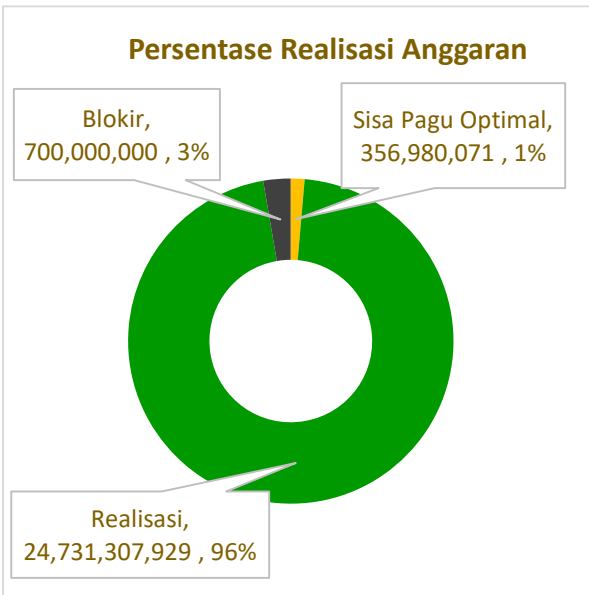
3.7 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran BKKPN Kupang digunakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKKPN Kupang, pada tahun 2023 alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal adalah sebesar Rp. 27.161.936.000,-. Namun demikian pada bulan Agustus 2023 terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari PNPB sebesar Rp. 1.640.550.000,- yang belum dituangkan dalam perjanjian kinerja. pagu anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.802.486.000,-, akan tetapi pada triwulan IV tahun 2023 terdapat penyesuaian pagu anggaran akibat kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, Sehingga dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani pada 30 November 2023. **Total pagu anggaran tahun 2023** sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar **Rp. 25.788.288.000,-**, namun demikian terdapat **blokir** sebesar **Rp. 700.000.000,-** akibat tidak relevan dengan pencapaian target RO, sehingga **pagu optimal** yang dapat digunakan adalah sebesar **Rp. 25.088.288.000,-**, adapun **realisasi anggaran** sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 24.731.307.929,- (95,90%)** dari total anggaran atau **98,58%** dari pagu anggaran optimal, realisasi anggaran BKKPN Kupang tahun 2023 disajikan pada tabel dan gambar berikut:



Tabel 42. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran /Efisiensi (Rp)	Blokir (Rp)	Optimal Pagu (Rp)
1	BKKPN Kupang	25.788.288.000	24.731.307.929	95,90	1.056.980.071	700.000.000	25.088.288.000
JUMLAH		25.788.288.000	24.731.307.929	95,90	1.056.980.071	700.000.000	25.088.288.000



Gambar 85. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2023



Realisasi anggaran BKKPN Kupang sangat mendukung untuk pencapaian kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2023. Seluruh kegiatan dengan capaian yang dikendalikan oleh BKKPN Kupang pada tahun 2023 ini tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Nilai kinerja anggaran tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART DJA pada BKKPN Kupang adalah sebesar 94,48 (Sangat Baik), dimana nilai tersebut diperoleh dari kriteria penyerapan sebesar 95,9, konsistensi sebesar 96,73, capaian realisasi output (CRO) sebesar 100, efisiensi sebesar 13,67, dan nilai efisiensi sebesar 84,18. Nilai kinerja anggaran BKKPN Kupang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 86. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Perhitungan persentase efisiensi atas pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian indikator kinerja dengan persentase realisasi alokasi anggaran pendukung capaian indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 43. Persentase Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	% Capaian	Alokasi Anggaran			% Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	100	350.000.000	349.595.682	99,88	0,12
2	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	120	11.719.159.000	10.902.849.660	93,03	26,97
3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	100	0	0	0	100
4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	120	100.000.000	96.721.196	96,72	23,28
5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	120	319.900.000	306.002.822	95,66	24,34
6	Nilai PNPB BKKPN Kupang (Rp.000)	120	671.391.000	650.997.643	96,96	23,04
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	106,05	11.835.736.000	11.661.098.266	98,52	7,53
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	115,40	0	0	0	115,40
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Nilai)	120	0	0	0	120
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	108,96	268.000.000	267.719.687	99,90	9,06
11	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	117,60	342.090.000	319.700.499	93,46	24,14
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	100	41.310.000	40.804.269	98,78	1,22
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	120	0	0	0	120
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	120	0	0	0	120



No	Indikator Kinerja	% Capaian	Alokasi Anggaran			% Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100	135.602.000	133.140.310	98,18	1,82
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	120	5.100.000	5.022.738	98,49	21,51
	KINERJA ORGANISASI	113,95	25.788.288.000	24.731.307.929	95,90	18,05

Nilai kinerja organisasi BKKPN Kupang tahun 2023 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar **113,95%** (Istimewa), pagu anggaran tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 25.788.288.000,- dengan **realisasi pagu** sebesar Rp. 24.731.307.929,- atau **95,90%**, sehingga apabila dibandingkan antara persentase kinerja organisasi dengan realisasi anggaran, maka terdapat **Efisiensi** sebesar **18,05%**.

3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Satuan Kerja Sejenis

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

- Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan
- Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

Tugas dan fungsi kedua UPT tersebut memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan tingkat eselonisasinya, Adapun pada tahun 2023 kedua UPT ini memiliki indikator kinerja yang sama, sehingga dapat dibandingkan capaian kinerjanya, perbandingan capaian kinerja organisasi tahun 2023 antara BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru disajikan pada tabel berikut :



Tabel 44. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja (Dokumen)	100	100	0	Sama
2	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja (%)	120	120	0	Sama
3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	100	100	0	Sama
4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	120	120	0	Sama
5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja (Kelompok)	120	120	0	Sama
6	Nilai PNPB (Rp.000)	120	120	0	Sama
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)	106,05	103,62	2,43	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
8	Nilai Kinerja Anggaran (Nilai)	115,22	107,88	7,34	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja (Nilai)	120	120	0	Sama
10	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	108,96	107,26	1,70	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
11	Nilai PM SAKIP (Nilai)	117,60	112,20	5,40	BKKPN Kupang Lebih Tinggi



No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru		
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup (Dokumen)	100	100	0	Sama
13	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	120	120	0	Sama
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	120	120	0	Sama
15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (%)	100	100	0	Sama
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (%)	120	119,35	0,65	BKKPN Kupang Lebih Tinggi
Nilai Kinerja Organisasi		113,95	113,63	0,32	BKKPN Kupang Lebih Tinggi

Dari hasil perbandingan terhadap 16 indikator kinerja yang terdapat pada kedua Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :

- **5** indikator kinerja dengan nilai capaian **Lebih Tinggi**
- **11** indikator kinerja dengan nilai capaian **Sama**

Adapun perbandingan terhadap Nilai Kinerja Organisasi antara BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru, dihasilkan bahwa capaian kinerja BKKPN Kupang **Lebih Tinggi** sebesar **0,32** dari LKKPN Pekanbaru.

3.9 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan

Selain pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BKKPN Kupang, selama tahun 2023 ini telah banyak memperoleh



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

capaian kinerja lainnya atau penghargaan yang diterima atas praktik-praktik baik pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai **BerAHLAK** (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif**) dan budaya organisasi **LEBE BAE** (**Layanan prima, Empati, Berani jujur, Efektif dan efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis**), dan juga BKKPN Kupang telah mampu menjadi pusat studi tiru dalam pengelolaan Kawasan konservasi bagi pemerintah daerah dan pusat studi tiru pembangunan zona integritas bagi K/L lainnya, serta pada tahun 2023 ini terdapat 8 inovasi BKKPN Kupang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Capaian kinerja lainnya disajikan sebagai berikut :

a. Penghargaan Tahun 2023



Gambar 87. Penghargaan 2023

1. E-Rekon Terbaik Tahun 2022 Lingkup Ditjen PRL (Januari 2023);
2. Terbaik I Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 Lingkup Ditjen PRL (Februari 2023);



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BIJAK
Mengekoid
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

3. Unit Kerja UPT Tertinggi Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 Lingkup Ditjen PRL (Februari 2023);
4. Terbaik II Unit Kerja dengan Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Lingkup Ditjen PRL (Februari 2023);
5. Terbaik II Unit kerja UPT dengan Predikat Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2022 Lingkup Ditjen PRL (Februari 2023);
6. Peringkat Pertama Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan Jumlah Transaksi Tertinggi TA.2022 Kategori Satker – Prov. Nusa Tenggara Timur (Maret 2023);
7. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa Triwulan II Tahun 2023 Lingkup Ditjen PRL (Juli 2023);
8. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa Triwulan III Tahun 2023 Lingkup Ditjen PRL (Oktober 2023);
9. Peringkat II Satker dengan Nominal Transaksi KKP terbesar Periode Triwulan III Tahun 2023 di Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT (November 2023);
10. Top 10 Unit Penanganan Pengaduan SP4N LAPOR di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (November 2023);
11. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Desember 2023);
12. Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat “Pelayanan Prima” Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (Desember 2023);
13. Peringkat I Pengelolaan Pagu, Realisasi, dan Capaian Output K/L TA.2023 Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur – Kategori Pagu Kecil (1 Milyar s.d 100 Milyar) dengan nilai 91,744 (Desember 2023);
14. Peringkat II Satker Terbaik dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode TA.2023 (Desember 2023).

b. Pusat Studi Tiru

TAHUN
2023
BKKPN KUPANG
Menjadi Pusat
Studi Tiru

4
Instansi
Pemerintah



Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas Kantor BPKHTL XIV Kupang (9 Mei 2023)



Studi Tiru Peningkatan EVIKA DKP Papua ke KK Pulau Gili Matra (18-21 Oktober 2023)



Studi Tiru Peningkatan EVIKA Cab DKP Kab. Malang Prov Jawa Timur (7 Desember 2023)



Studi Tiru Peningkatan EVIKA DKP Kalsel (22 Nov 2023)

Gambar 88. Studi Tiru di BKKPN Kupang

1. Pembangunan Zona Integritas bagi Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang (Mei 2023);
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua (Oktober 2023);
3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Selatan (November 2023);
4. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) bagi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur (Desember 2023);



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

c. Inovasi Pelayanan Publik



NO	UNIT PENYELANGGARA RELAYAN PUBLIK	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	1. Gerai Pelayanan "Sini Situ"	1. inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2		2. SILA DALIPATIK	2. Aksi kolaboratif dalam penguatan Masyarakat untuk pengendalian sampah plastik bersama KOMPAS YCSI Yayasan Cahaya Samudera Indonesia
3		3. Taman Karang Perairan Ekoparung	3. inovasi pemulihan ekosistem terumbu karang untuk menciptakan suatu obyek wisata buatan di bawah laut
4		4. MonSTERA	4. Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi
5		5. SIJAGA KONSERVASI	5. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Konservasi
6		6. PLAKAT	6. Platform Narasumber Terintegrasi
7		7. Data Layanan PNPB (Online)	7. media monitoring dan evaluasi virtual capaian PNPB secara periodik
8		8. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Samudera	8. media publikasi hasil monitoring Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Lamun, dan Mangrove

8 Inovasi Pelayanan Publik BKKPN Kupang 2023

1. Gerai Pelayanan "Sini Situ"
2. SILA DALIPATIK
3. Taman Karang Piracora
4. MonSTERA
5. SIJAGA KONSERVASI
6. PLAKAT
7. Data Layanan PNPB Online
8. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir



Gambar 89. Inovasi BKKPN Kupang

Inovasi BKKPN Kupang yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 tahun 2023 yaitu :

1. Gerai Pelayanan "Sini Situ" merupakan inovasi untuk mendekatkan pelayanan pada Masyarakat;
2. SILADALIPATIK merupakan aksi kolaboratif dalam penguatan Masyarakat untuk pengendalian sampah plastik bersama KOMPAS Yayasan Cahaya Samudera Indonesia;
3. Taman Karang Piracora merupakan inovasi pemulihan ekosistem terumbu karang untuk menciptakan suatu obyek wisata buatan bawah laut;
4. MonSTERA merupakan inovasi monitoring sasaran target dan evaluasi rencana aksi;



BKKPN
K U P A N G



LEBE BAE



BIJAK
Mengelola
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

5. Sijaga Konservasi merupakan inovasi untuk mengevaluasi kinerja pengelola Kawasan konservasi;
6. PLAKAT merupakan platform keuangan terintegrasi;
7. Data Layanan PNBP (Daring) merupakan media monitoring dan evaluasi terkait capaian PNBP secara periodik; dan
8. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional merupakan media publikasi hasil monitoring biofisik ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian BKKPN Kupang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang terdiri dari 16 (enam belas) indikator kinerja. Pada Tahun 2023 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh adalah **113,95 (biru=istimewa)**. Capaian kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Dua Belas Indikator Kinerja dengan capaian melebihi target yaitu :

1. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (target 5% dan realisasi 10,21%);
2. Kemitraan Konservasi yang diinisiasi dan/atau dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (target 1 dokumen dan realisasi 3 dokumen);
3. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah kerja BKKPN Kupang (target 2 kelompok dan realisasi 3 kelompok);



4. Nilai PNBPN BKKPN Kupang (target Rp. 1.725.000.000 dan realisasi Rp. 2.369.683.750);
 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (target nilai 93,75 dan realisasi nilai 99,42);
 6. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (target nilai 82 dan realisasi nilai 94,48);
 7. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (target nilai 75 dan realisasi nilai 93,03);
 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (target indeks 84 dan realisasi indeks 91,53);
 9. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (target nilai 75 dan realisasi nilai 88,20);
 10. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92% dan realisasi 133,3%);
 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (target 75% dan realisasi 100%);
 12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (target 77,5% dan realisasi 100%).
- b. Empat Indikator Kinerja dengan capaian 100%
1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen);
 2. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen);
 3. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen);



4. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (target 100% dan realisasi 100%).

Pada tahun 2023 alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 25.788.288.000 dengan realisasi sebesar Rp. 24.731.307.929, atau tercapai 95,90% dari pagu anggaran. Namun demikian tidak seluruh alokasi anggaran dapat digunakan, hal tersebut dikarenakan adanya blokir sebesar Rp. 700.000.000 sehingga pagu optimal yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 25.088.288.000.

Disamping hal tersebut BKKPN Kupang telah berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sebesar Rp. 2.433.683.750 yang berasal dari penerimaan Kembali belanja barang TAYL, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, dan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya (pemanfaatan kawasan konservasi berupa Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Penelitian, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pendidikan, dan Karcis Masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan).

Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 yang menjadi perhatian antara lain :

1. Peningkatan penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
2. Peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi;
3. Peningkatan jejaring dan kemitraan;
4. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi;
5. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak; dan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.



4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu :

1. Melaksanakan fasilitasi perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
2. Melaksanakan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai evaluasi efektivitas Kawasan konservasi;
3. Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* melalui implementasi kemitraan yang telah disepakati, finaliasi dokumen jejaring konservasi, dan menginisiasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;
4. Melaksanakan pendampingan dan monitoring atas pemanfaatan bantuan Kompak dan menyiapkan calon penerima bantuan kompak pada periode berikutnya;
5. Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi; dan
6. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :



Tabel 45. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Melaksanakan fasilitasi perijinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) bagi masyarakat lokal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Sumba Barat Daya (12-13 November 2023) 2. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Landuleko, Rote Ndao (12-16 November 2023) 3. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Pulau Sabu (12-16 November 2023) 4. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Sumba Timur (12-16 November 2023) 5. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Pulau Raijua (13-17 November 2023) 6. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Rote Barat, Rote Ndao (25-30 November 2023) 7. Pendataan Pelaku Usaha dan Luasan Budidaya Rumput Laut dalam rangka Fasilitasi KKPRL di Kupang Barat (28-30 November) 8. Koordinasi Awal Fasilitasi PKKPR di Kab Kupang (22-23 November 2023) 9. Pembahasan Penyelenggaraan Fasilitasi PKKPR Bagi Masyarakat Lokal (28 Desember 2023) 	https://drive.google.com/drive/folders/12h7n2M4FHMgRRv2-wvLYI1VkdD4bqFm9?usp=drive_link
2	Melaksanakan penyusunan target peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada periode berikutnya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL (19-21 Desember 2023) 	https://drive.google.com/drive/folders/1wumApeA-WZhf1Xyy4B4yzIvoXfW3i7ij?usp=drive_link
3	Melaksanakan pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Pembahasan Finalisasi Jejaring Kawasan Konservasi Nusa Tenggara Timur (6 Oktober 2023) 	https://drive.google.com/drive/folders/1f_myFYnBlZqF-6CircbV-



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BJAK
Mengefektifkan
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
	perjanjian jejaring konservasi;	2. Telah dilaksanakan Pembahasan Jejaring Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (17 Oktober 2023)	KTJqN06qDtZ?usp=drive_link
4	Melaksanakan monitoring bantuan Kompak;	1. Telah dilaksanakan Monev Kompak Kelompok Meno Lestari, NTB (9 Oktober 2023) 2. Telah dilaksanakan Monev Kompak Yayasan Koppesda, NTT (14 Oktober 2023) 3. Telah dilaksanakan Monev Kompak YCSI, Banda (10 November 2023)	https://drive.google.com/drive/folders/1UV3e0m8hg15NpBu-8wd88x5jCriQ_JDy?usp=drive_link
5	Melaksanakan pemantauan kinerja secara berkala.	1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan	https://drive.google.com/drive/folders/14VhDLgQPS4tdilFvXaYpKGtrQt-QKOcA?usp=sharing



BKKPN
KUPANG



LEBE BAE



BJAK
Mengefektifkan
LAUT

#2023
HMP THRIVE



Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

LAMPIRAN

Lampiran 1



Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)
KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Fauzi

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)
KUPANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
2.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	5
3.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
		4.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
4.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
5.	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	6.	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	294.475
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	82
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	500.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	13.675.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.986.936.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023		27.161.936.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)
KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Fauzi

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)
KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
2.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	5
3.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
		4. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
4.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
5.	Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang	6. Nilai PNBK BKKPN Kupang (Rp.000)	1.725.000
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,75
		8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	82
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75

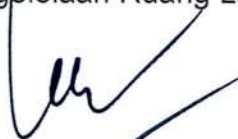
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	84
		11. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	350.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	12.815.550.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.622.738.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023		25.788.288.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Imam Fauzi

Lampiran 2



Dokumen Operasionalisasi Pemanfaatan
Ruang Laut

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

MEMORANDUM

Nomor: 13/BKKPN/TU.140/I/2024

Yth : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan Pemanfaatan Ruang Laut lingkup BKKPN
Kupang tahun 2023
Lampiran : 3 berkas
Tanggal : 5 Januari 2024

Dalam rangka mencapai target kinerja BKKPN Kupang tahun 2023 pada Indikator Kinerja Kegiatan “Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang”, bersama ini Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut menyampaikan 3 (tiga) Laporan Tahunan Pemanfaatan Ruang Laut lingkup BKKPN Kupang tahun 2023 untuk kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Berikut beberapa poin ringkasan dari Laporan Tahunan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut lingkup BKKPN Kupang tahun 2023:

- **Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut** Lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada 2023 telah dilaksanakan di beberapa Kawasan Konservasi yang menjadi wilayah kerja Balai KKPKN Kupang yaitu wilayah kerja Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Kawasan Konservasi Laut Banda dan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Sosialisasi dilaksanakan melalui metode tatap muka secara langsung dengan mendatangi lokasi (*door-to-door*) maupun melalui pertemuan. Sosialisasi diberikan kepada Perusahaan Swasta, BUMN/D, Pemerintah Pusat/Daerah, Masyarakat lokal, Aparat pemerintah desa/kampung dengan total peserta keseluruhan adalah 760 orang.
- **Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut** dilaksanakan melalui penilaian teknis permohonan KKPRL dan Verifikasi Lapangan terhadap permohonan KKPRL yang dilakukan di Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKKPN Kupang. Pada tahun 2023, BKKPN Kupang melaksanakan Penilaian Teknis KKPRL melalui penugasan dari plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut sebanyak 3 (tiga) permohonan Persetujuan KKPRL di Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB) dan disertai dengan 2 (dua) verifikasi lapangan atas permohonan Persetujuan KKPRL tersebut. Adapun data penilaian teknis KKPRL dan verifikasi lapang adalah sebagai berikut:

No	Subjek Hukum	Jenis Dokumen Permohonan	Provinsi	Nama Perairan	Detail Kegiatan	Penilaian Teknis	Verifikasi Lapangan
1	Yayasan Ekosistem Gili Indah	Persetujuan KKPRL	NTB	Laut Bali / KK Gili Matra	Restorasi Terumbu Karang	13 April 2023	-
2	PT Beruang Besar Lombok	Persetujuan KKPRL	NTB	Laut Bali / KK Gili Matra	Pelindung Pantai dan Reef Ball	26 September 2023	27-28 September 2023
3	PT. Tiara Cipta Nirwana	Persetujuan KKPRL	NTB	Laut Bali / KK Gili Matra	ALSE	6 Desember 2023	7-8 Desember 2023

- **Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut** selama tahun 2023 dilaksanakan di wilayah kerja BKKPN Kupang, antara lain Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu (NTT), Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB), Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang (Sulsel), Kawasan Konservasi Laut Banda (Maluku), Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido (Papua) serta Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat serta Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat (Papua Barat Daya). Pelaksanaan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut melalui identifikasi eksisting kegiatan pemanfaatan ruang laut; monitoring eksisting pemanfaatan ruang laut di dalam kawasan konservasi; serta sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan ruang laut dan perizinan Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKKPN Kupang yang melibatkan dengan pihak terkait. Beberapa poin terkait hasil monitoring pemanfaatan ruang laut sebagai berikut:

 - a) Hasil identifikasi monitoring terdapat potensi pemanfaatan ruang laut berupa pemanfaatan non berusaha sebanyak 112, pemanfaatan berusaha sebanyak 16 dan terdapat potensi pemanfaatan ruang laut oleh Masyarakat lokal sebanyak 234 yang tersebar di Kawasan Konservasi Nasional lingkup BKKPN Kupang.
 - b) Hasil pendataan dan pemetaan dengan menggunakan drone di TNP Laut Sawu terhadap pemanfaat ruang laut yaitu Masyarakat pembudidaya rumput laut yang berpotensi mendapatkan fasilitasi Persetujuan KKPRL bagi Masyarakat lokal dengan total luasan 1.524 Hektar dengan jumlah pembudidaya sebanyak 12.154 orang.
 - c) hasil monitoring eksisting pemanfaatan ruang laut dilakukan terhadap 8 (Delapan) bangunan, pipa dan kabel bawah laut di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, antara lain:
 1. Dermaga di Gili Air
 2. Pipa Bawah Laut (SWRO) Villa Ombak
 3. Dermaga di Gili Trawangan
 4. Pipa Bawah Laut PDAM Amerta Dayan Gunung
 5. Restorasi Terumbu Karang Struktur Instalasi Biorock dan Turbin Dynorotor
 6. Pipa Bawah Laut PT. TCN
 7. Kabel bawah Laut PT. Telekomunikasi Indonesia
 8. Kabel bawah Laut PLN UIW NTB
 - d) Rencana tindak lanjut dari monitoring pemanfaatan ruang laut tahun 2023 adalah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan monitoring pemanfaatan prioritas terhadap 7 (tujuh) Izin Lokasi Perairan atau KKPRL yang akan dilaksanakan pada 2024.

Laporan Pemanfaatan Ruang Laut lingkup BKKPN Kupang tahun 2023 terlampir dan dapat diakses secara elektronik melalui <https://bit.ly/LaporanTimPPRL2023>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Thri Heni Utami Radiman



2023

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT LINGKUP BALAI KKPN KUPANG

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan perikanan



LAPORAN TAHUNAN



2023

MONITORING PEMANFAATAN RUANG LAUT

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan



BKKPN KUPANG

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

2023



VERIFIKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lampiran 3



*Berita Acara Evaluasi Efektivitas
Kawasan Konservasi*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG

MEMORANDUM

Yth. : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
Hal : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 29 November 2023

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA) wilayah kerja BKKPN Kupang Tahun 2023, Bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan evaluasi tanggal 10 Agustus 2023 terhadap Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 88,71% (Status Emas atau dikelola berkelanjutan) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 82,06% (Satus Perak atau dikelola Optimum), sehingga terdapat peningkatan sebesar 6,65%;
2. Berdasarkan evaluasi tanggal 10 Agustus 2023 terhadap terhadap Kawasan Konservasi Laut Banda di Provinsi Maluku dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 73,78% (Satus Perak atau dikelola Optimum) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 65,12% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 8,66%;
3. Berdasarkan evaluasi tanggal 10 Agustus 2023 terhadap terhadap Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 72,47% (Satus Perak atau dikelola Optimum) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 58,99% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 13,48%;
4. Berdasarkan evaluasi tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan mempunyai nilai akhir 86,76% (Satus Emas atau dikelola Berkelanjutan) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 81,24% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 5,52%;

5. Berdasarkan evaluasi tanggal 30 Agustus 2023 terhadap Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Bara di Provinsi Papua Barat Daya dinyatakan mempunyai nilai akhir 84,82% (Satus Perak atau dikelola Optimum) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 74,04% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 10,78%;
6. Berdasarkan evaluasi tanggal 14 September 2023 terhadap Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dinyatakan mempunyai nilai akhir 88,52% (Satus Emas atau dikelola Berkelanjutan) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 74,72% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 13,8%;
7. Berdasarkan evaluasi tanggal 14 September 2023 terhadap Kawasan Konservasi Kep. Padaido dinyatakan mempunyai nilai akhir 84,27% (Satus Perak atau dikelola Optimum) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 78,59% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 5,68%;
8. Berdasarkan evaluasi tanggal 27 September 2023 terhadap Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang dinyatakan mempunyai nilai akhir 85,27% (Satus Emas atau dikelola Berkelanjutan) dan nilai tahun sebelumnya sebesar 68,18% (Satus Perak atau dikelola Optimum) sehingga terdapat peningkatan sebesar 17,09%;
9. Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Verifikasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilaksanakan tahun 2023 sebagaimana terlampir.
10. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana disebutkan pada angka 1-8 di atas, jika dibandingkan dengan penilaian evika Tahun 2022 maka rata-rata peningkatan EVIKA tahun 2023 adalah sebesar 10,21% Sebagaimana tabel berikut :

No.	Kawasan Konservasi	Nilai Efektivitas		Kenaikan atau Penurunan (%)
		2022 (%)	2023 (%)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=(d-c)</i>
1	Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra	82,06	88,71	6,65
2	Kawasan Konservasi Laut Banda	65,12	73,78	8,66
3	Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara	58,99	72,47	13,48
4	Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	81,24	86,76	5,52
5	Kawasan Konservasi Waigeo Sebelah Barat	74,04	84,82	10,78
6	Taman Nasional Perairan Laut Sawu	74,72	88,52	13,8
7	Kawasan Konservasi Kep. Padaido	78,59	84,27	5,68
8	Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	68,18	85,27	17,09
	Jumlah Nilai	582,94	664,60	81,66
	Nilai Rata-Rata	72,87	83,08	10,21

11. Adapun target indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan konservasi nasional wilayah kerja BKKPN Kupang tahun 2023 adalah sebesar 5% dan capaian tahun 2023 adalah sebesar 10,21% sehingga tercapai 204,20% dari target.

Demikian laporan ini disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam pencapaian target indikator kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Atas perkenaanannya di ucapkan terima kasih.



Agustiny E. Parinsi

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU
DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun 2023 bertempat di kantor BKKPN Kupang telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. M. Ramli Firman, BKKPN Kupang
2. Agustiny E. Parinsi, BKKPN Kupang
3. Wiyudha Pandu Laksana, BKKPN Kupang
4. Thri Heni U. R., BKKPN Kupang
5. Muhammad Hilmi, BKKPN Kupang
6. Ikrima Avicenna, BKKPN Kupang
7. Andri Yudistira, BKKPN Kupang
8. Rafella Dorcas Dyah Magdhalena, BKKPN Kupang
9. Ade Irmalia Harifa, BKKPN Kupang
10. Maria Goreti Ladha, BKKPN Kupang
11. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo, BKKPN Kupang
12. Riyan Afif Al Ihsan, BKKPN Kupang
13. Ika Rakhmad Satria, BKKPN Kupang
14. Amos M. Ponggalo, BKKPN Kupang
15. Suhaidi, BKKPN Kupang
16. Windu Merdekawati, BKKPN Kupang
17. Aji Nugroho, BKKPN Kupang
18. Setiawan Mangando, BKKPN Kupang
19. Lenni Maretta Sitinjak, BKKPN Kupang
20. Ika Nur Afifah, BPSPL Denpasar
21. Irwan Fakhry, Sekretariat Jenderal (Tim Penilai)
22. Abdi Tunggal Priyanto, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Tim Penilai)
23. Hesti Widodo, Coral Triangle Center (Tim Penilai)
24. Rusdatus Sholihah, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
25. Fredik Ngili, YAPEKA

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada kriteria INPUT, terdapat peningkatan indikator Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana dari tahun sebelumnya;
2. Pada kriteria PROSES, terdapat peningkatan indikator Pengawasan, Penjangkauan, dan Kemitraan dari tahun sebelumnya;
3. Pada kriteria OUTPUT, terdapat peningkatan indikator Pemanfaatan Terkendali, Pengetahuan Masyarakat, dan Data dan Informasi dari tahun sebelumnya;
4. Pada kriteria OUTCOME, terdapat peningkatan indikator Kondisi Masyarakat Penerima Manfaat dari tahun sebelumnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

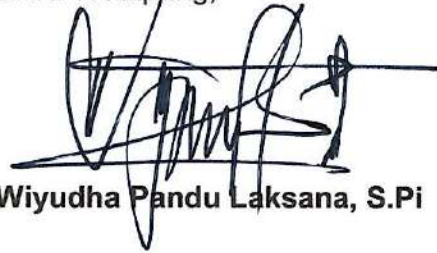
14 September 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM., M.Res

Koordinator TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang,



Wiyudha Pandu Laksana, S.Pi

PELP Madya
BKKPN Kupang,



Agustiny E. Parinsi

Koordinator NTT
YAPEKA,



Fredik Ngili

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU
DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun 2023 bertempat di kantor BKKPN Kupang telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM, M.Res

Anggota : 1. Irwan Fakhry, S.Pi

2. Abdi Tunggal Priyanto, S.Si, MT, M.Sc, Ph.D

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Wiyudha Pandu Laksana, S.Pi

Jabatan : Koordinator TNP Laut Sawu, BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 1050 dari total skor 1075 (98%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 415 dari total skor 430 (97%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 520 dari total skor 650 (80%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 430 dari total skor 625 (69%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2415 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan pada tahun 2022 mempunyai nilai akhir **88,52%** dengan status **EMAS (Dikelola Berkelanjutan)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, yaitu:

1. Menyusun laporan/matriks perencanaan dan laporan tahunan yang memenuhi kebutuhan penilaian EVIKA;
2. Mencatat, mengompilasi, dan memetakan cakupan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait, khususnya Pokmaswas dan PSDKP secara rutin setiap bulan;
3. Menyusun kajian daya dukung pemanfaatan perikanan dan pariwisata lingkup kawasan konservasi;
4. Merekapitulasi dan membandingkan data yang sama untuk kriteria Outcome indikator Kondisi Masyarakat Penerima Manfaat;
5. Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

14 September 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM., M.Res

Koordinator TNP Laut Sawu
BKKPN Kupang



Wiyudha Pandu Laksana, S.Pi

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PULAU GILI AIR, GILI MENO, DAN GILI
TRAWANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun 2023 bertempat di Lombok Astoria Hotel Mataram telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM, M.Res

Anggota : 1. Irwan Fakhry, S.Pi

2. Abdi Tunggal Priyanto, S.Si, MT, M.Sc, Ph.D

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Martanina, S.St. Pi

Jabatan : Koordinator Satker Lombok Utara, BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 1025 dari total skor 1075 (95%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 430 dari total skor 430 (100%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 605 dari total skor 650 (93%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 275 dari total skor 625 (44%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2335 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan dinyatakan pada tahun 2022 mempunyai nilai akhir **88,71%** dengan status **EMAS (Dikelola Berkelanjutan)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, yaitu:

1. Membandingkan antar zonasi hasil monitoring target konservasi berupa ikan karang.
2. Mengumpulkan data dan informasi hasil kuantitas tangkapan ikan.
3. DJPRL agar menetapkan indikator-indikator standar untuk monitoring tingkat pengetahuan masyarakat.
4. DJPRL agar mendukung kajian dampak ekonomi dari keberadaan kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

10 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM, M.Res

Koordinator Satker Lombok Utara
BKKPN Kupang,



Martanina, S.St.Pi

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PULAU GILI AIR, GILI MENO, DAN GILI
TRAWANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun 2023 bertempat di Lombok Astoria Hotel Mataram telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Muslim, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Ruspono, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Sugianur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Khairuddin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Rendy Vidya Wibisono, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Rusmiati Tri C., Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. B. Fitriana, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Eni W. Wati, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Zaenab, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Gerhana R., Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Hanapi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
12. Pariadi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Gangga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Cherlyna, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
15. Moh. Tifatul Jahidi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
16. BQ Yuliani Hidayati, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Imam Fauzi, BKKPN Kupang
18. Martanina, BKKPN Kupang
19. Hotmariyah, BKKPN Kupang
20. Niramaya Kusuma Wardani, BKKPN Kupang
21. Lalu Adrajatun, BKKPN Kupang
22. Edy Suparto Saba, BPSDKP Wilayah Bima Dompu
23. Yuliati Basri, BPSDKP Wilayah Bima Dompu
24. Syamsuriah, BPSDKP Wilayah Bima Dompu
25. Sadi, BPSDKP Wilayah Bima Dompu
26. Abdul Rahman, BPSDKP Wilayah Lombok
27. M. Yusach Pratomo, BPSDKP Wilayah Lombok
28. Ulul Azmi, BPSDKP Wilayah Lombok
29. Susiani Purnamaningsih, BPSDKP Wilayah Lombok
30. Muji Fathariyandi, BPSDKP Wilayah Lombok
31. Rangga Wali A.S., BPSDKP Wilayah Lombok
32. Nurtaat, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
33. Hamdani, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
34. Pandu Abdi Perdana, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
35. Moh. Tinfanul Jahidi, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
36. Teezar Ihwanul Herman, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
37. L. Reza, BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat

38. Hesti Widodo, Coral Triangle Center (Tim Penilai)
39. Irwan Fakhry (Tim Penilai)
40. Abdi Tunggal Priyanto (Tim Penilai)
41. Bustamin, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
42. Rusdatus Sholihah, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
43. Dony Sudiarta Pratama, BKSDA NTB
44. Kurniawan, WCS Indonesia
45. Hernawati, WCS Indonesia
46. Haerul Hazmi, WCS Indonesia
47. Asmayadi, WCS Indonesia
48. C. Himawan, WCS Indonesia
49. Hazmi, WCS Indonesia
50. Kiagus Muh. Hasbi, WCS Indonesia
51. Asmayadi, WCS Indonesia
52. Azwar, WCS Indonesia
53. Lora Santika, WCS Indonesia
54. Soraya Gigentika, FIP2B NTB
55. L. M. Riri Rivari A, FIP2B NTB
56. Ihwan Jaelani, YDBS
57. Deris, FPTLS
58. Deni Artha W, PPID
59. Herman, Pokmawas Sulat Lawang


Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. SDM pengelola telah memenuhi jumlah minimum dan kompetensi fungsi pengelolaan.
2. Anggaran telah terpenuhi.
3. Sarana dan prasarana tersedia lengkap;
4. Proses pengelolaan telah dilakukan optimal;
5. Output pengelolaan telah terlihat;
6. Kondisi target konservasi dan zona inti stabil;
7. Kondisi zona inti lebih baik daripada zona-zona lainnya;
8. Monitoring biofisik belum dapat menampilkan data kondisi ikan karang di masing-masing zona;
9. Data dan informasi kuantitas hasil tangkapan belum tersedia;
10. Data dan informasi kajian dampak ekonomi dari keberadaan kawasan konservasi masih terbatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

10 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM, M.Res

Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil DKP Provinsi NTB,



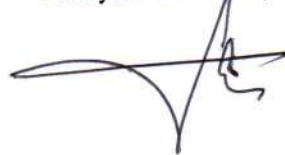
Ruspono, S.Pi, M.Si

Koordinator Satker Lombok Utara
BKKPN Kupang,



Martanina, S.St.Pi

Kepala Balai PSDKP
Wilayah Lombok,



Abdul Rahman, S.St.Pi

Kepala Balai PSDKP
Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat,



Hamdon, S.Pd, MM

Kepala Balai PSDKP
Wilayah Bima Dompu,



Ir. Edy Suparto Saba, M.Si

WCS Indonesia,



Hernawati, S.Pi, M.Si

FIP2B NTB,



Dr. Soraya Gigentika, M.Si

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Rabu, dua puluh tujuh, bulan September, tahun 2023 telah dilakukan evaluasi secara *offline* terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.35/MEN/2022 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Tim Penilai : 1) Tasrif Kartawijaya, S.Pi, M.Si
2) Cora Mustika, A.Pi, M.Si
Sekretariat : Makmur, S.Pi

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi:

Nama : Ilham, S.Kel
Jabatan : Koordinator Satker TWP Kapoposang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 930 dari total skor 1075 |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 415 dari total skor 430 |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 555 dari total skor 650 |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 355 dari total skor 625 |
| Jumlah Skor Penilaian | : 85.27 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai status: **Emas (dikelola secara Berkelanjutan).**

Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, yaitu:

1. Membangun fasilitas kantor pengelola beserta sarana prasarana penunjang pengelolaan,
2. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM,
3. Memperkuat sistem pengawasan untuk menurunkan tingkat ancaman terhadap sumberdaya kawasan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Makassar, 27 September 2023

Tim Penilai Kelompok VIII,



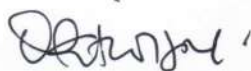
Cora Mustika, A.Pi, M.Si

Koordinator Wilker Kepulauan Kapoposang dan laut sekitarnya, BKKPN Kupang



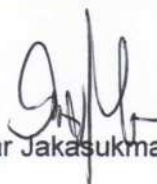
Ilham, S.Kel

Tim Penilai Kelompok VIII,



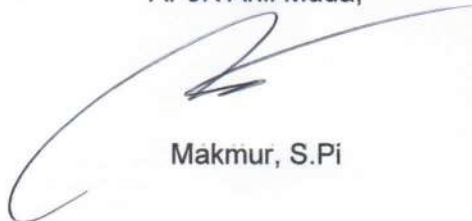
Tasrif Kartawijaya, S.Pi, M.Si

BPSPL Makassar,



Munandar Jakasukmana, S.Pi, M.Si

APJK Ahli Muda,



Makmur, S.Pi

Universitas Hasanuddin/MPRG



Dr. Syafyudin Yusuf, ST, M.Si,

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan September, tahun 2023 telah dilakukan verifikasi secara *offline* terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.35/MEN/2022 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Drs. Khaeruddin Anas, M.Si, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat;
2. Permana Yudiarso, ST, MT, Kepala BPSPL Makassar;
3. Dr. Syafyudin Yusuf, ST, M.Si, Unhas/MPRG;
4. Cora Mustika, A.Pi, M.Si, Dit. KKHL, Penilai;
5. Tasrif Kartawijaya, S.Pi, M.Si, Penilai/Praktisi Konservasi;
6. Makmur, S.Pi, APJK Muda, Dit. KKHL;
7. Munandar Jakasukmana, S.Pi, M.Si, BPSPL Makassar;
8. Aron A. Pananrang, CDK Pangkep
9. Tenri AR, CDK-Pangkep;
10. Astuty Abuyahya, DKP Sulawesi Selatan;
11. Ilham, S. Kel, BKKPN Kupang;
12. Gita Lestari, S.Kel, BKKPN Kupang;
13. Rosliawati Arfah, DKP Sulawesi Selatan;
14. A. Dhani Dahlan, DKP Sulawesi Selatan;
15. M. Zuhrizal AM, YEKHALI;
16. Rusman, S.Pi, DKP Sulawesi Barat;
17. Ratna Mutu Manikam, PELP Ahli Muda;
18. Frayanti S. Lestari, PELP Ahli Pertama;
19. Prajawati DKP Sulawesi Barat;
20. Qadarisma, DKP Sulawesi Barat;
21. Dimas Wahyu A, PELP Ahli Pertama, BPSPL Makassar;
22. Muh. Alwi Tahir, S.H, M.H PELP Muda, BPSPL Makassar;
23. Muhammad Sultan, SCF;
24. Awaluddin, YRC Indonesia;
25. Muh. Khaerani Adnan, Poltek AUP Jakarta;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

27 September 2023

Tim Penilai Kelompok VIII,



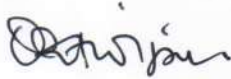
Cora Mustika, A.Pi, M.Si

Koordinator Wilker Kepulauan Kapoposang dan
laut sekitarnya, BKKPN Kupang



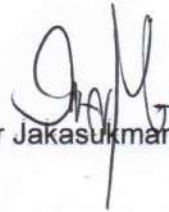
Ilham, S.Kel

Tim Penilai Kelompok VIII,



Tasrif Kartawijaya, S.Pi, M.Si

BPSPL Makassar,



Munandar Jakasukmana, S.Pi, M.Si

APJK Ahli Muda,



Makmur, S.Pi

Universitas Hasanuddin/MPRG



Dr. Syafyudin Yusuf, ST, M.Si,

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA DAN SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023), telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku.

Penilaian dilakukan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Raden Tomi Supratomo
Anggota : 1) Muhammad Erdi Lazuardi
 : 2) Rahma Tri Benita
Sekertariat : Pertiwi Aprianty

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Catur Iswayudi
Jabatan : PELP Ahli Pertama BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Skor Penilaian Kriteria Input	: 73%
2. Skor Penilaian Kriteria Proses	: 88%
3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i>	: 64%
4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i>	: 57%
Jumlah Skor Penilaian	: 73,78%

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku dinyatakan pada tahun 2022 mempunyai nilai akhir **73,78%** dengan status **Dikelola Optimum**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka input peta kawasan konservasi ke dalam peta alur pelayaran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi;
3. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan kawasan konservasi;
4. Meningkatkan pendampingan, penyadartahuan dan penjangkauan masyarakat di kawasan konservasi;
5. Menginisiasi dan meningkatkan jejaring kemitraan pengelolaan kawasan konservasi;
6. Meningkatkan pengawasan kawasan konservasi;
7. Melakukan perencanaan kegiatan terkait peningkatan output dan outcome efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Ambon, 10 Agustus 2023

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok VII,



Raden Tomi Supratomo

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku,



Erawan Asikin

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Muhammad Erdi Lazuardi



Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang,

Imam Fauzi

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Rahma Tri Benita

Project Leader IBAS
Yayasan WWF Indonesia



Andreas Hero Ohoiulun

PELP Ahli Pertama LPSPL Sorong



Wiwit Handayani

CTC Maluku Portofolio Manager



Purwanto

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA DAN SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023), telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Raden Tomi Supratomo, Tim Penilai;
2. Muhammad Erdi Lazuardi, Tim Penilai;
3. Rahma Tri Benita, Tim Penilai;
4. Pertiwi Aprianty, Tim Sekretariat;
5. Erawan Asikin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
6. Thommy Bella, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
7. Saifullah Marasabessy, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
8. Muhammad Assagaf, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
9. Eugene Wenno, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
10. Peter Hetharia, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
11. Dina Wlointery, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XII Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
12. Merlies Alik, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
13. Moch Agus Riadyka, LPSPL Sorong Ditjen PKRL KKP;
14. Cahyo Widodo, Yayasan Baileo Maluku;
15. Catur Iswayudi, BKKPN Kupang Satker Banda, Ditjen PKRL KKP;
16. Respaty Yudha Putranto, BKKPN Kupang Satker Dobo, Ditjen PKRL KKP;
17. Fitria Karepesina, Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
18. Meiske Da Costa, Kepala Seksi Kelautan, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau II, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
19. M. Effendy Sadjid, Stasiun PSDKP Ambon;
20. Juanita Sopaheluwakan, Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku;
21. Wiwit Handayani, LPSPL Sorong, Ditjen PKRL KKP;
22. Eryln Manuel, KTU Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
23. Zachler James Papilaya, Kepala Seksi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau IV, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
24. Andreas Hero Ohoiulun, Yayasan WWF Indonesia;
25. Purwanto, *Coral Triangle Center (CTC)*;
26. Kasman, *Coral Triangle Center (CTC)*;
27. La Ode Junaidin, *Coral Triangle Center (CTC)*;
28. Ursula Tuhuteru, *Coral Triangle Center (CTC)*;
29. Gerald Istia, *Coral Triangle Center (CTC)*;
30. Riki S. Latuconsina, Kepala Seksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan

- Perikanan Gugus Pulau II, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
31. Leonora G. Renoat, Cabang Dinas Gugus Pulau IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 32. Asura Rumanama, Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku;
 33. Rolita C. Watkaat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 34. Helmy Patty, Cabang Dinas Gugus Pulau VII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 35. Abdurachman Sagfan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 36. Yudi O. Lewantaur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 37. Selfrida M. Horhoruw, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 38. Ray Purnama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati untuk melakukan koordinasi dalam rangka input peta kawasan konservasi ke dalam peta alur pelayaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Ambon, 10 Agustus 2023

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok VII,



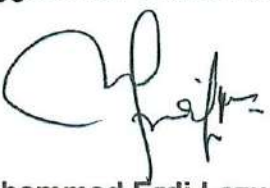
Raden Tomi Supratomo

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku,



Erawan Asikin

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Muhammad Erdi Lazuardi

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang,

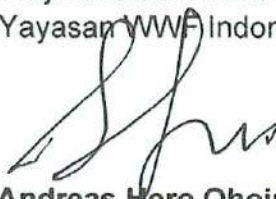


Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Rahma Tri Benita

Project Leader IBAS
Yayasan WWF Indonesia



Andreas Hero Ohoiulun

PELP Ahli Pertama LPSPL Sorong



Wiwit Handayani

CTC Maluku Portofolio Manager



Purwanto

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN PADAIDO
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun 2023 bertempat di kantor BKKPN Kupang telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. M. Ramli Firman, BKKPN Kupang
2. Agustiny E. Parinsi, BKKPN Kupang
3. Wiyudha Pandu Laksana, BKKPN Kupang
4. Thri Heni U. R., BKKPN Kupang
5. Muhammad Hilmi, BKKPN Kupang
6. Ikrima Avicenna, BKKPN Kupang
7. Andri Yudistira, BKKPN Kupang
8. Rafella Dorcas Dyah Magdhalena, BKKPN Kupang
9. Ade Irmalia Harifa, BKKPN Kupang
10. Maria Goreti Ladha, BKKPN Kupang
11. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo, BKKPN Kupang
12. Riyan Afif Al Ihsan, BKKPN Kupang
13. Ika Rakhmad Satria, BKKPN Kupang
14. Amos M. Ponggalo, BKKPN Kupang
15. Suhaidi, BKKPN Kupang
16. Windu Merdekawati, BKKPN Kupang
17. Aji Nugroho, BKKPN Kupang
18. Setiawan Mangando, BKKPN Kupang
19. Leni Maretta Sitinjak, BKKPN Kupang
20. Ika Nur Afifah, BPSPL Denpasar
21. Irwan Fakhry, Sekretariat Jenderal (Tim Penilai)
22. Abdi Tunggal Priyanto, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Tim Penilai)
23. Hesti Widodo, Coral Triangle Center (Tim Penilai)
24. Rusdatus Sholihah, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
25. Fredik Ngili, YAPEKA

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada kriteria INPUT, terdapat peningkatan indikator Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana dan Prasarana dari tahun sebelumnya;
2. Pada kriteria PROSES, tidak terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya;
3. Pada kriteria OUTPUT, terdapat penurunan indikator Pengetahuan Masyarakat dari tahun sebelumnya;
4. Pada kriteria OUTCOME, terdapat peningkatan indikator Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona Inti, dan Partisipasi Masyarakat dari tahun sebelumnya dan penurunan indikator Kondisi Masyarakat Penerima Manfaat dari tahun sebelumnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

14 September 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM., M.Res

Koordinator KK Kep. Padaido
BKKPN Kupang,



Setiawan Mangando, S.Kel

PELP Madya
BKKPN Kupang,



Agustiny E. Parinsi

Koordinator NTT
YAPEKA,



Fredik Ngili

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN PADAIDO
DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan September, tahun 2023 bertempat di kantor BKKPN Kupang telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua.

Penilaian dilakukan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM, M.Res

Anggota : 1. Irwan Fakhry, S.Pi

2. Abdi Tunggal Priyanto, S.Si, MT, M.Sc, Ph.D

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Setiawan Mangando, S.Kel

Jabatan : Koordinator Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido, BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 970 dari total skor 1075 (90%) |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 370 dari total skor 430 (86%) |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 525 dari total skor 650 (81%) |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 475 dari total skor 625 (76%) |
| Jumlah Skor Penilaian | : 2340 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya dinyatakan pada tahun 2022 mempunyai nilai akhir **84,27%** dengan status **PERAK (Dikelola Optimum)**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, yaitu:

1. Menyusun laporan/matriks perencanaan dan laporan tahunan yang memenuhi kebutuhan penilaian EVIKA;
2. Melengkapi kuantitas dan ukuran tangkap ikan dalam satu laporan;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola;
4. Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

14 September 2023

Ketua Tim Penilai Kelompok V,



Dr. Hesti Widodo, S.Pi, MM., M.Res

Koordinator KK Kep. Padaido
BKKPN Kupang



Setiawan Mangando, S.Kel

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA AMPAT
DAN LAUT SEKITARNYA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2023 telah dilakukan verifikasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi. (Kordinator Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang).
2. Andri Kurniawan, S. Pi (PELP Pertama, Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang)
3. Ferdial Ballamu, S.Si (Ketua Yayasan Penyu Papua)
4. Abner Basna, S.P, M.Si (Pelaksana, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua Barat Daya)
5. Nugraha Maulana Arsyad., S.Kel (Monitoring & GIS Officer, Yayasan Konservasi Indonesia)
6. Ayub, S.Pi (Manager Operasional, Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi)
7. Awaludinnoer Ahmad (BHS Program Koordinator YKAN)
8. Tri Kurnia (Ketua Yayasan Nazaret Papua Barat)
9. Eddy Sahputra (BHS Regional Manager USAID Kolektif)
10. Dariani Matualage, S.Si, M.Si (LPPM UNIPA)
11. Prehadi, S.I.K (Fungsional PELP Pertama, Loka PSPL Sorong)
12. Enggar Sadtopo, ST, MT (Ketua Tim Penilai)
13. Defy Nataniel Pada, S.Kel (Anggota Tim Penilai)
14. Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si (Anggota Tim Penilai)
15. Teguh Satria Gunawan, ST, MGIS (Sekretariat Tim Penilai EVIKA, Dit KKHL)

Berdasarkan pertemuan verifikasi pada tanggal 30 Agustus 2023 hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Zonasi dan Rencana Pengelolaan sudah sesuai dengan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Publikasi Peta Kawasan Konservasi sudah dilakukan pada Peta Laut Pushidros AL
3. Sarana dan prasarana kantor dan sarana informasi kondisinya cukup, sementara untuk sarana pengelolaan statusnya sudah lengkap.
4. SOP pengelolaan kawasan konservasi sudah lengkap.
5. Pengawasan dan patrol dilakukan minimal satu kali dalam setiap bulan.
6. Program penjangkauan dilakukan secara efektif dan terencana sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
7. Perjanjian kemitraan yang terdaftar baru dilakukan dengan kelompok masyarakat.
8. Pemantauan target konservasi sudah dilakukan secara berkala.
9. Sudah dilakukan pelayanan pemanfaatan dan perizinan di kawasan konservasi.
10. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat sudah dilakukan kepada sebagian besar kelompok masyarakat yang terdaftar.
11. Pemanfaatan pariwisata sudah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
12. Jumlah acaman menurun lebih dari 50% dibandingkan dengan kondisi baseline.
13. Materi penjangkauan sudah tersedia lebih dari 75% dari perencanaan penjangkauan.
14. Sudah dilakukan kegiatan monitoring terhadap persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan konservasi dalam laporan sosial ekonomi.
15. Data dan informasi tata kelola, biofisik dan sosial ekonomi sudah tersedia termutakhirkan. Selain itu, data biofisik dan sosial ekonomi dirujuk dalam laporan penelitian.
16. Sudah dilakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi target konservasi dan zona inti.

17. Tim penilai melakukan penilaian dengan menggunakan data dan dokumen tahun 2022, dari hasil penilaian tersebut, hasil akhir nilai EVIKA Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Daya naik dari **81,24** menjadi **86,76**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

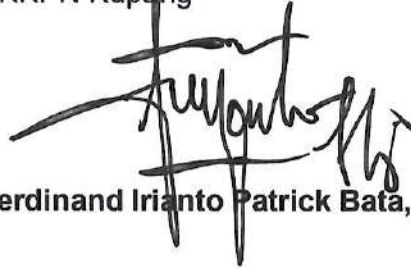
Sorong, 30 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai EVIKA



Enggar Sadtopo, ST, MT

Kordinator Satker Raja Ampat,
BKKPN Kupang



Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi

Tim Penilai EVIKA



Defy Nataniel Pada, S.Kel

PELP Pertama, Satker Raja Ampat, BKKPN
Kupang



Andri Kurniawan, S. Pi

Tim Penilai EVIKA



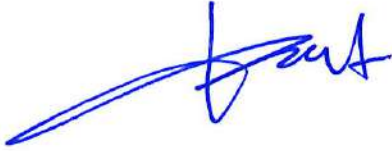
Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si

Ketua Yayasan Penyulu Papua



Ferdiel Ballamu, S.Si

Sekretariat Tim Penilai EVIKA
Dit KKHL



Teguh Satria Gunawan, ST, MGIS

Pelaksanaan Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua
Barat Daya



Abaner Basna, S.Pi, M.Si

Fungsional PELP Pertama,
Loka PSPL Sorong



Prehadi, S.I.K

LPPM UNIPA



Dariani Matualage, S.Si, M.Si

BHS Program Koordinator
YKAN



Awaludinnoer Ahmad

BHS Regional Manager
USAID Kolektif



Eddy Sahputra

Monitoring & GIS Officer,
Yayasan Konservasi Indonesia



Nugraha Maulana Arsyad., S.Kel

Ketua Yayasan Nazaret Papua Barat



Tri Kurnia

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA AMPAT
DAN LAUT SEKITARNYA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2023 telah dilakukan evaluasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan ~~Waigeo Selatan Barat~~ dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Enggar Sadtopo, ST, MT
Anggota : 1. Defy Nataniel Pada, S.Kel
2. Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yang dipimpin oleh:

Nama : Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi
Jabatan : Kordinator Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Skor Penilaian Kriteria Input	: 1010 dari total skor 1075
2. Skor Penilaian Kriteria Proses	: 365 dari total skor 430
3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i>	: 595 dari total skor 650
4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i>	: 445 dari total skor 625
Jumlah Skor Penilaian	: 86,76

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai status: **Emas (dikelola secara berkelanjutan)**.

Rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, yaitu:

Kriteria Input

1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi
2. Melaksanakan percepatan proses hibah lahan dan kantor dari Pemda Kabupaten Raja Ampat kepada KKP untuk melengkapi kebutuhan sarana perkantoran SUOP.
3. Percepatan penetapan Rencana Pengelolaan.
4. Pemutakhiran sarana informasi sesuai dengan nomenlatur Penetapan Keputusan Menteri yang baru.

Kriteria Proses

5. Untuk meningkatkan kegiatan pengawasan secara berkala, SUOP dapat bekerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
6. Melakukan pemutakhiran media informasi.
7. Menyusun tabulasi data laporan pengawasan yang menambahkan informasi tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh SUOP, PSDKP, atau Kelompok Masyarakat.
8. SUOP segera melakukan percepatan PKS dengan UNIPA atau dengan mitra potensial lainnya.

Kriteria Output

9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pemanfaat yang berada dalam kawasan konservasi. Selain itu, mendorong pemanfaat yang sudah memperoleh izin untuk menyampaikan laporan aktivitas pemanfaatannya.
10. Menyusun daya dukung dan daya tampung perikanan dikawasan konservasi.
11. Membuat laporan dan tabulasi data terkait dengan ancaman dikawasan konservasi
12. Melakukan pendataan (tabulasi data) yang terstandarisasi dan mudah dipahami terhadap kegiatan yang melibatkan masyarakat.
13. Mendokumentasikan hasil riset-riset Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya.

Kriteria Outcome

14. Perlu dilakukan monitoring lanjutan terkait dengan kondisi target konservasi dan kondisi zona inti di kawasan konservasi.
15. Penjajakan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan monitoring sosek terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi, lapangan kerja baru disekitar kawasan konservasi, kondisi pendapatan masyarakat di kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Sorong, 30 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai EVIKA



Enggar Sadtopo, ST, MT

Kordinator Satker Raja Ampat,
BKKPN Kupang



Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT
DAN LAUT SEKITARNYA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2023 telah dilakukan verifikasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi. (Kordinator Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang).
2. Andri Kurniawan, S. Pi (PELP Pertama, Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang)
3. Ferdiel Ballamu, S.Si (Ketua Yayasan Penyu Papua)
4. Abner Basna, S.Pi, M.Si (Pelaksana, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua Barat Daya)
5. Nugraha Maulana Arsyad., S.Kel (Monitoring & GIS Officer, Yayasan Konservasi Indonesia)
6. Ayub, S.Pi (Manager Operasional, Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi)
7. Awaludinnoer Ahmad (BHS Program Koordinator YKAN)
8. Tri Kurnia (Ketua Yayasan Nazaret Papua Barat)
9. Eddy Sahputra (BHS Regional Manager USAID Kolektif)
10. Dariani Matualage, S.Si, M.Si (LPPM UNIPA)
11. Prehadi, S.I.K (Fungsional PELP Pertama, Loka PSPL Sorong)
12. Enggar Sadtopo, ST, MT (Ketua Tim Penilai)
13. Defy Nataniel Pada, S.Kel (Anggota Tim Penilai)
14. Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si (Anggota Tim Penilai)
15. Teguh Satria Gunawan, ST, MGIS (Sekretariat Tim Penilai EVIKA, Dit KKHL)

Berdasarkan pertemuan verifikasi pada tanggal 30 Agustus 2023 hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Zonasi dan Rencana Pengelolaan sudah sesuai dengan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Publikasi Peta Kawasan Konservasi sudah dilakukan pada Peta Laut Pushidros AL
3. Sarana dan prasarana kantor dan sarana informasi kondisinya cukup, sementara untuk sarana pengelolaan statusnya sudah lengkap.
4. SOP pengelolaan kawasan konservasi sudah lengkap.
5. Pengawasan dan patroli dilakukan lebih dari satu kali pada setiap bulannya.
6. Program penjangkauan dilakukan secara efektif dan terencana sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi.
7. Perjanjian kemitraan yang terdaftar baru dilakukan dengan kelompok masyarakat.
8. Pemantauan target konservasi sudah dilakukan secara berkala.
9. Sudah dilakukan pelayanan pemanfaatan dan perizinan di kawasan konservasi.
10. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat sudah dilakukan kepada sebagian besar kelompok masyarakat yang terdaftar.
11. Pemanfaatan pariwisata sudah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
12. Jumlah acaman menurun lebih dari 50% dibandingkan dengan kondisi baseline.
13. Materi penjangkauan sudah tersedia lebih dari 75% dari perencanaan penjangkauan.
14. Sudah dilakukan kegiatan monitoring terhadap persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan konservasi dalam laporan sosial ekonomi.
15. Data dan informasi tata kelola, biofisik dan sosial ekonomi sudah tersedia termutakhirkan. Selain itu, data biofisik dirujuk dalam laporan penelitian.
16. Sudah dilakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi target konservasi dan zona inti.

17. Tim penilai melakukan penilaian dengan menggunakan data dan dokumen tahun 2022, dari hasil penilaian tersebut, hasil akhir nilai EVIKA Kawasan Konservasi Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Daya naik dari **74,04** menjadi **84,82**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Sorong, 30 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai EVIKA



Enggar Sadtopo, ST, MT

Kordinator Satker Raja Ampat,
BKKPN Kupang



Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi

Tim Penilai EVIKA



Defy Nataniel Pada, S.Kel

PELP Pertama, Satker Raja Ampat, BKKPN
Kupang



Andri Kurniawan, S. Pi

Tim Penilai EVIKA



Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si

Ketua Yayasan Penyulu Papua



Ferdial Ballamu, S.Si

Sekretariat Tim Penilai EVIKA
Dit KKHL



Teguh Satria Gunawan, ST, MGIS

Pelaksanaan Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua
Barat Daya



Abaner Basna, S.Pi, M.Si

Fungsional PELP Pertama,
Loka PSPL Sorong



Prehadi, S.I.K

LPPM UNIPA



Dariani Matualage, S.Si, M.Si

BHS Program Koordinator
YKAN



Awaludinnoer Ahmad

BHS Regional Manager
USAID Kolektif



Eddy Sahputra

Monitoring & GIS Officer,
Yayasan Konservasi Indonesia



Nugraha Maulana Arsyad., S.Kel

Ketua Yayasan Nazaret Papua Barat



Tri Kurnia

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT
DAN LAUT SEKITARNYA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Pada hari ini Rabu, tanggal 30, bulan Agustus, tahun 2023 telah dilakukan evaluasi terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Enggar Sadtopo, ST, MT

Anggota : 1. Defy Nataniel Pada, S.Kel
2. Mohamad Iqbal, S.IK, M.Si

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yang dipimpin oleh:

Nama : Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi

Jabatan : Kordinator Satker Raja Ampat, BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : 935 dari total skor 1075 |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : 385 dari total skor 430 |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : 560 dari total skor 650 |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : 425 dari total skor 625 |
| Jumlah Skor Penilaian | : 84,82 |

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dinyatakan pada tahun 2023 mempunyai status: **Perak (dikelola secara optimum)**.

Rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, yaitu:

Kriteria Input

1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi
2. Melaksanakan percepatan proses hibah lahan dan kantor dari Pemda Kabupaten Raja Ampat kepada KKP untuk melengkapi kebutuhan sarana perkantoran SUOP.
3. Percepatan penetapan Rencana Pengelolaan.
4. Pemutakhiran sarana informasi sesuai dengan nomenklatur Penetapan Keputusan Menteri yang baru.

Kriteria Proses

5. Untuk meningkatkan kegiatan pengawasan secara berkala, SUOP dapat bekerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
6. Melakukan pemutakhiran media informasi.
7. Menyusun tabulasi data laporan pengawasan yang menambahkan informasi tindak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh SUOP, PSDKP, atau Kelompok Masyarakat.
8. SUOP segera melakukan percepatan PKS dengan UNIPA atau dengan mitra potensial lainnya.

Kriteria Output

9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pemanfaat yang berada dalam kawasan konservasi. Selain itu, mendorong pemanfaat yang sudah memperoleh izin untuk menyampaikan laporan aktivitas pemanfaatannya.
10. Menyusun daya dukung dan daya tampung perikanan dikawasan konservasi.
11. Membuat laporan dan tabulasi data terkait dengan ancaman dikawasan konservasi
12. Melakukan pendataan (tabulasi data) yang terstandarisasi dan mudah dipahami terhadap kegiatan yang melibatkan masyarakat.
13. Mendokumentasikan hasil riset-riset Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya.

Kriteria Outcome

14. Perlu dilakukan monitoring lanjutan terkait dengan kondisi target konservasi dan kondisi zona inti di kawasan konservasi.
15. Penjajakan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan monitoring sosek terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi, lapangan kerja baru disekitar kawasan konservasi, kondisi pendapatan masyarakat di kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Sorong, 30 Agustus 2023

Ketua Tim Penilai EVIKA



Enggar Sadtopo, ST, MT

Kordinator Satker Raja Ampat,
BKKPN Kupang



Ferdinand Irianto Patrick Bata, A.Md., S.Pi

**BERITA ACARA EVALUASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN
TENGGERA DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023), telah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku.

Penilaian dilakukan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua : Raden Tomi Supratomo
Anggota : 1) Muhammad Erdi Lazuardi
 : 2) Rahma Tri Benita
Sekertariat : Pertiwi Aprianty

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama : Respaty Yudha Putranto
Jabatan : Analis Konservasi Kawasan BKKPN Kupang

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

1. Skor Penilaian Kriteria Input	: 70%
2. Skor Penilaian Kriteria Proses	: 86%
3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i>	: 68%
4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i>	: 51%
Jumlah Skor Penilaian	: 72,47%

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku dinyatakan pada tahun 2022 mempunyai nilai akhir **72,47%** dengan status **Dikelola Optimum**. Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka input peta kawasan konservasi ke dalam peta alur pelayaran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi;
3. Meningkatkan jumlah SDM dan kompetensi pengelolaan kawasan konservasi;
4. Meningkatkan pendampingan, penyadartahuan dan penjangkauan masyarakat di kawasan konservasi;
5. Menginisiasi dan meningkatkan jejaring kemitraan pengelolaan kawasan konservasi;
6. Melaksanakan monitoring biofisik, sosial dan ekonomi kawasan konservasi;
7. Meningkatkan pengawasan kawasan konservasi;
8. Melakukan perencanaan kegiatan terkait peningkatan output dan outcome efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Ambon, 10 Agustus 2023

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok VII,



Raden Tomi Supratomo

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku,



Erawan Asikin

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Muhammad Erdi Lazuardi

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang,



Imam Fauzi

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Rahma Tri Benita

PELP Ahli Pertama LPSPL Sorong



Wiwit Handayani

Project Leader IBAS
Yayasan WWF Indonesia



Andreas Hero Ohoiulun

CTC Maluku Portofolio Manager



Purwanto

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN
TENGGERA DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023), telah dilakukan verifikasi terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku.

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Raden Tomi Supratomo, Tim Penilai;
2. Muhammad Erdi Lazuardi, Tim Penilai;
3. Rahma Tri Benita, Tim Penilai;
4. Pertiwi Aprianty, Tim Sekretariat;
5. Erawan Asikin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
6. Thommy Bella, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
7. Saifullah Marasabessy, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
8. Muhammad Assagaf, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
9. Eugene Wenno, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
10. Peter Hetharia, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
11. Dina Wlointery, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau XII Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
12. Merlies Alik, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VIII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
13. Moch Agus Riadyka, LPSPL Sorong Ditjen PKRL KKP;
14. Cahyo Widodo, Yayasan Baileo Maluku;
15. Catur Iswayudi, BKKPN Kupang Satker Banda, Ditjen PKRL KKP;
16. Respaty Yudha Putranto, BKKPN Kupang Satker Dobo, Ditjen PKRL KKP;
17. Fitria Karepesina, Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
18. Meiske Da Costa, Kepala Seksi Kelautan, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau II, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
19. M. Effendy Sadjid, Stasiun PSDKP Ambon;
20. Juanita Sopaheluwakan, Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku;
21. Wiwit Handayani, LPSPL Sorong, Ditjen PKRL KKP;
22. Erlyn Manuel, KTU Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
23. Zachler James Papilaya, Kepala Seksi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau IV, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
24. Andreas Hero Ohoiulun, Yayasan WWF Indonesia;
25. Purwanto, *Coral Triangle Center (CTC)*;
26. Kasman, *Coral Triangle Center (CTC)*;
27. La Ode Junaidin, *Coral Triangle Center (CTC)*;
28. Ursula Tuhuteru, *Coral Triangle Center (CTC)*;
29. Gerald Istia, *Coral Triangle Center (CTC)*;

30. Riki S. Latuconsina, Kepala Seksi Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau II, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
31. Leonora G. Renoat, Cabang Dinas Gugus Pulau IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
32. Asura Rumanama, Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku;
33. Rolita C. Watkaat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
34. Helmy Patty, Cabang Dinas Gugus Pulau VII, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
35. Abdurachman Sagfan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
36. Yudi O. Lewantaur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
37. Selfrida M. Horhoruw, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
38. Ray Purnama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati untuk melakukan koordinasi dalam rangka input peta kawasan konservasi ke dalam peta alur pelayaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Ambon, 10 Agustus 2023

Ditandatangani oleh para pihak:

Ketua Tim Penilai Kelompok VII,



Raden Tomi Supratomo

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Maluku,



Erawan Asikin

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Muhammad Erdi Lazuardi

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang,



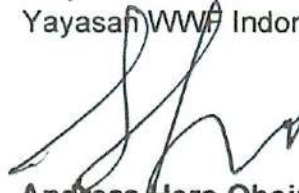
Imam Fauzi

Anggota Tim Penilai Kelompok VII



Rahma Tri Benita

Project Leader IBAS
Yayasan WWF Indonesia



Andreas Hero Ohoiulun

PELP Ahli Pertama LPSPL Sorong



Wiwit Handayani

CTC Maluku Portofolio Center



Purwanto

Lampiran 4



Penyampaian Draft
Jejaring Konservasi

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

MEMORANDUM

Nomor:

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja – Kerja Sama dan Data Informasi BKKPN Kupang
Perihal : Laporan Pelaksanaan Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan indikator kinerja utama Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Output capaian sampai dengan TW IV, BKKPN Kupang telah menyelesaikan inisiasi Jejaring Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kemitraan konservasi dengan 3 (tiga) mitra konservasi, yaitu: 1). Universitas Banda Naira; 2). Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI); 3). Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI); ketiganya telah dilakukan penandatanganan pada TW III tepatnya di bulan Agustus 2023, sedangkan untuk dokumen Jejaring Konservasi Provinsi NTT rencana akan dilakukan penandatanganan pada tahun 2024.
2. Finalisasi dokumen Jejaring Konservasi di Provinsi NTT dilakukan pada TW IV tepatnya di tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Hotel Aston Kupang, dan dihadiri oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit.KKHL), Pemerintah Provinsi NTT serta NGO (YKAN, YAPEKA) di Hotel Aston, Kota Kupang. Dokumen final hasil pembahasan tersebut telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan & Ruang Laut dan Direktorat KKHL melalui surat Nomor B.3599/BKKPN/KS.320/X/2023 pada tanggal 19 Oktober 2023, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan & Ruang Laut melalui surat Nomor B.4085/BKKPN/PRL.440/XII/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 (dokumen terlampir).

3. Pada TW IV dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kemitraan bersama mitra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 31 Oktober 2023 di Hotel Grand Zurich, Yogyakarta.
4. Capaian target indikator kinerja utama Jejaring Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023 telah terealisasi sesuai target yaitu 1 (satu) dokumen Nota Kesepakatan Bersama Jejaring Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Capaian target indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang diinisiasi dan/atau dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023 telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 3 (tiga) dokumen Perjanjian Kemitraan dari 1 (satu) target dokumen Perjanjian Kemitraan.

Detil dokumen dapat dilihat pada linktree berikut: <https://linktr.ee/jejakkompak>

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam penghitungan capaian target indikator kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama dan Data Informasi



Martanina, S.St.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.4085/BKKPN/PRL.440/XII/2023 18 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyampaian *Draft* Dokumen Jejaring Pengelolaan
Kawasan Konservasi Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di
Jakarta

Dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan diperlukan adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait, salah satunya dengan Pemerintah Daerah setempat melalui skema Jejaring. Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.

Pada T.A 2023 BKKPN Kupang telah melakukan serangkaian upaya finalisasi Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana uraian berikut:

1. Pertemuan antara BKKPN Kupang (Koordinator TNP Laut Sawu) dan KCD Alor, pada tanggal 21 Juni 2023 di Kantor BKKPN Kupang.
2. Pertemuan antara BKKPN Kupang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dalam rangka pembahasan finalisasi dokumen Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Provinsi NTT, pada tanggal 22 September 2023 di Kantor BKKPN Kupang.
3. Pertemuan pada tanggal 6 Oktober 2023 yang berlangsung secara daring via Zoom, untuk mengkonfirmasi perubahan dokumen yang sebelumnya telah dibahas secara internal oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada tanggal 25 September 2023.
4. Pertemuan antara Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, BKKPN Kupang dengan Pemerintah Provinsi NTT dan juga melibatkan LSM terkait, pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Aston, Kota Kupang dalam rangka finalisasi dokumen Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi Provinsi NTT (sebagaimana terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menindaklanjuti *draft* dokumen Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mohon Bapak dapat memberikan arahan terhadap *draft* dokumen tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut - DJPKRL



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG
LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga (...-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. VICTOR GUSTAAF MANOPPO** : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. AYODHIA G. L. KALAKE : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 52 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa ekosistem di Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 4 (empat) Kawasan Konservasi Daerah yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan baik secara bio-fisik, maupun sosial-ekonomi sehingga perlu dikelola secara terintegrasi guna meningkatkan fungsi kawasan tersebut.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang dilakukan jejaring pengelolaan Kawasan konservasi adalah adanya keterkaitan dan ketergantungan ekosistem dan biota secara biofisik maupun sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jejaring kawasan konservasi perairan merupakan kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan/atau tata kelola untuk mencapai tujuan konservasi

yang tidak dapat dipenuhi melalui pengelolaan Kawasan Konservasi secara individu. Jejaring Kawasan Konservasi mampu meningkatkan daya tahan dan daya lenting Kawasan Konservasi terhadap dampak pemanasan global, menyebar risiko (*spreading risk*) manakala ada gangguan lokal, mengurangi kegagalan pengelolaan, dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan/atau perbaikan perikanan, serta meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim global.

Pembentukan jejaring antara Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dalam bentuk jejaring guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sinergitas perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

OBJEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi jejaring pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

- a. Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu; dan
- b. Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 1. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi;
- b. peningkatan kepedulian dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan;
- c. pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. menyiapkan bahan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi nasional;

- b. melakukan pendampingan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Monitoring Biota Laut Dilindungi dan Penanganan Biota Laut Terdampar;
- c. melaksanakan pemantauan terpadu biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi di Kawasan Konservasi;
- d. melakukan pertukaran data dan informasi biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi;
- e. menyusun Database Informasi Geografis Tematik Biota Laut Dilindungi dan Spesies Bermigrasi;
- f. melaksanakan kegiatan Pendidikan Konservasi (*Conservation Goes to School*) (berbagi-bahan paparan dan narasumber);
- g. menginformasikan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;
- h. memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- i. melakukan pertukaran data dan informasi kondisi 3 ekosistem prioritas yakni Terumbu karang, Lamun, dan Mangrove;
- j. melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Monitoring Sumber Daya Kawasan;
- k. memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengembangan melalui *center of excellence* (Pusat Unggulan Pembelajaran Terpadu) Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
- l. memberikan dukungan SDM dan kelengkapan sarana dalam melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem; dan
- m. melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. menyiapkan bahan pemangkuan, dan pemanfaatan kawasan konservasi daerah;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Monitoring Biota Laut Dilindungi dan Penanganan Biota Laut Terdampar di dalam

- Kawasan Konservasi Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan terpadu biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi di Kawasan Konservasi Daerah;
 - d. melakukan pertukaran data dan informasi biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi;
 - e. menyusun Basis Data Informasi Geografis Tematik Biota Laut Dilindungi dan Spesies Bermigrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan Pendidikan Konservasi (*Conservation Goes to School*) melalui Kegiatan KCDKP Mengajar (Sharing bahan paparan dan Narasumber);
 - g. menginformasikan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;
 - h. menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - i. pertukaran data dan informasi kondisi 3 ekosistem prioritas: Terumbu karang, Lamun, dan Mangrove;
 - j. memperoleh Bimbingan Teknis/Pelatihan Monitoring Sumber Daya Kawasan;
 - k. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan melalui *center of excellence* (Pusat Unggulan Pembelajaran Terpadu) Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
 - l. melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem; dan
 - m. memberikan dukungan Sumber Daya Manusia dan kelengkapan sarana dalam melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis **PIHAK KESATU**

menunjuk Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Pengakhiran lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing – masing **PIHAK** yang merupakan hasil dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi milik masing – masing **PIHAK**;
- (2) Penggunaan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepakatan ini wajib atas sepengetahuan **PARA PIHAK** dan mencantumkan sumber serta logo **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur serta tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang – undangan nasional dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib.

- (3) Bila terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau membebaskan tugas dan tanggungjawab masing – masing untuk sementara waktu.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara daring/luring yang dialamatkan kepada :
- a. **PIHAK KESATU** : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut)
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Email : humas.prl@kkp.go.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Pemerintahan Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT)
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang
Email : dkpprov.ntt@gmail.com
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah dan/atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.

- (3) Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan/atau ditambahkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

AYODHIA G. L. KALAKE

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN**NOMOR:****NOMOR:****RENCANA KERJA TAHUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi	Penyusunan SOP Prioritas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi (KK)TNP Laut Sawu 2. SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; 3. SUOP KK Taman Perairan Flores Timur 4. SUOP KK Taman Perairan Lembata 5. SUOP KK Taman Perairan Sikka	Tersusunnya SOP Prioritas tentang Pengelolaan Spesies bermigrasi	1 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	1. BKKPN Kupang, selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah.	
		Pemantauan terpadu biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi di Kawasan Konservasi	Biota laut Dilindungi dan spesies bermigrasi di KK TNP Laut Sawu, KK Taman Perairan Kepulauan Alor; KK Taman Perairan Flores Timur, KK Taman Perairan Lembata dan KK Taman Perairan Sikka	Tersedianya laporan pemantauan terpadu biota laut dilindungi dan spesies terancam punah di kawasan konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT	1 lap	1 lap	1 lap	1lap	1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah.	
		Pelaksanaan Pertukaran data dan informasi biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi	Data dan Informasi Biota laut Dilindungi dan spesies bermigrasi di KK TNP Laut Sawu, KK Taman Perairan Kepulauan Alor; KK Taman Perairan Flores Timur, KK Taman Perairan Lembata dan KK Taman Perairan Sikka	Tersedianya laporan data dan Informasi Biota Laut Dilindungi dan spesies bermigrasi di kawasan konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kawasan Konservasi Daerah	
		Penyusunan Database Informasi Geografis Tematik Biota Laut Dilindungi dan Spesies Bermigrasi	<ol style="list-style-type: none"> SUOP KK TNP Laut Sawu SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; SUOP KK Taman Perairan Flores Timur SUOP KK Taman Perairan Lembata SUOP KK Taman Perairan Sikka 	Tersedianya 1 (satu) database sebaran biota laut dilindungi dan spesies bermigrasi di kawasan konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT	-	1 Database	-	-	<ol style="list-style-type: none"> BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah TT 	APBN / APBD
2	Peningkatan kepedulian masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan	Pendidikan Konservasi / <i>Conservation Goes To School</i> / KCDKP Mengajar melalui Sharing	Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi TNP Laut	Jumlah Siswa/ Siswi pada Lembaga Pendidikan di sekitar kawasan konservasi	500 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	<ol style="list-style-type: none"> BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu Dinas Kelautan 	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		bahan paparan dan Narasumber	Sawu, KK Taman Perairan Kepulauan Alor; KK Taman Perairan Flores Timur, KK Taman Perairan Lembata dan KK Taman Perairan Sikka	perairan TNP Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT mengetahui tentang Kawasan Konservasi Perairan					dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	
		Sharing Informasi dan Publikasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi NTT	1. Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT; 2. Pelaku Usaha dan Pemanfaat Kawasan		2 Publikasi	6 Publikasi	6 Publikasi	6 Publikasi	1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Konservasi TNP Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT; 3. Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan						Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	
3.	Pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya	Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT	1. SUOP KK TNP Laut Sawu 2. SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; 3. SUOP KK Taman Perairan Flores Timur 4. SUOP KK Taman Perairan Lembata 5. SUOP KK Taman Perairan Sikka	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah: 1. Taman Perairan Kepulauan Alor; 2. Taman Perairan Flores Timur	1 dok	3 dok	-	-	1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				3. Taman Perairan Lembata 4. Taman Perairan Sikka					dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	
		Pertukaran data dan informasi kondisi 3 ekosistem prioritas: Terumbu karang, Lamun, dan Mangrove	Data dan Informasi kondisi ekosistem Terumbu karang, Lamun, dan Mangrove di KK TNP Laut Sawu, KK Taman Perairan Kepulauan Alor; KK Taman Perairan Flores Timur, KK Taman Perairan Lembata dan KK Taman Perairan Sikka	Tersedianya laporan data dan informasi kondisi ekosistem Terumbu karang, Lamun, dan Mangrove di kawasan konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan Monitoring Sumber Daya Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUOP KK TNP Laut Sawu 2. SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; 3. SUOP KK Taman Perairan Flores Timur 4. SUOP KK Taman Perairan Lembata 5. SUOP KK Taman Perairan Sikka 	Tersedianya SDM SUOP yang memiliki kemampuan melakukan Monitoring Sumber Daya Kawasan Konservasi	-	5 orang	5 orang	5 orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan 	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	
		Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan melalui <i>center of excellence</i> (Pusat Unggulan Pembelajaran Terpadu) Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor	<ol style="list-style-type: none"> SUOP KK TNP Laut Sawu SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; SUOP KK Taman Perairan Flores Timur SUOP KK Taman Perairan Lembata SUOP KK Taman Perairan Sikka 	Tersedianya SDM SUOP yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan melalui <i>center of excellence</i> (Pusat Unggulan Pembelajaran Terpadu)	-	5 orang	5 orang	5 orang	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	APBN / APBD
		Dukungan SDM dan kelengkapan sarana dalam pelaksanaan Monitoring Habitat dan Ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> SUOP KK TNP Laut Sawu SUOP KK Taman Perairan Kepulauan Alor; SUOP KK Taman Perairan Flores Timur 	Tersedianya SDM dan kelengkapan sarana dalam melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem	-	5 orang serta sarana	5 orang serta sarana	5 orang serta sarana	<ol style="list-style-type: none"> BKKPN Provinsi NTT Selaku SUOP TNP Laut Sawu Dinas Kelautan dan 	APBN / APBD

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				PELAKSANA	PEMBIAYAAN
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			4. SUOP KK Taman Perairan Lembata 5. SUOP KK Taman Perairan Sikka	yang dilaksanakan di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT					Perikanan Provinsi NTT melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Alor, Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Lembata, Flores Timur, dan Sikka selaku SUOP Kawasan Konservasi Daerah	

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

AYODHIA G. L. KALAKE

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

DRAFT

Lampiran 5



Penyampaian Draft
Kemitraan Konservasi

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

MEMORANDUM

Nomor:

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja – Kerja Sama dan Data Informasi BKKPN Kupang
Perihal : Laporan Pelaksanaan Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan indikator kinerja utama Inisiasi Jejaring dan/atau Kemitraan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang TW IV Tahun 2023, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Output capaian sampai dengan TW IV, BKKPN Kupang telah menyelesaikan inisiasi Jejaring Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kemitraan konservasi dengan 3 (tiga) mitra konservasi, yaitu: 1). Universitas Banda Naira; 2). Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI); 3). Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI); ketiganya telah dilakukan penandatanganan pada TW III tepatnya di bulan Agustus 2023, sedangkan untuk dokumen Jejaring Konservasi Provinsi NTT rencana akan dilakukan penandatanganan pada tahun 2024.
2. Finalisasi dokumen Jejaring Konservasi di Provinsi NTT dilakukan pada TW IV tepatnya di tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Hotel Aston Kupang, dan dihadiri oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit.KKHL), Pemerintah Provinsi NTT serta NGO (YKAN, YAPEKA) di Hotel Aston, Kota Kupang. Dokumen final hasil pembahasan tersebut telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan & Ruang Laut dan Direktorat KKHL melalui surat Nomor B.3599/BKKPN/KS.320/X/2023 pada tanggal 19 Oktober 2023, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian dokumen kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan & Ruang Laut melalui surat Nomor B.4085/BKKPN/PRL.440/XII/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 (dokumen terlampir).

3. Pada TW IV dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kemitraan bersama mitra Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman dan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 31 Oktober 2023 di Hotel Grand Zurich, Yogyakarta.
4. Capaian target indikator kinerja utama Jejaring Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023 telah terealisasi sesuai target yaitu 1 (satu) dokumen Nota Kesepakatan Bersama Jejaring Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Capaian target indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang diinisiasi dan/atau dievaluasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2023 telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 3 (tiga) dokumen Perjanjian Kemitraan dari 1 (satu) target dokumen Perjanjian Kemitraan.

Detil dokumen dapat dilihat pada linktree berikut: <https://linktr.ee/jejakkompak>

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam penghitungan capaian target indikator kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama dan Data Informasi



Martanina, S.St.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1245/BKKPN/KS.320/IV/2023 3 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan
BKKPN Kupang dengan UNiversitas Banda Naira

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP RI
di-
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pembahasan akhir penyusunan kemitraan antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dengan Universitas Banda Naira (UBN) pada tanggal 31 Maret 2023 melalui *virtual zoom meeting*, maka bersama ini kami sampaikan *draft final* dokumen perjanjian kerja sama dimaksud sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mohon kiranya bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dapat memberikan arahan tindak lanjut atas *draft final* perjanjian kerja sama yang telah disusun tersebut.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas arahan yang diberikan.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekertaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2581/BKKPN/HK.320/VII/2023 31 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian *Draft* Perjanjian Kemitraan BKKPN
Kupang dengan Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI)

Yth. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
di-
Jakarta

Dalam rangka peningkatan kerja sama/kemitraan di wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang khususnya di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, bersama ini kami menyampaikan bahwa telah dilakukan inisiasi kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI). Pihak yang terlibat dalam kemitraan ini telah melakukan pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan, yang dalam hal ini juga melibatkan perwakilan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menindaklanjuti finalisasi Perjanjian Kemitraan, mohon Bapak dapat memberikan arahan/persetujuan terhadap *draft* dokumen berdasarkan hasil pembahasan via daring (*Zoom meeting*) yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Imam Fauzi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2453/BKKPN/HK.320/VII/2023 14 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Hal : Penyampaian *Draft* Perjanjian Kemitraan BKKPN
Kupang dengan Universitas Banda Naira dan Yayasan
Alam Indonesia Lestari (LINI)

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
di-
Jakarta

Dalam rangka peningkatan kerja sama/kemitraan di wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, kami sampaikan bahwa telah dilakukan inisiasi kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Universitas Banda Naira (UBN) dan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI). Pihak yang terlibat dalam kemitraan ini telah melakukan pembahasan terkait rencana kemitraan tersebut dan menuangkannya dalam *draft* Perjanjian Kemitraan, yang dalam hal ini juga melibatkan perwakilan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kerja sama yang dilaksanakan melalui kemitraan ini merupakan wujud pengelolaan kolaboratif konservasi perairan nasional khususnya di Kawasan Konservasi Laut Banda dan sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menindaklanjuti pembahasan hingga finalisasi *Draft* Perjanjian Kemitraan dimaksud, mohon Bapak dapat memberikan arahan terhadap *draft* dokumen tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN EKOSISTEM GILI INDAH

**NOMOR : B. 2749/BKKPN/HK.320/VIII/2023
NOMOR : 001/YEGI/PKS/VIII/2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PULAU GILI AIR, GILI MENO
DAN GILI TRAWANGAN, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (11-8-2023) bertempat di Gili Trawangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **IMAM FAUZI**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **MALIK**
Jabatan : **Ketua Yayasan Ekosistem Gili Indah**
Alamat : **Jalan Ikan Hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekosistem Gili Indah (YEGI), yang berkedudukan di Jalan Ikan Hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat lokal yang berkedudukan di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara yang dibentuk pada tahun 2013 di Gili Trawangan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, sesuai Akta Pendirian No.12 tertanggal 14 Januari 2013 yang kemudian diperbaharui dengan Akte No.13 Tanggal 18 Juli 2023 oleh Notaris Mardiana, SH., M.Kn. Nomor: C - 475. HT. 03.01 tanggal 29 Desember 2004.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan yang merupakan Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini, meliputi:

- a. Pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang;
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- d. Pelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring ekosistem pesisir dan laut (kondisi ekosistem terumbu karang dan ikan karang);
 - b. Memberikan dukungan pendampingan personil dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode *biorock* di lokasi yang telah memiliki izin;
 - c. Memberikan dukungan pendampingan personil kegiatan monitoring struktur *biorock* di lokasi yang telah memiliki izin;
 - d. Melaksanakan kegiatan edukasi konservasi dan sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi;
 - e. Memberikan pendampingan kegiatan pembersihan sampah di dasar laut (*underwater clean up*);
 - f. Memberikan pendampingan kegiatan bersih pantai (*beach clean up*).
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan personil dalam kegiatan monitoring ekosistem pesisir dan laut (kondisi ekosistem terumbu karang dan ikan karang);
 - b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode *biorock* di lokasi yang telah memiliki izin;

- c. Melaksanakan kegiatan monitoring struktur *biorock* di lokasi yang telah memiliki izin;
- d. Ikut serta dan mendukung kegiatan edukasi konservasi dan sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi;
- e. Melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di dasar laut (*underwater clean up*), serta menyiapkan dukungan personil;
- f. Melaksanakan kegiatan bersih pantai (*beach clean up*), serta menyiapkan dukungan personil.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau

diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Ketua Yayasan Gili Indah dan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan

- kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang,
Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Ekosistem Gili Indah

Alamat : Jalan Ikan Hiu, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa
Tenggara Barat

No HP : 0819 1725 7055 / 0877 6845 4969

E-mail : giliecotrust@gmail.com; info@giliecotrust@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Lembar Pengesahan		
No	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Pokja Kerja Sama dan Konvensi, Dit.KKHL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor : B. 2749/BKKPN/HK.320/VIII/2023
 Nomor : 001/YEGI/PKS/VIII/2023

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PULAU GILI AIR, GILI MENO DAN GILI TRAWANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Melaksanakan kegiatan monitoring ekosistem pesisir dan laut (kondisi ekosistem terumbu karang dan ikan karang)	Memberikan pendampingan personil dalam kegiatan monitoring ekosistem pesisir dan laut (kondisi ekosistem terumbu karang dan ikan karang)	Perairan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	2023 - 2026	Terlaksananya monitoring bersama dalam kawasan TWP Gili Matra minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Terdatanya kondisi ekosistem terumbu karang dan ikan karang
2.	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	Memberikan dukungan pendampingan personil dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode <i>biorock</i> di lokasi yang telah	Perairan Pulau Gili Trawangan	2023 - 2026	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode <i>biorock</i>	Meningkatnya kondisi ekosistem terumbu karang

No.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		menggunakan metode <i>biorock</i> di lokasi yang telah memiliki izin,	memiliki izin,			sebanyak 3 (tiga) struktur selama jangka waktu kemitraan	
		Memberikan dukungan pendampingan personil kegiatan monitoring struktur <i>biorock</i> di lokasi yang telah memiliki izin	Melaksanakan kegiatan monitoring struktur <i>biorock</i> di lokasi yang telah memiliki izin	Perairan Pulau Gili Trawangan	2023 - 2026	Tersedianya laporan monitoring struktur <i>biorock</i> di lokasi yang telah memiliki izin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Terdatanya kondisi karang yang telah direhabilitasi menggunakan metode <i>biorock</i> di perairan Gili Trawangan
3.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melaksanakan kegiatan edukasi konservasi dan sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi	Ikut serta dan mendukung kegiatan edukasi konservasi dan sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku di dalam kawasan konservasi	Pulau Gili Trawangan	2023-2026	Terlaksananya edukasi konservasi konservasi Pulau Gili Matra minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pemahaman <i>stakeholder</i> tentang pengelolaan kawasan konservasi

No.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
4.	<p>(b)</p> <p>Pelestarian ekosistem pesisir dan laut</p>	<p>(c)</p> <p>Memberikan pendampingan kegiatan pembersihan sampah di dasar laut (<i>underwater clean up</i>)</p>	<p>(d)</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di dasar laut (<i>underwater clean up</i>), serta menyiapkan dukungan personil</p>	<p>(e)</p> <p>Perairan Pulau Gili Trawangan</p>	<p>(f)</p> <p>2023-2026</p>	<p>(g)</p> <p>Terlaksananya kegiatan pembersihan sampah di dasar laut perairan Pulau Gili Trawangan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) tahun</p>	<p>(h)</p> <p>Lestarnya kondisi ekosistem pesisir dan laut di perairan Pulau Gili Trawangan</p>
		<p>Memberikan pendampingan kegiatan bersih pantai (<i>beach clean up</i>)</p>	<p>Melaksanakan kegiatan bersih pantai (<i>beach clean up</i>), serta menyiapkan dukungan personil</p>	<p>Pesisir Pantai Pulau Gili Trawangan</p>	<p>2023-2026</p>	<p>Terlaksananya kegiatan bersih pantai pulau Gili Trawangan minimal 3 (tiga) kali 1 (satu) tahun</p>	<p>Lestarnya kondisi ekosistem pesisir dan laut di perairan Pulau Gili Trawangan</p>

PIHAK KEDUA



WALUK
YAYASAN EKOSISTEM
GILI INDAH

PIHAK KESATU



IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan

No	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Pokja Kerja Sama dan Konvensi, Dit. KKHL	



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

UNIVERSITAS BANDA NAIRA

**NOMOR : B.2779/BKKPN/HK.320/VIII/2023
NOMOR : 057/SPN/UBN/X/2023**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENJANGKAUAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN
DAN PENELITIAN SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI
LAUT BANDA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-8-2023) bertempat di Banda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **IMAM FAUZI**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : **MUHAMMAD FARID**
Jabatan : **Rektor Universitas Banda Naira**
Alamat : **Jalan Said Tjong Baadila No 1, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banda Naira (UBN), yang berkedudukan di Jalan Said Tjong Baadila No 1, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Banda Naira yang mengacu pada SK Pendirian Universitas Banda Naira oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 502/E/O/2022, Tanggal 12 Juni 2022.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penjangkauan dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Alam di Kawasan Konservasi Laut Banda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penjangkauan dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan dan penelitian data dan informasi sumber daya alam di Kawasan Konservasi Laut Banda.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- c. pengabdian untuk masyarakat;
- d. pengembangan, penelitian dan pendidikan.
- e. pengembangan data dan informasi konservasi.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan administrasi dan materi terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - b. melaksanakan kegiatan penjangkauan penyadartahuan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda dengan menyediakan SDM dan penunjang lainnya;
 - c. melaksanakan upaya pengendalian sampah di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - d. melaksanakan identifikasi potensi dan pengembangan konsep desa ekowisata di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - e. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - f. menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas SDM untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - h. menyiapkan SDM pengelola kawasan konservasi dan melaksanakan kegiatan eksplorasi potensi sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya; dan
 - i. menyediakan data dan informasi serta publikasi ilmiah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan SDM sesuai pertimbangan untuk kegiatan magang/merdeka belajar kampus merdeka (MBKM);
 - b. melaksanakan kegiatan penjangkauan penyadartahuan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda dengan menyediakan SDM dan penunjang lainnya;
 - c. melaksanakan upaya pengendalian sampah di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - d. melaksanakan pendampingan pelaksanaan identifikasi desa dan pengembangan konsep desa ekowisata di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;

- e. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait yang berkompeten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat;
- f. menyiapkan SDM (Mahasiswa) untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN);
- g. menyediakan dukungan dan SDM untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda;
- h. memberikan dukungan dan menyediakan SDM untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi potensi sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya;
- i. menyediakan data dan informasi serta melakukan kajian/penelitian dan publikasi ilmiah bersama sebagai penulis; dan
- j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk

- pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
 - (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Rektor Universitas Banda Naira dan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan

peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang,
Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

No Telepon : (0380) 890421

E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Banda Naira

Alamat : Jalan Said Tjong Baadila No 1, Kecamatan Banda,
Kabupaten Maluku Tengah, Maluku

No Telepon : (0910) 21026

E-mail : surat.ubn@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FARID

PIHAK KESATU

IMAM FAUZI

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor : B.2780/BKKPN/HK.320/VIII/2023
 Nomor :

**RENCANA AKSI
 PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN, PENINGKATAN KAPASITAS
 SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA**

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi perikanan	Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi perikanan ekonomis penting di Kawasan Konservasi Laut Banda	Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi port sampling perikanan tuna handline yang dilakukan 8 kali per satu bulan	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2024	Terlaksananya satu kali setiap tahun, database informasi perikanan ekonomis penting	Tersedianya laporan data dan informasi yang valid terkait perkembangan sektor perikanan
2.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sekitar kawasan komservasi	Melaksanakan kegiatan penjangkauan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda	Mendukung pembiayaan melalui beasiswa bagi mahasiswa Universitas Banda Naira	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2025	Terlaksananya 1 (satu) kali setiap tahun, kegiatan penjangkauan penyadartahuan masyarakat dan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	Meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait lingkungan dan konservasi

No	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		penunjang lainnya.	penunjang lainnya.				
		Melaksanakan upaya pengendalian sampah di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda.	Melaksanakan upaya pengendalian sampah di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda.	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali setiap tahun, kegiatan upaya pengendalian sampah di sekitar Kawasan Konservasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaksanakan identifikasi potensi dan pengembangan konsep desa ekowisata di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda.	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan identifikasi desa dan pengembangan konsep desa ekowisata di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda.	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali selama kemitraan, kegiatan identifikasi potensi dan rencana pengembangan desa ekowisata di kawasan konservasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pengembangan potensi desa ekowisata
		Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk	Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait yang	Kawasan Konservasi Laut	2023-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali selama kemitraan,	Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten

No	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda.	berkompeten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat	Banda dan Sekitarnya		kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda	bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi
		Menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas SDM untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Menyiapkan SDM (Mahasiswa) untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN)	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Terlaksananya minimal 20 (dua puluh) mahasiswa setiap tahun, yang melaksanakan kegiatan KKN di kawasan konservasi dan sekitarnya	Meningkatnya potensi masyarakat untuk pengembangan sosial ekonomi dan lingkungan
4.	Pengembangan, Penelitian dan Pendidikan	Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda	Menyediakan dukungan dan SDM untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap sumber daya hayati laut	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali setiap tahun, kegiatan monitoring terhadap sumber daya hayati laut di Kawasan	Tersedianya data dan informasi kondisi sumber daya hayati laut di kawasan konservasi

No	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			di Kawasan Konservasi Laut Banda			Konservasi Laut Banda	
		Menyiapkan SDM pengelola kawasan konservasi dan melaksanakan kegiatan ekspolorasi potensi sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	Memberikan dukungan dan menyediakan SDM untuk pelaksanaan kegiatan ekspolorasi potensi sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Tersedianya minimal 1 (satu) laporan setiap tahun, ekspolorasi potensi sumber daya hayati laut di Kawasan Konservasi.	Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya hayati perairan di kawasan konservasi
		Menyediakan data dan informasi serta publikasi ilmiah.	Menyediakan data dan informasi serta melakukan kajian/penelitian dan publikasi ilmiah bersama sebagai penulis.	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2027	Terlaksananya minimal 2 (satu) publikasi ilmiah selama kemitraan.	Tersedianya publikasi data dan informasi di kawasan konservasi



PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

MUHAMMAD FARID



PIHAK KESATU

**METERAI
TEMPEL**

5B4AKX478866286

[Handwritten signature]
IMAM FAUZI



PERJANJIAN KEMITRAAN



ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN ALAM INDONESIA LESTARI (LINI)

NOMOR : B.2780/BKKPN/HK.320/VIII/2023

NOMOR : 131/LINI/VIII/2023

TENTANG

**PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
PERIKANAN, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PERLINDUNGAN EKOSISTEM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA**

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15 - 8 - 2023) bertempat di Kampus Universitas Banda Naira, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama** : Imam Fauzi
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama** : Gayatri Reksodihardjo
Jabatan : Pendiri Yayasan LINI
Alamat : Jalan Tukad Badung XIX No.2, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), yang berkedudukan di Jalan Tukad Badung XIX No.2, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya laut pesisir melalui ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengembangan masyarakat melalui perikanan berkelanjutan di Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 3 Maret 2008.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Pengumpulan dan Pengembangan Data dan Informasi Perikanan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Ekosistem di Kawasan Konservasi Laut Banda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dalam lingkup pengumpulan dan pengembangan data dan informasi, penguatan sosial ekonomi masyarakat serta perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan di Kawasan Konservasi Laut Banda.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi;
- b. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
- c. perlindungan dan rehabilitasi habitat.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi perikanan ekonomis penting di Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - b. melaksanakan kegiatan penjangkauan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda;
 - c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi habitat; dan
 - d. memberikan dukungan personil monitoring rehabilitasi habitat.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi port sampling perikanan tuna handline yang dilakukan 8 kali dalam satu bulan;
 - b. Mendukung pembiayaan melalui beasiswa bagi mahasiswa Universitas Banda Naira;
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang;
 - d. Melaksanakan kegiatan monitoring rehabilitasi habitat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pimpinan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) dan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10
Keadaan Kahar

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar

Pasal 11
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Pendiri Yayasan Alam Indonesia Lestari LINI
Alamat : Jalan Tukad Badung XIX No.2, Renon, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
No Telepon : (0361) 4782444
E-mail : info@lini.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


GAYATRI REKSODIHARDJO

PIHAK KESATU



IMAM FAUZI

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor : B.2780/BKKPN/HK.320/VIII/2023

Nomor : 131/LINI/VIII/2023

RENCANA AKSI
PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN, PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi perikanan	Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi perikanan ekonomis penting di Kawasan Konservasi Laut Banda	Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi port sampling perikanan tuna handline yang dilakukan 8 kali per satu bulan	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2024	Terlaksananya satu kali setiap tahun, database informasi perikanan ekonomis penting	Tersedianya laporan data dan informasi yang valid terkait perkembangan sektor perikanan
2.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sekitar kawasan konservasi	Melaksanakan kegiatan penjangkauan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Banda	Mendukung pembiayaan melalui beasiswa bagi mahasiswa Universitas Banda Naira	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2025	Terlaksananya 1 (satu) kali setiap tahun, kegiatan penjangkauan penyadartahuan masyarakat dan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	Meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait lingkungan dan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
3.	Perlindungan dan rehabilitasi habitat	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi habitat	Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023	Terlaksananya 1 (satu) kali kegiatan rehabilitasi habitat	Persentase tutupan terumbu karang meningkat
		Memberikan dukungan personil monitoring rehabilitasi habitat	Melaksanakan kegiatan monitoring rehabilitasi habitat	Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya	2023-2024	Terlaksananya 6 (enam) kali kegiatan monitoring rehabilitasi habitat	Situs rehabilitasi terumbu karang yang terawat

PIHAK KEDUA



GAYATRI REKSODIHARDJO

PIHAK KESATU



IMAM FAUZI

Lampiran 6



Berita Acara Serah Terima

Bantuan KOMPAK

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

MEMORANDUM

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Data Informasi BKKPN Kupang
Hal : Laporan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang TW III Tahun 2023
Tanggal : 5 Oktober 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan indikator kinerja Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang hingga Triwulan III Tahun 2023 ini, disampaikan sebagai berikut :

1. Telah disampaikan 3 (tiga) paket Bantuan Pemerintah untuk 3 (tiga) kelompok yaitu: 1). Kelompok Meno Lestari; 2). Yayasan KOPPELDA; dan 3). Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (YCSI).
2. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Meno Lestari yang berlokasi di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, berupa 2 set peralatan selam dengan total bantuan senilai Rp. 59.998.053,-. Bantuan telah diserahterimakan pada tanggal 21 Juni 2023, nomor dokumen BAST: B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/2023 **(dokumen terlampir)**.
3. Bantuan Pemerintah untuk Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (KOPPELDA) yang berlokasi di Desa Mondu, Kecamatan Kandatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 8 set bak penampung sampah (3 pilah kapasitas 50 liter, model bulat, 3 warna) dan 1 unit motor roda tiga (Viar New Karya 200cc) dengan total bantuan senilai Rp. 54.757.400,-. Bantuan telah diserahterimakan pada tanggal 26 Juni 2023, nomor BAST: B.2226/BKKPN/PRL.440/VI/2023 **(dokumen terlampir)**.

4. Bantuan Pemerintah untuk Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (YCSI) yang berlokasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berupa 1 unit longboat/fiber pengangkut sampah dan 1 unit mesin tempel/Yamaha 15 PK, total bantuan senilai Rp. 69.995.601,-. Bantuan telah diserahkan pada tanggal 15 Agustus 2023, nomor BAST: B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023 **(dokumen terlampir)**.

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama dan Data Informasi



Martanina, S.St.Pi



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR : B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, Tahun dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
- Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Sutarpo
Jabatan : Ketua Kelompok Meno Lestari
Alamat : Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Kelompok Meno Lestari,



Sutarpo
Ketua

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Scuba Set Bouyancy Compensator Device	2	Set	32.155.035
2.	Dive Tank	2	Unit	9.908.193
3.	Mask dan Snorkle	2	Pasang	1.748.805
4.	Fins Open Heel	2	Pasang	2.956.374
5.	Booties	2	Pasang	2.154.732
6.	<i>Long Wetsuit</i>	2	Unit	6.484.620
7.	Belt	2	Unit	663.780
8.	Weight	10	Kg	2.221.110
9.	Smb	2	Unit	1.314.795
10.	Reel	2	Unit	390.609
Total Harga Perolehan (Rp)				Rp. 59.998.053

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Kelompok Meno Lestari,



Sutarpo
Ketua



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR : B.2226/BKKPN/PRL.440/VI/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, Tahun dua ribu dua puluh tiga (26-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Deni Karanggulimu, S.H
Jabatan : Koordinator Umum Yayasan KOPPESDA
Alamat : Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
bertindak untuk dan atas nama Yayasan KOPPESDA, berkedudukan di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Konservasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.

3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Konservasi yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Konservasi.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng.
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Yayasan KOPPESDA,

Deni Karanggulimu, S.H
Koordinator Umum

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023**

Nomor : B. 2226/BKKPN/PRL.440/VI/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Bak Penampung Sampah (3 pilah kapasitas 50 liter model bulat 3 warna)	8	Set	10.890.400
2.	Motor roda tiga (Viar New Karya 200 cc)	1	Unit	43.867.000
Total Harga Perolehan (Rp)				Rp. 54.757.400

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Yayasan KOPPELDA,



Deni Karanggulimu, S.H
Koordinator Umum



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231

TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN kkp.go.id/djprl/bkkpnpkupang

SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023
NOMOR : B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Magafira Ali
Jabatan : Ketua Yayasan Cahaya Samudera Indonesia
Alamat : Desa Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.

3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Yayasan Cahaya Samudera
Indonesia,

Magafira Ali
Ketua Umum

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2023

Nomor : **B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023**
Tanggal : 15 Agustus 2023

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1.	Longboat/Fiber Pengangkut Sampah	1	Unit	37.962.000
2.	Mesin Tempel/Yamaha 15PK	1	Unit	32.033.601
Total Harga Perolehan (Rp)				Rp. 69.995.601

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang,



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 19750830 200502 1 001

PIHAK KEDUA

Yayasan Cahaya Samudera
Indonesia,



Magafira Ali
Ketua Umum

Lampiran 7



Capaian PNBP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
Nomor: 107/DJPRL.1/TU.220/I/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN
Hal : Capaian PNBP Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2023
Lampiran : satu (1) lembar
Tanggal : 11 Januari 2024

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian PNBP lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan capaian PNBP sebesar Rp704.349.456.508,00 dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar Rp333.169.648.000,00 atau 211,41% yang berasal dari PNBP fungsional dan PNBP KSP Pulau Nipa. Adapun capaian PNBP fungsional masing masing satker sebagai terlampir.

Demikian disampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



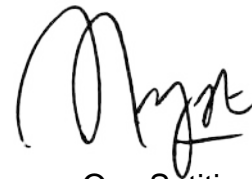
Ony Satiti

Lampiran surat

Nomor : 107/DJPRL.1/TU.220/I/2024

Tanggal : 11 Januari 2024

No	Satker	Target PNBP dalam PK (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (%)
1	Direktorat Jasa Kelautan	12.431.094.000	169.327.754.043	1362,13
2	Direktorat PRL	300.017.190.000	475.538.657.172	158,50
3	Direktorat P4K	2.914.608.000	34.499.124.127	1183,66
4	Direktorat KKHL	9.850.642.000	10.631.068.752	107,92
5	BPSPL Padang	524.347.000	958.877.695	182,87
6	BPSPL Denpasar	850.000.000	3.037.033.914	357,30
7	BPSPL Pontianak	900.000.000	2.374.620.820	263,85
8	BPSPL Makassar	675.000.000	882.681.301	130,77
9	LPSPL Serang	2.550.000.000	3.030.253.433	118,83
10	LPSPL Sorong	718.180.000	1.647.742.751	229,43
11	BKKPN Kupang	1.725.000.000	2.369.683.750	137,37
12	LKKPN Pekanbaru	13.587.000	51.958.750	382,42
	Total	333.169.648.000	704.349.456.508	211,41



Ony Satiti

Lampiran 8



NILAI IKPA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 100/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 20/SJ.1/RC.610/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja Manajerial Triwulan IV Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 07.30.
2. Capaian IKU IKPA Triwulan IV tahun 2023 KKP sebesar 91,90 dari target nilai 93,75.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA triwulan IV tahun 2023 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Meningat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Setyawati

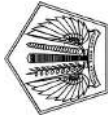
Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100,00	68,93	85,57	93,10	99,17	95,72	85,00	99,73	91,99	100%	91,99
				10	10	20	10	10	5	25				
				10,00	6,89	17,11	9,31	9,92	9,57	4,25	24,93			
				84,47				91,71						



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	74.24	96.89	94.24	99.61	96.82	100.00	99.92	95.85	100%	95.85
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	7.42	19.38	9.42	9.96	9.68	24.98				
			Nilai Aspek	87.12		97.51		99.92						
2	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	66.26	96.47	94.00	100.00	98.95	100.00	100.00	95.22	100%	95.22
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.63	19.29	9.40	10.00	9.90	25.00				
			Nilai Aspek	83.13		97.88		100.00						
3	03212	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	72.15	92.30	93.32	98.95	96.44	90.00	100.00	94.05	100%	94.05
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	7.22	18.46	9.33	9.90	9.64	25.00				
			Nilai Aspek	86.08		94.20		100.00						
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	65.84	86.50	93.45	99.02	91.64	90.00	99.99	91.79	100%	91.79
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.58	17.30	9.35	9.90	9.16	25.00				
			Nilai Aspek	82.92		92.12		99.99						
5	03207	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	69.74	82.28	90.53	98.99	94.38	80.00	99.45	90.68	100%	90.68
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.97	16.46	9.05	9.90	9.44	24.86				
			Nilai Aspek	84.87		89.24		99.45						



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	56.83	82.40	92.74	99.40	95.89	90.00	100.00	90.47	100%	90.47
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	5.68	16.48	9.27	9.94	4.50	25.00				
			Nilai Aspek	78.42			92.09			100.00				
7	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.88	79.69	93.25	99.14	96.26	85.00	99.44	90.30	100%	90.30
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.39	15.94	9.33	9.91	4.25	24.86				
			Nilai Aspek	81.94			90.67			99.44				
8	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	59.56	73.95	94.05	100.00	97.20	100.00	100.00	89.87	100%	89.87
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	5.96	14.79	9.41	10.00	5.00	25.00				
			Nilai Aspek	79.78			93.04			100.00				
9	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	62.28	78.12	93.39	99.17	97.52	80.00	99.42	89.71	100%	89.71
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	6.23	15.62	9.34	9.92	4.00	24.85				
			Nilai Aspek	81.14			89.64			99.42				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sotker	Uraian Sotker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir Total/Konversi Bobot
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKNP) KUPANG	Nilai	100,00	100,00	98,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,42	100%	99,42
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	10,00	19,72	9,70	10,00	10,00	25,00				
Nilai Aspek						100,00		99,12			100,00					
2	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100,00	94,37	99,62	100,00	100,00	99,83	100,00	100,00	99,34	100%	99,34
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,44	19,92	10,00	10,00	9,98	25,00				
Nilai Aspek						97,19		99,89			100,00					
3	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100,00	94,53	100,00	95,50	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	100%	99,00
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,45	20,00	9,55	10,00	10,00	25,00				
Nilai Aspek						97,27		99,10			100,00					
4	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100,00	88,55	100,00	100,00	100,00	96,92	100,00	100,00	98,55	100%	98,55
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	8,86	20,00	10,00	10,00	9,69	25,00				
Nilai Aspek						94,28		99,38			100,00					
5	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100,00	90,88	98,45	100,00	100,00	97,30	100,00	100,00	98,51	100%	98,51
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,09	19,69	10,00	10,00	9,73	25,00				
Nilai Aspek						95,44		99,15			100,00					

Lampiran 9



Nilai Kinerja Anggaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya
4. Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Menindaklanjuti memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor.2/SJ.1/ RC.610/2024 tentang Penyampaian Data Capaian Indikator Kinerja (IK) Manajerial Triwulan IV tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2024, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Proses mengunduh (*download*) data capaian IK NKA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan data SMART DJA per tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 54/SJ.2/TU.210/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.
2. Capaian nilai IK NKA KKP triwulan IV tahun 2023 sebesar 95.04, seluruh Unit Eselon I **telah mencapai target** yang telah ditetapkan sebesar 86,00 dan terdapat Satuan Kerja (Satker) **tidak mencapai target** sebesar 82,00 (terlampir).

3. Berikut kami sampaikan data capaian IK NKA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKA pada triwulan IV tahun 2023 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

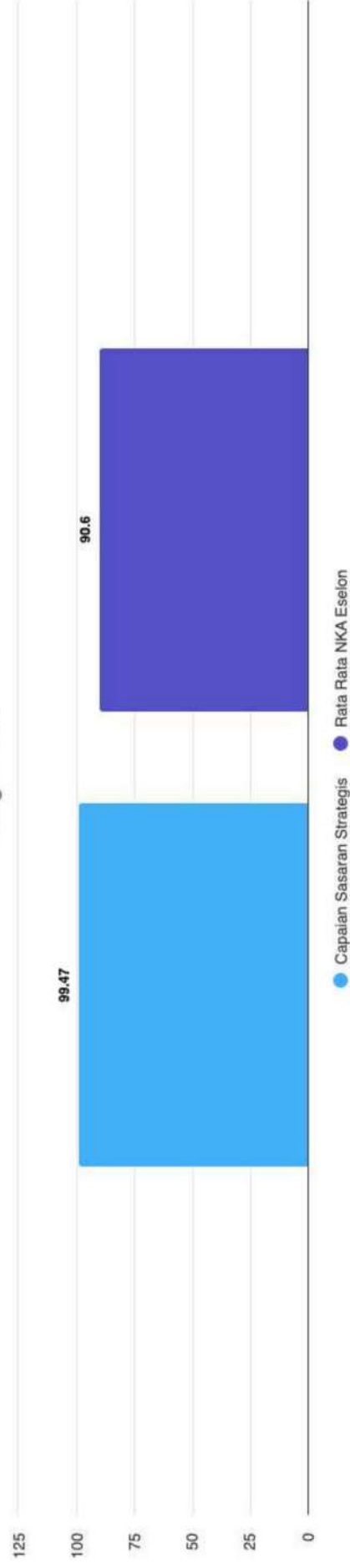
1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

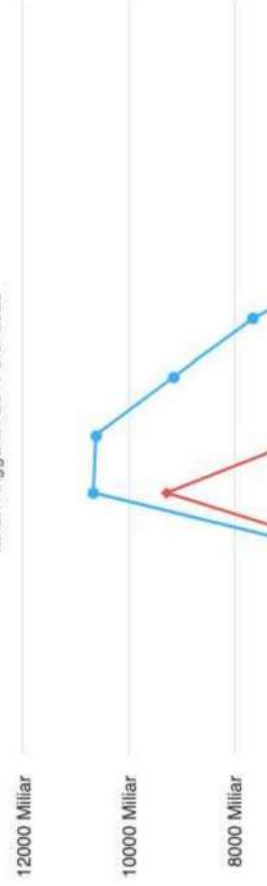
Dashboard



Nilai Kinerja
95.04
Sangat Baik

**Pagu dan Realisasi Anggaran**

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023

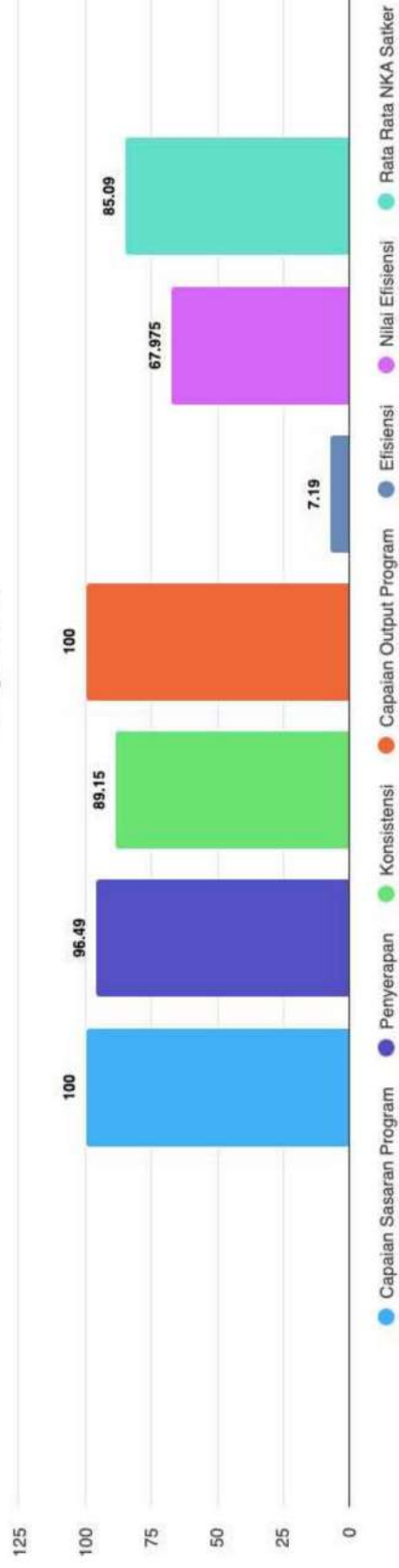


Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Nilai Kinerja

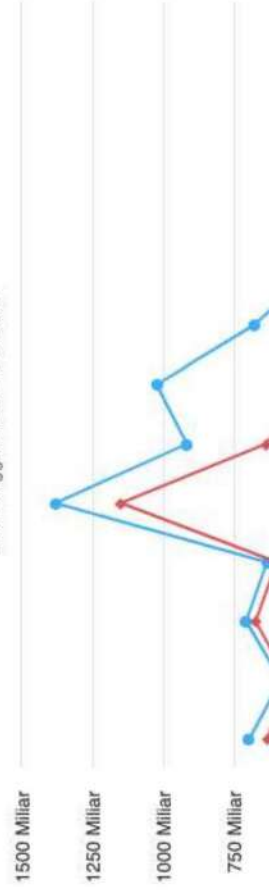
90.63

Sangat Baik



Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



NKA Satuan Kerja

Tampilkan

All

↔

entri

Cari:

Download Excel

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja	Kinerja ↑	Penyerapan ↑	Konsistensi ↑	CRO ↑	Efisiensi ↑	Nilai Efisiensi ↑
1	025092	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	74,04	94,95	11,33	100,00	6,95	67,38
2	025447	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. CIREBON	73,32	94,91	14,71	100,00	5,09	62,73
3	035019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	78,40	87,32	16,86	100,00	12,68	81,69
4	045035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	84,85	99,58	93,89	100,00	0,42	51,05
5	055036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	93,57	58,86	86,57	100,00	20,00	100,00
6	055490	DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN	84,94	99,65	94,65	100,00	0,35	50,88
7	065024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	74,77	99,50	21,90	100,00	4,66	61,65
8	075035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	81,28	76,79	9,50	100,00	20,00	100,00
9	085006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	72,68	98,81	24,43	100,00	1,19	52,98
10	095041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	86,55	97,97	97,80	100,00	2,03	55,07
11	105037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	87,66	95,24	94,58	100,00	4,76	61,91
12	115040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	79,36	98,00	58,38	100,00	2,00	55,00
13	125036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	83,41	99,95	87,25	100,00	0,05	50,12
14	135027	DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	83,88	100,00	90,00	100,00	0,00	50,00
15	145032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	91,69	99,48	87,42	100,00	11,65	79,14
16	155039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	84,58	97,85	86,57	100,00	2,15	55,37
17	165036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	84,51	80,33	25,36	100,00	20,00	100,00
18	175057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	72,92	99,94	29,59	100,00	0,06	50,15

NKA Satuan Kerja

[Download Excel](#)

 Tampilkan entri

 Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
19	289038	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	76,55	100,00	49,74	100,00	0,00	50,00
20	289037	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	84,23	99,65	83,49	100,00	2,20	55,49
21	289056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO	86,42	92,44	78,29	100,00	7,56	68,90
22	289060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	86,92	99,08	28,61	100,00	20,00	100,00
23	289035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA	85,00	99,61	94,83	100,00	0,39	50,98
24	289032	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI MALUKU	85,17	100,00	97,09	100,00	0,00	50,00
25	289057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BALI	90,77	90,71	96,31	100,00	9,29	73,22
26	289050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	81,97	99,97	79,42	100,00	0,03	50,08
27	289069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BAGAT	99,99	99,97	99,96	100,00	20,00	100,00
28	249068	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	82,30	99,60	79,96	100,00	0,40	51,00
29	289040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROPINSI PAPUA	85,57	99,94	99,07	100,00	0,06	50,15
30	289036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BENGKULU	75,70	99,01	41,72	100,00	0,99	52,47
31	289031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI MALUKU UTARA	85,49	100,00	98,87	100,00	0,00	50,00
32	280346	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	89,66	95,27	93,76	100,00	7,76	69,41
33	289038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTER	85,52	99,94	98,83	100,00	0,06	50,15
34	209041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	83,83	99,77	88,92	100,00	0,23	50,58
35	289035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI GORONTALO	83,82	96,76	78,71	100,00	3,24	58,09
36	289033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU	87,24	97,17	98,87	100,00	2,83	57,07
37	289154	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA BARAT	90,32	89,91	91,09	100,00	10,09	75,23
38	240066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI BARAT	85,35	99,57	96,63	100,00	0,43	51,08
39	417744	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	99,81	100,00	98,95	100,00	20,00	100,00
40	477435	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DERPASAR	87,39	97,20	99,77	100,00	2,80	57,01
41	477435	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	85,85	98,95	96,85	100,00	1,15	52,87
42	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	88,69	97,76	99,31	100,00	4,66	61,66
43	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERONG	92,11	94,90	99,05	100,00	9,89	74,73
44	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PERAMBABU	88,46	96,38	99,09	100,00	4,58	61,45

NKA Satuan Kerja

[Download Excel](#)

Tampilkan All 48 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
44	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKABARU	88,46	96,38	99,09	100,00	4,58	61,45
45	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	90,24	97,33	99,67	100,00	6,80	66,99
46	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	94,48	95,90	96,73	100,00	13,67	84,18
47	603201	DINAS KETAMAMAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	85,75	98,81	96,19	100,00	1,19	52,99
48	622145	SEKRETARIAT DJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	87,20	96,45	84,94	100,00	6,41	66,03

Menampilkan 1 sampai 48 dari 48 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Lampiran 10



NILAI WBK

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

MEMORANDUM

Nomor: 02/DJPKRL.1.4/TU.210/I/2024

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Dari : Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK
Tanggal : 04 Januari 2024

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL dengan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Tahun 2023 adalah 8 dan pada triwulan IV tahun 2023 target dimaksud telah tercapai 8 (delapan) unit kerja;
2. Capaian indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
3. Data dukung capaian Indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dapat dilihat pada bit.ly/SAKIPDJPR.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Fivien Ocktaviani

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran
Nomor : 02/DJPKRL.1.4/TU.140/I/2023
Tanggal : 04 Januari 2024

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK**

NO	UNIT KERJA	PREDIKAT WBK	NILAI	KETERANGAN
1	BPSPL PADANG	TPI KKP	93,31	BPSPL Padang diusulkan Predikat Menuju WBK TPN KemenPANRB Tahun 2023
2	BKKPN KUPANG	TPI KKP dan TPN	93,03	BKKPN Kupang pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
3	LKKPN PEKANBARU	TPI KKP dan TPN	92,49	LKKPN Pekanbaru pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
4	BPSPL PONTIANAK	TPI KKP dan TPN	90,81	BPSPL Pontianak pada Tahun 2022 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPN KemenPANRB
5	BPSPL DENPASAR	TPI KKP	87,57	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
6	BPSPL MAKASSAR	TPI KKP	87,41	Pemantauan Penilaian dilakukan oleh TPI KKP pada tahun 2022
7	LPSPL SERANG	TPI KKP	85,68	LPSPL Serang diusulkan Predikat Menuju WBK TPN KemenPANRB Tahun 2023
8	LPSPL SORONG	TPI KKP	81,64	LPSPL Sorong pada Tahun 2021 berhasil memperoleh Predikat Menuju WBK dari TPI

*penilaian berlaku 2 tahun

Lampiran 11



NILAI IP ASN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN
www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024

12 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional
Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2023
lingkup Direktorat Jenderal PKRL

Yth.

1. Direktur lingkup Ditjen PKRL
 2. Kepala UPT lingkup Ditjen PKRL
- di Tempat

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2023 di triwulan IV atau capaian Semester II Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target pengukuran IKU IP ASN Tahun 2023 adalah sebesar 85 (Kategori Tinggi);
2. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PKRL Semester II Tahun 2023, berdasarkan hasil pengukuran *Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin* pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 9 Januari 2024 yaitu **89,95 (kategori tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 21,26, Kompetensi 38,56, Kinerja 25,13, dan Disiplin 5** (tabel terlampir);
3. Berdasarkan data capaian IKU IP ASN diatas, maka target capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2023 telah tercapai, dan diharapkan pada tahun 2024, setiap unit kerja mendorong para pegawainya untuk melakukan peningkatan kualifikasi, kinerja dan kompetensi terutama komponen **Diklat 20 JP (jam pelatihan)** dengan metode e-learning baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.272/DJPKRL.1/KP.720/I/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Semester II Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Ditjen PRL	21,71	37,54	24,7	5	88,95
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	22,03	33,69	26	5	86,72
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,1	36,15	25,41	5	88,66
4.	Direktorat Jasa Kelautan	21,77	37,31	25,9	5	89,99
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	21,88	39,03	25	5	90,91
6.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	20,72	40	25,1	5	90,82
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	20,84	40	25	5	90,84
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	21,09	39,8	25	5	90,89
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	20,83	39,59	25	5	90,43
10.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	20,67	38,5	25	5	89,17
11.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	20,75	40	25,78	5	91,53
12.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	21,13	39,62	24,36	5	90,1
13.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	20,84	40	24,49	5	90,33
Nilai IP ASN Ditjen PKRL :		21,26	38,56	25,13	5	89.95

Keterangan :

1. Capaian nilai IP ASN Ditjen PRL diatas telah memenuhi target capaian akhir tahun 2023 yaitu sebesar 85 (Data diambil per tanggal 9 Januari 2024);
2. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/eselon>.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Lampiran 12



NILAI PM SAKIP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023 15 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 Lingkup DJPKRL

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Lingkungan DJPKRL dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi dan terima kasih atas peran aktif Tim Saudara dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga berkontribusi besar pada pencapaian Nilai SAKIP DJPKRL yang merupakan Terbaik 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
3. Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Komponen – komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) menu Evaluasi – LKE.

4. Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Lingkungan DJPKRL telah dilaksanakan pada 12 – 15 Juni di Jakarta dan 20-23 Juni 2023 di Bali dengan melibatkan Inspektorat III dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP.
5. Hasil penilaian AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023 disajikan sebagaimana terlampir.
6. Hasil penilaian AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023 dipergunakan sebagai data capaian kinerja Nilai PM SAKIP unit kerja terkait.

7. Uraian hasil keseluruhan penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang dapat diunduh pada bit.ly/SAKIPDjPRL2023 (folder 2013 > folder 19. PM SAKIP).
8. Secara garis besar rekomendasi hasil evaluasi SAKIP adalah perlu dilakukannya validasi setiap indikator kinerja agar SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound*).
9. Keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut diatas dapat menghubungi narahubung Sdri. Enny Syafrida Marpaung (HP: 081314 789106).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Ditandatangani
secara
Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Inspektur III, Itjen KKP
3. Kepala Biro Perencanaan, Setjen KKP

Lampiran 1. Surat

Nomor : B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

Hasil Penilaian Mandiri AKIP lingkup DJPKRL Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target	Komponen				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)			
1.	DJPKRL	80.5	24.30	26.40	13.20	20.63	84.53	A	Memuaskan
2.	Sekretariat Ditjen PRL	75	25.20	27.00	12.60	22.50	87.3	A	Memuaskan
3.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	75	22.20	24.00	12.65	21.05	79.9	BB	Sangat Baik
4.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	25.20	27.00	11.10	20.00	83.3	A	Memuaskan
5.	Direktorat Jasa Kelautan	75	25.20	27.00	12.60	20.05	84.85	A	Memuaskan
6.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	75	25.20	27.00	11.10	17.75	81.05	A	Memuaskan
7.	BKKPN Kupang	75	25.20	27.00	13.50	22.50	88.2	A	Memuaskan
8.	LKKPN Pekanbaru	75	25.20	27.00	11.95	20.00	84.15	A	Memuaskan
9.	LPSPL Serang	75	25.20	27.00	12.00	18.75	82.95	A	Memuaskan
10.	BPSPL Makassar	75	25.20	27.00	12.00	20.00	84.2	A	Memuaskan
11.	BPSPL Padang	75	25.20	27.00	13.45	22.55	88.2	A	Memuaskan
12.	BPSPL Pontianak	75	25.20	27.00	13.50	22.50	88.2	A	Memuaskan

No	Unit Kerja	Target	Komponen				Nilai AKIP	Predikat	Interpretasi
			Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Kinerja (25)			
13.	LPSPL Sorong	75	25.20	27.00	12.00	18.50	82.7	A	Memuaskan
14.	BPSPL Denpasar	75	25.20	27.00	12.00	20.00	84.2	A	Memuaskan

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Ditandatangani
secara
Elektronik

Kusdiantoro

Lampiran 2. Surat

Nomor : B. 7124/DJPKRL.1/RC.610/XII/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

Surat disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Direktur Jasa Kelautan
3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
4. Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
8. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
9. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
10. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
11. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
12. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
13. Ketua Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PRL

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PRL



Kusdiantoro

Ditandatangani
secara
Elektronik

Lampiran 13



Penyampaian Laporan SPIP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.180/BKKPN/HP.420/I/2023 10 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Laporan SPIP Triwulan IV BKKPN Kupang

Yth. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : B.11/DJPRL.1/HP.420/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan IV TA 2022. Perlu disampaikan Laporan SPIP Triwulan IV. Maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan IV Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1351/BKKPN/TU.140/IV/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Laporan SPIP Triwulan I BKKPN Kupang

10 April 2023

Yth. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Penyampaian Laporan SPIP, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2409/BKKPN/TU.140/VII/2023

10 Juli 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Dokumen

Hal : Laporan SPIP Triwulan II BKKPN Kupang

Yth. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Di-

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Penyampaian Laporan SPIP, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan II SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Tembusan:

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.3506/BKKPN/TU.140/X/2023 10 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Laporan SPIP Triwulan III TA 2023 BKKPN Kupang

Yth. Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memuat tentang Penyampaian Laporan bulanan SPIP yang dilakukan setiap bulan dengan maksimal penyampaian tanggal 10 bulan berikutnya, dan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : B.5260/DJPRL.1/TU.140/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Bulan September dan Triwulan III Tahun 2023, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan III SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Jakarta

Lampiran 14



Persentase Manajemen Pengetahuan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 59 /DJPKRL.1/TU.210/II/2024 04 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apresiasi dan terima kasih atas peran aktif Saudara dalam mendukung capaian Presentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 melalui *posting* berbagi pengetahuan melalui <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Penghitungan poin tersebut berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. Dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan IV disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran 1 Surat

Nomor : B. 59 /DJKRL.1/TU.210/I/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2023

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
2.	LKKPN Pekanbaru	92	100	100	133,3	133,3	116,65
3.	LPSPL Serang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
4.	BPSPL Pontianak	92	100	100	133,3	133,3	116,65
5.	BPSPL Makassar	92	100	100	133,3	133,3	116,65
6.	BPSPL Denpasar	92	100	100	0	133,3	83,325
7.	BKKPN Kupang	92	100	100	133,3	133,3	116,65
8.	LPSPL Sorong	92	100	100	133,3	133,3	116,65

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2023

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar		Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,3%
Nilai MP		133,3%
Nilai MP TW I	100,0%	
Nilai MP TW II	100,0%	
Nilai MP TW III	133,3%	
Nilai MP TW IV	133,3%	
Rata-Rata Nilai MP	116,7%	

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar		Dokumen	Keaktifan
Target			3
Realisasi			4
Skor			133,3%
Nilai MP			133,3%
Nilai MP TW I	100,0%		
Nilai MP TW II	100,0%		
Nilai MP TW III	0,0%		
Nilai MP TW IV	133,3%		
Rata-Rata Nilai MP	83,3%		

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%
Nilai MP TW I	100,0%
Nilai MP TW II	100,0%
Nilai MP TW III	133,3%
Nilai MP TW IV	133,3%
Rata-Rata Nilai MP	116,7%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,3%
Nilai MP	133,3%
Nilai MP TW I	100,0%
Nilai MP TW II	100,0%
Nilai MP TW III	133,3%
Nilai MP TW IV	133,3%
Rata-Rata Nilai MP	116,7%

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Lampiran 15



Persentase Tindakan Lanjut Hasil
Pengawasan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 317/DJPKRL.1/HP.470/I/2024 15 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL

Sehubungan dengan Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL" Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU Lingkup Kantor UPT Direktorat Jenderal PKRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Kantor UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu sebanyak 236 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 236 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Kusdiantoro

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.317/DJPKRL.1/HP.470/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Kantor UPT Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	BKKPN Kupang	23	23	100	0	0	100
2	BPSPL Makasar	50	50	100	0	0	100
3	BPSPL Padang	30	30	100	0	0	100
4	LPSPL Sorong	23	23	100	0	0	100
5	LPSPL Serang	36	36	100	0	0	100
6	LKKPN Pekanbaru	19	19	100	0	0	100
7	BPSPL Denpasar	32	32	100	0	0	100
8	BPSPL Pontianak	23	23	100	0	0	100
		236	236	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Lampiran 16



Persentase Penyelesaian Temuan
LHP BPK



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 592/DJPKRL.1/HP.520/II/2024 24 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
LK KKP Tahun 2022 lingkup UPT Ditjen PKRL

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL
Di tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP Tahun 2022 pada Kantor UPT lingkup Ditjen PKRL sebagai salah satu indikator kinerja berdasarkan hasil rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI, terdapat temuan kerugian negara sebesar sebesar Rp54.363.452,00 yang telah tuntas ditindaklanjuti atau 100% sebagaimana rincian terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran I Surat
Nomor : B. 592/DJPKRL.1/HP.520/I/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Penyelesaian Temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2022
Lingkup Kantor UPT Direktorat Jenderal PKRL

NO	SATKER	SALDO TEMUAN (Rp)	TINDAK LANJUT (Rp)	(%)	SISA TEMUAN (Rp)	(%)
1	BPSPL Padang	0	0	0	0	0
2	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0
3	LPSPL Serang	54.363.452	54.363.452	100	0	0
4	BPSPL Makassar	0	0	0	0	0
5	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0
7	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0
8	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0
	JUMLAH	54.363.452	54.363.452	100	0	0

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Lampiran 17



Tingkat Efektivitas Bantuan
Pemerintah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT

MEMORANDUM
NOMOR 3027 /DJPKRL.1/HP.410/XII/2023

Yth : 1. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Direktur Jasa Kelautan
4. UPT di Lingkup DJPKRL

Dari : Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Hal : Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanggal : 19 Desember 2023

Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 1 Desember 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, berikut disampaikan:

1. Rapat bertujuan untuk menyepakati hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh tim Setditjen PRL; Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta UPT di lingkup DJPKRL. Evaluasi telah dilakukan di 7 lokasi untuk 7 jenis bantuan yang menjadi *sampling* yakni bantuan konservasi, sarana / prasarana pengelolaan sampah, dermaga apung, sarana / prasarana produk turunan mangrove, wisata bahari, rumah garam dan *washing plant*.
2. Adapun aspek yang dievaluasi adalah:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (Lampiran 1) diperoleh nilai unit Eselon II sebesar 84 s.d. 100 dari target sebesar 77,5. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas pada Level 2 (Direktorat dan UPT di Lingkup DJPKRL).
4. Beberapa rekomendasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah dievaluasi, sebagai berikut:
 - a. Pada tahapan perencanaan pemberian bantuan pemerintah, pemberi perlu mempertimbangkan kebutuhan lokasi/kelompok penerima bantuan yang akan diberikan serta kesiapan penerima bantuan dalam memanfaatkan bantuan khususnya kesiapan dalam hal pembiayaan pemeliharaan bantuan.

- b. Pada tahapan pelaksanaan pemberian bantuan maupun setelahnya, diharapkan pemberi bantuan dapat meningkatkan kapasitas penerima bantuan untuk pemanfaatan bantuan agar bantuan dimanfaatkan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
 - c. Pemberi bantuan agar tetap melakukan pendampingan untuk keberlanjutan kegiatan dan pemanfaatan bantuan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dukungan Saudara menindaklanjutinya pada proses pemberian dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah ke depan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Yudha Rajabudin

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Sesditjen PRL

Lampiran 1. Memorandum
 Nomor : 3027/DJPKRL.1/HP.410/XII/2023
 Tanggal : 19 Desember 2023

Hasil Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL Tahun 2022

Unit Kerja	Bantuan Pemerintah	Kab/Kota	PT	IG	AT	TOTAL*
BPSPL Padang	Bantuan Konservasi	Aceh Barat Daya	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Pasaman Barat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Kota Sabang	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
BPSPL Pontianak	Bantuan Konservasi	Bulungan	80	10	10	100
BKKPN Kupang	Bantuan Konservasi	Biak Numfor	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Raja Ampat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Manggarai Barat	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
LPSPL Sorong	Bantuan Konservasi	Halmahera Barat	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Seram Bagian Barat	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
LKKPN Pekanbaru	Bantuan Konservasi	Kepulauan Anambas	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Kota Padang	65	10	10	85
	Nilai Rata-Rata		72,5	10	10	92,5
LPSPL Serang	Bantuan Konservasi	Kepulauan Seribu	65	7,5	10	82,5
	Bantuan Konservasi	Bengkulu	75	8	10	93
	Bantuan Konservasi	Pandeglang	65	7,5	10	82,5
	Nilai Rata-Rata		68,33	7,67	10	86
BPSPL Denpasar	Bantuan Konservasi	Karangasem	65	10	10	85
	Bantuan Konservasi	Klungkung	75	10	10	95
	Bantuan Konservasi	Flores Timur	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		73	10	10	93,33
BPSPL Makassar	Bantuan Konservasi	Bulukumba	80	10	10	100
	Bantuan Konservasi	Minahasa Utara	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
Dit. Jasa Kelautan	Wisata Bahari	Buleleng	80	10	10	100
	Rumah Garam	Karangasem	80	10	10	100
	Washing Plant	Tuban	80	10	10	100
	Gudang Garam Nasional (GGN)	Tuban	80	10	10	100
	Nilai Rata-Rata		80	10	10	100
Dit. P4K	TPS/PDU	Banyuwangi	80	10	10	100
	TPS/PDU	Buleleng	80	10	10	100
	Dermaga Apung	Sinjai	80	5	0	85

Unit Kerja	Bantuan Pemerintah	Kab/Kota	PT	IG	AT	TOTAL*
	Sarpras Produk Turunan Mangrove	Makassar	40	1	10	51
	Nilai Rata-Rata		70	6,5	7,5	84

Keterangan:

*Total adalah Nilai Efektivitas yang dihitung berdasarkan jumlah PT, IG dan AT

PT = Pencapaian tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori Predikat Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Predikat & Nilai	Interpretasi
AA : > 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
A : > 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
B : > 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
C : > 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
D : 0 - 40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Yudha Rajabudin

Lampiran 18



Realisasi Pendapatan dan Belanja
Negara



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
2	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	62,034,884	0	0	0	0	62,034,884
3	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	2,369,683,750	0	0	0	0	2,369,683,750
GRAND TOTAL		0	2,433,018,634	0	0	0	0	2,433,018,634



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	499352 BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	PAGU REALISASI	7,177,738,000 7,083,561,725 (98.69%)	15,598,450,000 14,638,072,044 (93.84%)	3,012,100,000 3,009,674,160 (99.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	25,788,288,000 24,731,307,929 (95.90%)
		SISA	94,176,275	960,377,956	2,425,840	0	0	0	0	0	0	1,056,980,071
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	7,177,738,000 7,083,561,725 (98.69%)	15,598,450,000 14,638,072,044 (93.84%)	3,012,100,000 3,009,674,160 (99.92%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	25,788,288,000 24,731,307,929 (95.90%)
		SISA	94,176,275	960,377,956	2,425,840	0	0	0	0	0	0	1,056,980,071



2024
KKP BEYOND